

4.1.6. Urusan Perhubungan

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Kelima** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk urusan Sosial adalah sebagai berikut : Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan **1,7**; Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum **134.320 Orang**; Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun : (a) Jumlah penumpang yang masuk Pelabuhan **697.921 Orang**; (b) Jumlah penumpang yang keluar Pelabuhan **709.732 Orang** (c) Jumlah penumpang yang masuk Terminal Angkutan Darat **730 Orang** (d) Jumlah penumpang yang keluar Terminal Angkutan Darat **2.190 Orang**.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Operasional dan Pelayanan kepelabuhanan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.323.300.000,- dan realisasi sebesar Rp.305.514.850,- atau Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya peningkatan pelayanan kepelabuhan untuk 5 Dermaga/Pelabuhan sehingga terwujudnya kenyamanan bagi masyarakat pengguna pelabuhan/dermaga
- (2) Kegiatan Operasional dan Pelayanan Terminal Angkutan Darat, dengan dana masukan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.89.980.000,-. dan realisasi sebesar Rp.86.842.148,-. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan baik untuk angkutan umum maupun penumpang dengan menjaga kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan bagi pengguna terminal
- (3) Kegiatan Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.171.330.000,-. dan realisasi sebesar

Rp.166.805.290,-. Output dari kegiatan terlaksananya pelayanan layak uji KIR kendaraan angkutan orang dan barang. Kendaraan yang diuji sebanyak 1.218 buah.

- (4) Kegiatan Operasional Subsidi Kapal dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.75.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.50.946.600,-. Output dari kegiatan adalah terlaksananya pemberian bantuan subsidi kapal bagi masyarakat Kecamatan Tambelan.
- (5) Kegiatan Pembinaan Pelayanan PAS Kecil Kapal Pompong Masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.70.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.58.949.450,-. Output dari kegiatan adalah terlaksananya pemberian bantuan kepada masyarakat dalam bentuk pembuatan tanda kepemilikan kapal/pompong GT 7 kebawah sebanyak 1000 kapal/ pompong.

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan program Peningkatan Pelayanan Angkutan tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan program dapat berjalan sesuai rencana.

2) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

a. Pelaksanaan Program

- (1) Pembangunan halte bis, taxi, gedung terminal, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.251.200.000,- dan realisasi sebesar Rp. Rp. 248.649.886 ,-. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan halte sebanyak 5 unit yang terletak di lokasi : (1).SDN 04, (2).SMAN-2, (3).Pasar Tani Kec. Toapaya. (4).SDN 009 Desa Lancang Kuning Kec. Bintan Utara, (5).SDN 001 Malang Rapat Kec. Gunung Kijang. Hasilnya adalah tersedianya halte bis/taxi/angkot bagi masyarakat pengguna angkutan umum.

- (2) Pembangunan dermaga/pelabuhan rakyat dan ruang tunggu dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.741.030.000,-. dan realisasi sebesar Rp.4.121.378.400,-. Output dari Kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan lanjutan tahap dua dermaga Semelur. Dengan dibangunnya dermaga/ pelabuhan ini dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi mobilitas orang dan barang serta dapat melancarkan pergerakan arus barang dan orang yang mana dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
- (3) Pengadaan Fasilitas Pendukung Operasional Pelabuhan Ferry Terminal Tanjung Berakit, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.219.600.000,-. dan realisasi sebesar Rp.218.060.565,-. Output dari kegiatan ini adalah pengadaan perlengkapan gedung mess petugas untuk mendukung Operasional Pelabuhan Ferry Terminal Tanjung Berakit. Hasilnya adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan mes petugas operasional pelabuhan ferry terminal Tanjung Berakit.
- (4) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dermaga / Pelabuhan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.385.653.550,- dan realisasi sebesar Rp 366.615.405,-. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan dermaga/pelabuhan untuk mobilitas orang dan barang sebanyak 2 unit yaitu dermaga Desa Mantang Besar, RT.04 dan RT.01
- (5) Pengadaan Sarana Transportasi Laut dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.196.400.000,-. Dan realisasi sebesar Rp.195.220.000,- output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan life jacket sebanyak 1010 buah. Hasilnya adalah tersedianya fasilitas keselamatan pelayaran/transportasi angkutan laut (pompong) bagi masyarakat/rakyat.

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

3) Program Peningkatan Perencanaan Teknis dan Kebijakan Bidang Perhubungan

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan penyusunan Draf Rencana Strategis Dinas Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.42.727.400,- dan realisasi sebesar Rp. 40.450.000,-. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan penyusunan Draf Rencana Strategis Dinas Perhubungan sebanyak 1 dokumen, hasilnya adalah tersedianya dokumen Rencana Kerja. Untuk pedoman pelaksanaan kegiatan penganggaran pada Dinas Perhubungan
- (2) Kegiatan penyusunan DED Taman Edukasi Keselamatan lalu Lintas, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar dengan dana masukan Rp.56.250.000,- Kegiatan ini dimaksudkan agar tersedinya data perencanaan pembangunan taman edukasi keselamatan lalu lintas yang efisien dan efektif, dengan target capaian kegiatan 100%, sedangkan realisasi keuangan kegiatan ini adalah Rp.53.665.000,-. Capaian persentase kegiatan 100%.

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Peningkatan Perencanaan Teknis dan Kebijakan Bidang Perhubungan tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

4) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

a. Pelaksanaan Program

- (1) Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.378.934.000,- realisasi sebesar Rp.1.362.434.563,-. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pekerjaan marka jalan sepanjang 26.500 M' dan marka parkir sepanjang 3000 M', 100 bh rambu lalin (rambu himbauan), pemasangan 20 bh rambu petunjuk, 100 buah water barrier (pembatas jalan). Hasil dari kegiatan ini adalah untuk memberi petunjuk yang jelas terhadap pengendara lalu lintas, sehingga meningkatkan kenyamanan pengguna jalan dan dapat menurunkan angka kecelakaan lalu lintas.
- (2) Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan fasilitas lalu lintas dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.235.700.000,- dan realisasi sebesar Rp 229.335.000,-. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pekerjaan pemasangan 8 Unit APILL, 26 Unit Warning Light dan 100 buah Rambu dan 100 buah delineator. Hasil dari kegiatan ini adalah pemeliharaan fasilitas keselamatan lalu lintas (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) agar dapat berfungsi dengan baik sehingga bermanfaat bagi keselamatan pengguna jalan.
- (3) Kegiatan Pengamanan lalu lintas dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.169.200.000,- dan realisasi sebesar Rp.168.839.950,-. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pengamanan kelancaran dan ketertiban lalu lintas sebanyak 200 kali dalam 1 tahun. Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pengamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas dalam perayaan hari-hari besar keagamaan, kegiatan even-even internasional maupun nasional.

- (4) Kegiatan Pengadaan dan pemasangan fasilitas lalu lintas jalan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.219.95.000,- dan realisasi sebesar Rp.214.422.290,-. Output kegiatan ini adalah pemasangan 4 unit warning light. Hasil dari kegiatan ini adalah untuk memberikan peringatan bagi pengemudi kendaraan untuk berhati-hati/mengurangi kecepatan kendaraan karena kondisi jalan rawan kecelakaan sehingga tercapai penurunan/berkurangnya kecelakaan lalu lintas.
- (5) Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan (DAK) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.462.847.000,- dan realisasi sebesar Rp.460.576.616,-. Output dari kegiatan ini meliputi Pengadaan rambu-rambu lalu lintas sebanyak 230 buah, pengadaan dan pemasangan pita penggaduh 300 M2 dan pengadaan dan pemasangan delineator sebanyak 180 buah. Hasil dari kegiatan adalah untuk memberi petunjuk/peringatan atau himbauan bagi pengguna jalan (pengemudi) sehingga meningkatkan kenyamanan pengguna jalan dan dapat menurunkan angka kecelakaan lalu lintas.

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Program dan Pengamanan Lalu Lintas tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

5) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pos dan Telekomunikasi

a. Pelaksanaan Program

Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Bidang Postel, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.74.400.000,- dan realisasi sebesar Rp.73.643.625,-. Output dari kegiatan adalah untuk meningkatkan ketertiban, ketaatan dalam melaksanakan ketentuan-

ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan tentang penyelenggaraan pos telekomunikasi dan informatika serta pengendalian dan pengawasan tower telekomunikasi.

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pos dan Telekomunikasi tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

4.1.7. Urusan Komunikasi dan Informatika

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Keempat** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk urusan Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut : Jumlah jaringan komunikasi **6 Provider**; Jumlah surat kabar nasional/lokal **18/120 Jenis**; Jumlah penyiaran radio/TV lokal/nasional **5/5/10 Jenis**; Web site milik pemerintah daerah **21 Situs**; Rasio wartel/warnet terhadap 10.000 penduduk **1,2**;

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Dan Keprotokolan

a. Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Sandi dan Telekomunikasi (Santel) dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp. 45.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 43.767.400,- atau 97,265%. Dengan hasil Tersedianya informasi berupa sandi-sandi.
- (2) Kegiatan Peningkatan kualitas dan kuantitas materi komunikasi dan informasi dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran

Rp.4.071.400.000,- dan realisasi sebesar Rp.3.852.949.255,- atau 94,63%. Dengan hasil Tersedianya Media dan sarana Informasi melalui Publikasi media masa cetak media masa elektronik.

- (3) Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Bintang Radio dilaksanakan oleh Bagian Humas an Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Bintang dengan alokasi anggaran Rp. 562.784.200,- dan realisasi sebesar Rp. 557.450.026,- atau 99,05%. Dengan hasil Terwujudnya Sarana Informasi Bagi Masyarakat Kabupaten Bintang melalui Bintang Radio.
- (4) Kegiatan Pelayanan Pengembangan dan Pemeliharaan Website dilaksanakan oleh Bagian Humas an Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Bintang dengan alokasi anggaran Rp.130.432.700,- dan realisasi sebesar Rp.129.993.300,- atau 99,66%. Dengan hasil Terpenuhinya Kebutuhan Informasi Melalui website Pemerintah Kabupaten Bintang.
- (5) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pembentukan PPID Kabupaten Bintang dilaksanakan oleh Bagian Humas an Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Bintang dengan alokasi anggaran Rp.46.783.100,- dan realisasi sebesar Rp. 46.204.375,- atau 98,76%. Dengan hasil Tersedianya Terwujudnya Informasi dan Dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Sehubungan dengan defisit anggaran media maka memberikan dampak kurangnya amino media massa terhadap publikasi/penertiban galeri foto untuk dicetak, sehingga rutinitas terhadap penertiban jumlah eksemplar koran berkurang dan jumlah koran yang dibayar menjadi berkurang berdasarkan koran yang diantar.
- b. Belum adanya Gedung /Tempat sendiri untuk Bintang Radio, listrik dan crew

- c. Belum lengkapnya data dari masing-masing SKPD dalam pelaksanaan PPID
- d. Belum lengkapnya data masing-masing bagian di Setda Bintan dalam melengkapi website di Kabupaten Bintan.

2) Solusi

- a. Mengoptimalkan kembali anggaran publikasi agar amino media massa terhadap publikasi/penertiban galeri foto serta koran dapat berjalan secara rutinitas.
- b. Perlu peningkatan informasi data pada website Pemerintah Kabupaten Bintan dengan mengembangkan website menjadi lebih besar sehingga data informasi yang ada di Kabupaten Bintan dapat tercover semua kedalam website Bintan.

4.1.8. Urusan Pertanahan

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Kedua** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk urusan Pertanahan adalah sebagai berikut : Penyelesaian izin lokasi **100 %**.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Sertifikasi Aset Lahan Pemda dilaksanakan oleh Bagian Agraria Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.27.750.000,- dan realisasi sebesar Rp.27.747.290,- atau 99,99%. Dengan hasil adanya Jaminan Kepastian Hukum Terhadap Aset-aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bintan Kabupaten Bintan.

- (2) Kegiatan Rapat dan Koordinasi Pertanahan Dalam dan Luar Daerah dilaksanakan oleh Bagian Agraria Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.207.500.000,- dan realisasi sebesar Rp.207.110.430,- atau 99,81%. Dengan hasil Terjalinnya Koordinasi antar SDKP maupun Instansi vertikal yang berkaitan dengan Pertanahan Daerah maupun Nasional.
- (3) Fasilitasi dan Mediasi Sengketa Pertanahan Warga dan Pemerintah Kabupaten Bintan dilaksanakan oleh Bagian Agraria Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.255.500.000,- dan realisasi sebesar Rp.237.814.600,- atau 93,08%. Dengan harapan terselesaikannya Sengketa Pertanahan Warga dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan sehingga hasil yang didapatkan berkurangnya Masalah Sengketa Pertanahan.
- (4) Kegiatan Pemetaan aset tanah milik pemerintah Kabupaten Bintan dilaksanakan oleh Bagian Agraria Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.230.232.500,- dan realisasi sebesar Rp.225.236.720,- atau 97,83%. Dengan hasil Memberikan Jaminan dan Informasi Terhadap Aset-aset Lahan Milik Pemerintah.
- (5) Kegiatan Pengadaan lahan untuk lanjutan pembangunan Bandar Udara Kec. Tambelan dilaksanakan oleh Bagian Agraria Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.40.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.39.851.805,- atau 99,63%. Dengan hasil Tersedianya Lahan untuk Lanjutan Pembangunan Bandara Kecamatan Tambelan.
- (6) Kegiatan Pengadaan lahan untuk lanjutan pembangunan Masjid Besar Kecamatan Mantang dilaksanakan oleh Bagian Agraria Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.407.570.000,- dan realisasi sebesar Rp.307.525.475,- atau 75,45%. Dengan hasil Tersedianya lahan untuk pembangunan Masjid Besar Kecamatan Mantang.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Kegiatan Sertifikasi Aset Lahan Pemda tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan dikarenakan beberapa item dan rencana sertifikasi lahan yang diajukan sebelumnya termasuk dalam kawasan hutan sehingga arahan dari BPN dan Kanwil kehutanan untuk menunda.
- b. Untuk permasalahan resettlement busung dan pengudang masih dalam proses ditahap pendataan lahan dan permintaan perubahan lokasi lahan kepada perusahaan.
- c. Penyelesaian tanah untuk RSUD dan LAM milik PT. ANTAM telah diselesaikan dengan ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai lahan.
- d. Untuk Kegiatan Pengadaan lahan untuk lanjutan pembangunan Bandar Udara Kec. Tambelan hanya dapat dilaksanakan hanya sampai pembuatan dokumen perencanaan dikarenakan keuangan daerah dalam keadaan.

2) Solusi

- a. Mengintensifkan kegiatan inventarisasi lahan oleh Tim Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah khusus pada kawasan hutan.
- b. Harus ada etikat yang baik dari perusahaan untuk mengakomodir permohonan masyarakat terhadap perubahan letak/ lokasi resettlement desa pengudang yang semula berada didarat diarahkan ke lokasi berdekatan dengan lokasi pantai/ pesisir.

4.1.9. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Kesatu** terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bintan untuk urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut : Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP **6 Kegiatan**; Kegiatan pembinaan politik daerah **2 Kegiatan**.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) Program Pembinaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

a. Pelaksanaan Program

- (1) Penyuluhan Pencegahan Peredaran Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.76.395.000,- dan realisasi sebesar Rp.51.426.340 atau 67,32%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Dalam sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang telah dilaksanakan di Kecamatan Bintan Timur dan Kecamatan Teluk Bintan yang diikuti oleh 150 orang pelajar agar pelajar sadar akan bahaya penggunaan narkoba. Hingga Tahun 2015 telah diberikan penyuluhan sebanyak 600 orang, dengan perincian Tahun 2012 sebanyak 150 orang pelajar, Tahun 2013 sebanyak 150 orang pelajar, dan Tahun 2014 sebanyak 150 orang pelajar.
- (2) Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.72.490.000,- dan realisasi sebesar Rp.71.354.250 atau 98,43%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat koordinasi forum pembauran kebangsaan, sedangkan hasil kegiatan adalah terbentuknya rapat forum pembauran kebangsaan. Rapat dilakukan sebanyak 2 kali dengan jumlah peserta sebanyak 44 orang yang terdiri dari pemuka adat, suku dan etnis, yang selanjutnya diharapkan tercapainya

kerukunan antar pemuka masyarakat, suku dan etnis di Kabupaten Bintan.

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan program Pembinaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan program dapat berjalan sesuai rencana.

2) Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Pelaksanaan Program

- (1) Verifikasi dan seleksi administrasi partai politik, Dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.48.290.000,- dan realisasi sebesar Rp.48.278.720 atau 99,98%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya verifikasi dan seleksi administrasi bantuan keuangan partai politik, sedangkan hasil kegiatan adalah terwujudnya pemberian bantuan kepada partai politik di Kabupaten Bintan. Pemberian bantuan keuangan kepada kepada 8 (Delapan) Partai Politik (Parpol) yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Bintan. Tujuan dari pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ini adalah sebagai sarana pembinaan politik dari Pemerintah berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Partai Politik. Pada Tahun Anggaran 2015, Parpol yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan, adalah :

Tabel 4.31 : Daftar Partai dan Jumlah Kursi di DPRD Kabupaten Bintan
Periode 2015 – 2019

No.	Nama Partai	Jumlah Kursi
1.	Partai Golongan Karya	6 (Enam)
2.	Partai Demokrat	6 (Enam)
3.	Partai Keadilan Sejahtera	3 (Tiga)
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3 (Tiga)
5.	Partai Amanat Nasional	3 (Tiga)
6.	Partai Hati Nurani Rakyat	2 (Dua)
7.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1 (Satu)
8.	Partai Nasdem	1 (Satu)
Jumlah Kursi		25 (Dua Puluh Lima)

Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Bintan dan KPUD Kabupaten Bintan

- (2) Koordinasi dan Pemantauan Kegiatan orang Asing, NGO dan Lembaga Masyarakat Dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 87.656.800,- dan realisasi sebesar Rp 72.306.600 atau 94,56%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terjalinnya koordinasi kerjasama lintas sektoral, sedangkan hasil kegiatan adalah terpantaunya kegiatan orang asing di daerah. Rapat-rapat Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing dan Lembaga Asing (NGO) sebanyak 3 kali sehingga terwujudnya koordinasi lintas sektoral yang melibatkan instansi vertikal lainnya seperti Imigrasi, TNI, POLRI, Kejaksaan dan dinas terkait lainnya dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing, lembaga asing, NGO yang melakukan penelitian maupun bekerjasama dengan organisasi lokal/perorangan di wilayah Kabupaten Bintan.
- (3) Koordinasi Forum Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 212.810.000,- dan realisasi sebesar Rp 201.226.285 atau 94,56%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat koordinasi Tim Kominda Kabupaten bintan sebanyak 4 kali, sedangkan hasil kegiatan adalah terselenggaranya kegiatan intelijen secara terpadu dan temu tim kominda di daerah Kabupaten Bintan. Tim Kominda terdiri dari Bupati Bintan, unsur intelijen dari Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Kepala Bakesbangpol, BINDA, TNI, Kejari, Imigrasi, Bea Cukai, Pajak, dan Perbankan di Kabupaten Bintan.

- (4) Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Bintan, Dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 120.563.350,- dan realisasi sebesar Rp 118.905.405 atau 98,62%. Keluaran dan hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan manajemen lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat di Kabupaten Bintan, dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang.
- (5) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bintan, Dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.370.944.290,- dan realisasi sebesar Rp.356.732.200 atau 96,17%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat koordinasi antar perangkat daerah dan monitoring pilkada Kabupaten Bintan, sedangkan hasil kegiatan adalah tercapainya aparatur yang harmonis dan sinergi dalam pelaksanaan pilkada daerah. Kegiatan ini menggunakan metode rapat dan koordinasi sebanyak 3 kali dengan 60 orang peserta sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 9 Tahun 2005 tentang pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Hasil rekapitulasi pemilihan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau

- **Data Pemilih**

DPT	=	96.933
DPTB-1	=	0
DPPH	=	371
DPTB-2	=	2.499

Jumlah Pemilih	=	99.803
• Data Pengguna Hak Pilih		
DPT	=	69.969
DPTB-1	=	0
DPPH	=	369
DPTB-2	=	2.499
Jumlah Pemilih	=	72.837
• Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		
Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	=	70.109
Jumlah Suara Tidak Sah	=	2.728
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	=	72.837
• Jumlah Pemilih Disabilitas/Penyandang Cacat		
Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat	=	75
Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih	=	70
• Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon		
Drs. H. Muhammad Sani		
Dr. Nurdin Basirun S.Sos,M.Si	=	23.308
Dr. H. M. Soerya Respationo, SH. MH		
H. Ansar Ahmad, SE. MM	=	46.801
Jumlah Suara Sah Calon	=	70.109

Hasil rekapitulasi pemilihan suara Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Bintan

• Data Pemilih		
DPT	=	96.933
DPTB-1	=	0
DPPH	=	360
DPTB-2	=	2.494
Jumlah Pemilih	=	99.787
• Data Pengguna Hak Pilih		
DPT	=	69.969
DPTB-1	=	0
DPPH	=	359
DPTB-2	=	2.494
Jumlah Pemilih	=	72.822
• Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		
Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	=	70.701
Jumlah Suara Tidak Sah	=	2.121
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	=	72.822
• Jumlah Pemilih Disabilitas/Penyandang Cacat		
Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat	=	71
Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang	=	66

menggunakan hak pilih

• **Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon**

H. Apri Sujadi, S.Sos	=	40.623
H. Dalmasri, M.M		
Drs. H. Khazalik	=	30.078
Indra Setiawan, S.ST		
Jumlah Suara Sah Calon	=	70.701

- (6) Sosialisasi Peraturan terkait Aktivitas tentang Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing, Dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.73.715.000,- dan realisasi sebesar Rp.71.903.698 atau 97,54%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi permendagri tentang pengawasan orang asing dan tindakan keimigrasian, sedangkan hasil kegiatan adalah tersosialisasikannya Permendagri 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian. Diharapkan keberadaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan perkembangan perekonomian daerah khususnya dan nasional pada umumnya sehingga perlu dipantau agar keberadaannya sesuai dengan tujuan dan sasaran untuk menjamin keamanan dan memberikan perlindungan tenaga kerja asing di daerah.
- (7) Pelaksanaan Monitoring/Pendataan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bintan, Dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.148.734.500,- dan realisasi sebesar Rp.113.627.550 atau 76,40%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya validasi organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Bintan, sedangkan hasil kegiatan adalah tercapainya jumlah organisasi kemasyarakatan yang valid di Kabupaten Bintan.
- ORMAS/LSM

Jumlah Ormas/LSM yang legal pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan sampai dengan 31 Desember 2015 adalah 60 buah.

- (8) Pembinaan Organisasi Kewanitaan di Kabupaten Bintan, Dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 99.588.350,- dan realisasi sebesar Rp 98.761.695 atau 99,17%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan organisasi kewanitaan di Kabupaten Bintan sedangkan hasil kegiatan adalah tercapainya pembinaan organisasi kewanitaan di Kabupaten Bintan kepada 100 orang peserta yang terdiri dari :

- PKK dan Dharma Wanita Kec. Bintan Utara 10 Orang
- PKK dan Dharma Wanita Kec. Seri Kuala Lobam 8 Orang
- PKK dan Dharma Wanita Kec. Teluk Sebong 10 Orang
- PKK dan Dharma Wanita Kec. Teluk Bintan 8 Orang
- PKK dan Dharma Wanita Kec. Toapaya 10 Orang
- PKK dan Dharma Wanita Kec. Gunung Kijan 10 Orang
- PKK dan Dharma Wanita Kec. Bintan Timur 10 Orang
- PKK dan Dharma Wanita Kec. Mantang 4 Orang
- PKK dan Dharma Wanita Kec. Bintan Pesisir 4 Orang
- PKK dan Dharma Wanita Kec. Tambelan 3 Orang
- Dharma Wanita Kesbangpol Bintan 5 Orang
- Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Bintan 8 Orang
- Dharma Wanita Kabupaten Bintan 5 Orang
- PKK Kabupaten Bintan 5 Orang

- (9) Sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.144.334.250,- dan realisasi sebesar Rp.109.603.763 atau 75,94%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi

masyarakat di Kabupaten Bintan, sedangkan hasil kegiatan adalah tercapainya sosialisasi undang-undang sebagai pembinaan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat di Kabupaten Bintan. Kegiatan ini diikuti 80 orang dan dilaksanakan selama 2 hari, agar peserta dapat mengetahui dengan jelas tentang materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Perubahan Hasil Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/TUU-XII/2014 Tanggal 23 Desember 2014.

- (10) Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, Dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.106.190.000,- dan realisasi sebesar Rp.87.268.050 atau 82,18%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat koordinasi antar aparatur di daerah Kabupaten Bintan, sedangkan hasil kegiatan adalah terwujudnya aparatur yang berkompetensi terhadap keamanan dalam negeri di Kabupaten Bintan. Kegiatan berupa rapat sebanyak 2 kali, dengan jumlah peserta 30 Orang terdiri dari Kepolisian, TNI, Kejari, BIN, BPN, BPBD, BPMPD, Disnaker, DKP, Distahut, Distam, Dinas Kop UKM, Disperindag, Dinsos, Satpol PP, Kemenag, Bagian Kesra, Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan.
- (11) Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial Kabupaten Bintan, Dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.147.393.000,- dan realisasi sebesar Rp.83.902.400 atau 56,92%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat koordinasi dan temu tim satgas di daerah Kabupaten Bintan, sedangkan hasil kegiatan adalah terbentuknya tim satgas penyelesaian konflik sosial di daerah Kabupaten Bintan. Kegiatan Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial

Kabupaten Bintan dilakukan dengan menggunakan metode rapat dan koordinasi sebanyak 25 orang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012.

(12) Fasilitas Penanganan Event - Event Kabupaten Bintan, Dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.400.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.338.943.550 atau 84,74%. Kegiatan ini merupakan realisasi kerjasama antar Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Kepolisian Resort Bintan dalam menangani/melakukan pengamanan terhadap beberapa event yang terselenggara di wilayah hukum Kabupaten Bintan selama Tahun Anggaran 2015. Dari jumlah dana yang terealisasi pada kegiatan Fasilitas Penanganan Event-Event Kabupaten Bintan Tahun anggaran 2015 diperumtukkan pada hal-hal sebagai berikut sesuai dengan indikator pada dokumen pelaksanaan anggaran yaitu :

- Keluaran program terlaksananya penanganan pengamanan event-event (Event Hari Raya Idul Fitri, event Hari Raya Idul Adha, Event Perayaan Hari Raya Natal dan Event Perayaan Tahun Baru 2016) di wilayah Kabupaten Bintan.
- Hasil yang dicapai dalam kegiatan adalah tersedianya aparat pengamanan sebagai Tenaga Pendukung untuk masing-masing event berikut ini :
 - Event Hari Raya Idul Fitri 2015 sebanyak 150 Orang
 - Event Hari Raya Idul Adha 2015 sebanyak 150 Orang
 - Event Hari Raya Natal 2015 sebanyak 150 Orang
 - Event Hari Perayaan Tahun Baru 2016 sebanyak 150 Orang
- Dari hasil terfasilitasinya tenaga pengamanan pada 4 (empat) event diatas telah dibayarkan uang honorarium (uang saku harian) sebesar Rp.187.500.000,- dan uang transportasi sebesar Rp.187.500.000,- Total jumlah seluruhnya Rp.375.000.000,-

(13) Penghargaan Terhadap Pejuang Veteran Kabupaten Bintan, Dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 76.828.300,- dan realisasi sebesar Rp 65.275.670 atau 84,96%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan PVRI Kabupaten Bintan Tahun 2015. Hasil kegiatan ini adalah terfasilitasinya kegiatan PVRI Kabupaten Bintan Tahun 2015. Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Bintan dalam bentuk uang santunan dengan harapan dapat meringankan beban hidup atau kebutuhan hidup para veteran yang berjumlah 20 orang. Terdiri dari 8 (delapan) orang veteran dan 12 (dua belas) orang janda veteran yang ditinggalkan karena veteran meninggal dunia. Penghargaan bantuan ini diberikan pada momen acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus dan Hari Pahlawan tanggal 10 November.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Belum terdatanya tenaga kerja asing di wilayah Kabupaten Bintan, secara terpadu yang mana izin menetap orang asing dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah (IMTA = izin mempekerjakan orang asing) dan tidak/belum mengirimkan data/tembusan tersebut ke Dinas Tenaga Kerja
- b. Adanya Kunjungan Orang Asing yang masuk melalui pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang, sementara yang menjadi permasalahan adalah pihak Imigrasi Kabupaten Bintan tidak mengetahui Orang Asing tersebut melakukan kegiatan wisata bahkan menetap di Wilayah Kabupaten Bintan, Selanjutnya untuk pendataan merupakan Ranah Keimigrasian Tanjungpinang.
- c. Penggunaan dana bantuan partai politik yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan ternyata tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2013 tentang

perubahan atas Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 tentang pedoman tata cara penghitungan penganggaran dalam APBD, penyaluran dan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.

- d. Kualitas dan kuantitas aparatur relatif masih rendah
- e. Masih kurangnya sarana dan prasarana pada Badan Kesbangpol
- f. Masih kurangnya tingkat partisipasi politik masyarakat
- g. Luasnya wilayah Kabupaten Bintan, perlu adanya rapat koordinasi setiap bulan untuk membahas permasalahan yang ada.

2) Solusi

- a. Dalam rangka meningkatkan Sistem Pengawasan Orang Asing, NGO di Wilayah Kabupaten Bintan, maka tim perlu mengadakan Kunjungan Kerja (Study banding) ke Wilayah lain, guna meningkatkan Sistem Pengawasan di wilayah Kabupaten Bintan agar sesuai dengan Permendagri Nomor 31 Tahun 1994.
- b. Badan Kesbangpol dan DPPKD Kabupaten Bintan telah meneruskan dan menginformasikan tentang temuan hasil pemeriksaan BPK RI kepada seluruh partai politik penerima bantuan keuangan dari APBD dengan harapan agar temuan-temuan tersebut dapat ditindak lanjuti.
- c. Perlu adanya workshop/seminar tentang pendidikan politik pemilih/masyarakat
- d. Badan Kesbangpol Kabupaten Bintan akan mengadakan Bimtek Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik melalui anggaran Tahun 2016
- e. Perlu tambahan anggaran dan melibatkan Forum yang ada di Badan Kesbangpol.

3) Program Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama

a. Pelaksanaan Program

- (1) Sarasehan kerukunan antar umat beragama, Dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 83.920.000,- dan realisasi sebesar Rp. 80.725.200 atau 96,19%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya dialog antar tokoh-tokoh agama Kabupaten Bintan dengan hasil tercapainya pemberdayaan kerukunan antar tokoh-tokoh umat beragama dengan sasaran dialog antar tokoh/pemuka-pemuka agama dengan dasar Peraturan Menteri Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 dengan satu pemahaman yang sama atau satu persepsi yang sama di wilayah Kabupaten Bintan. Ruang lingkup kegiatan sarasehan kerukunan antar umat beragama dari 10 (Sepuluh) Kecamatan Se-Kabupaten Bintan.
- (2) Pembentukan dan Pengukuhan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bintan, Dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.93.740.000,- dan realisasi sebesar Rp.93.447.900 atau 99,69%. Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Antar Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Dengan demikian untuk mengimplementasikan PBM dimaksud Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan melaksanakan kegiatan Pembentukan dan Pengukuhan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bintan Tahun 2015. Keluaran dari kegiatan adalah terlaksananya pembentukan dan pengukuhan forum kerukunan umat beragama

(FKUB) Kabupaten Bintan. Dengan hasil terbentuknya forum kerukunan umat beragama dari utusan masing-masing agama yaitu Agama Islam, Agama Protestan, Agama Katolik, Agama Hindu, Agama Budha dan Agama Kong Hu Cu di wilayah Kabupaten Bintan.

Berikut adalah jumlah rumah ibadah yang terdapat di Kabupaten Bintan :

* Mesjid	167	Buah
* Mushalla	175	Buah
* Gereja	16	Buah
* Gereja Katedral	11	Buah
* Pura	1	Buah
* Vihara	6	Buah
* Cetiya	12	Buah
* Klenteng	12	Buah

Beberapa kasus terkait keberadaan aliran kepercayaan dan penggunaan rumah ibadah yang diselesaikan oleh FKUB Kabupaten Bintan :

No.	PERMASALAHAN	SOLUSI	KETERANGAN
1.	Adanya Aliran Ahmadiyah di Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya dan Desa numbing Kecamatan Bintan Pesisir.	Diselesaikan dengan musyawarah dan pembinaan kepada Jamaat Ahmadiyah	Situasi kondusif atas peran tokoh agama dibawah wadah Forum Kerukunan antar Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bintan dan Pemerintah Kabupaten Bintan
2.	Telah berubahnya fungsi rumah tempat tinggal menjadi rumah tempat ibadah di Bintan Utara	Diselesaikan dengan musyawarah dan pemilik rumah berjanji tidak menjadikan rumah tinggal tersebut menjadi tempat ibadah	Situasi kondusif atas peran tokoh agama dibawah wadah Forum Kerukunan antar Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bintan dan Pemerintah Kabupaten Bintan

- (3) Rapat koordinasi forum kerukunan kewaspadaan dini masyarakat (FKDM), Dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Bintan

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 68.740.260,- dan realisasi sebesar Rp 60.899.322 atau 88,59%. Keluaran dan Hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Rapat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Bintan. Tujuan kegiatan dimaksud kewaspadaan dini masyarakat guna menjaga kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tahun Anggaran 2015 diikuti oleh 30 (Tiga puluh) orang peserta dari 10 kecamatan Kabupaten Bintan yaitu :

1. Kecamatan Bintan Utara	: 4 Orang
2. Kecamatan Seri Kuala Lobam	: 4 Orang
3. Kecamatan Teluk Sebong	: 4 Orang
4. Kecamatan Teluk Bintan	: 4 Orang
5. Kecamatan Toapaya	: 3 Orang
6. Kecamatan Gunung Kijang	: 4 Orang
7. Kecamatan Bintan Timur	: 4 Orang
8. Kecamatan Bintan Pesisir	: 1 Orang
9. Kecamatan Mantang	: 1 Orang
10. Kecamatan Tambelan	: 1 Orang
Jumlah	30 Orang

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Belum terbentuknya FKDM di Kecamatan sesuai dengan Permendagri No. 12 Tahun 2006. Hal ini dikarenakan belum dianggarkan oleh Forum FKDM tersebut.
- b. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara pendirian rumah ibadah.

2) Solusi

- a. Untuk Tahun 2016 direncanakan akan dibentuk FKDM Kecamatan.
- b. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

- c. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat.

4.1.10. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Keempat** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian, dan Persandian adalah sebagai berikut : Pertumbuhan PDRB (LPE) **6,48 %**; Laju inflasi **2,46%**; PDRB per kapita 13,5 Juta; Persentase penduduk di atas garis kemiskinan **90%**; Angka kriminalitas yang tertangani **15,98**; Jenis dan jumlah bank dan cabang : Bank Pemerintah **25 Unit**; Bank Umum Swasta **32 Unit**; Bank Pembangunan Daerah (BPD) **4 Unit**; Bank Perkreditan Rakyat (BPR) **6 Unit**; Jenis, kelas, dan jumlah restoran **154 Unit***; Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel **15 Unit**; Persentase demonstrasi legal **100%**; Jumlah objek pajak dan retribusi daerah **11/25 Objek**; Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha **13 Perda**; Lama Proses Perizinan 3-14 Hari; Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan **Rp.493.807,84***; Rasio tempat ibadah per 10.000 penduduk **28,19**; Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik **100%**; Sistem Informasi Manajemen Pemda **10 Sistem**; Persentase unit pelayanan pemerintahan (Kecamatan/Desa yang memiliki komputer dan bisa mengakses internet melalui komputer **90%**; Pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan pemerintahan **YA**; Rata-rata kelompok binaan LPM 51 Kelompok ; Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK **1,9**; Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk **12,87**; Rasio Linmas per 10.000 penduduk **296,15**; Rasio Poskamling per desa/kelurahan **4,49.**; Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten **4.188** Orang; Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota **725%**; Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten 100%.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

4.1.10.1. Otonomi Daerah

1. Kecamatan Bintang Pesisir

1) Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Kegiatan Fasilitasi Musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan/kecamatan dilaksanakan oleh Kecamatan Bintang Pesisir dengan alokasi anggaran Rp.35,000,000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.34,882,300 atau 99,00%. Hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksananya usulan rencana pembangunan dari tingkat desa/kelurahan/kecamatan.

2) Program Penataan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat

- (1) Kegiatan Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dilaksanakan oleh Kecamatan Bintang Pesisir dengan alokasi anggaran Rp.80,520,000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.79,722,475,- atau 99% Hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembinaan RT/RW se- Kecamatan Bintang Pesisir kepada 64 orang.
- (2) Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Keagamaan Tk.Kecamatan dilaksanakan oleh Kecamatan Bintang Pesisir dengan alokasi anggaran Rp.143.076,370,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.142,269,300,- atau 99,00% Hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pembinaan qori dan qoriah se- Kecamatan Bintang Pesisir sebanyak 70 orang.
- (3) Kegiatan Pembinaan Olah Raga dan Seni di Kecamatan dilaksanakan oleh Kecamatan Bintang Pesisir dengan alokasi anggaran Rp.78,414,557,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.74,831,570,- 98,00%. Hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembinaan Sanggar Seni, LASQI dan Tim Olah Raga kepada 1 sanggar/ 1 tim LASQI/1 Tim Olah Raga.
- (4) Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita Pedesaan/Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan Bintang Pesisir dengan alokasi anggaran Rp.105.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.103,622,300 atau 99,00%. Hasil dari kegiatan ini adalah

Terlaksananya Pembinaan Kelompok PKK, Posyandu dan organisasi wanita lainnya selama 1 tahun dengan jumlah 50 orang

3) Permasalahan Dan Solusi

1) Permasalahan

- a. adanya 2 kelompok majelis taklim yang digabungkan dikarenakan banyaknya anggota majelis taklim yang tidak aktif lagi mengikuti kegiatan pertemuan,-
- b. adanya beberapa atlit yang pindah domisili dan atlit yang tidak aktif lagi mengikuti kegiatan olah raga dikarenakan penambahan usia maupun kesibukan bekerja,-
- c. terdapat kelompok LASQI yang tidak aktif lagi (sudah bubar) dikarenakan kekurangan anggota dan belum mendapatkan anggota pengganti.

2) Solusi

- d. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah Kecamatan untuk secara intensif melakukan pendekatan terhadap para anggota majelis taklim yang tidak aktif agar meluangkan waktunya dengan menyeimbangkan antara kegiatan pribadi dan kegiatan di majelis taklim
- e. Mengusahakan agar para atlit yang tidak aktif lagi namun masih berdomisili di wilayah Kecamatan Bintan Pesisir untuk menjadi pelatih ataupun bergabung dalam tim penjaringan bagi para remaja yang memiliki bakat dalam olah raga sehingga ada regenerasi.
- f. Begitupun untuk penjaringan anggota LASQI, diharapkan ada kerjasama yang baik antara pemerintah maupun masyarakat untuk terus melakukan pertemuan dan latihan secara teratur dan menjaring anggota baru yang memiliki bakat dalam Bidang seni LASQI.
- g. Mengadakan kegiatan seperti lomba tarik suara anggota PKK demi meningkatkan silaturahmi antar anggota.

2. Kecamatan Bintan Timur

1) Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Kegiatan Fasilitasi Musyawarah perencanaan pembangunan desa/ kelurahan/kecamatan dilaksanakan oleh Kecamatan Bintan Timur dengan alokasi anggaran Rp.40.364.300,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.40.175.050,- atau 99,53%. Hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksananya usulan rencana pembangunan dari tingkat desa/ kelurahan/ kecamatan. Musrenbang dilaksanakan dengan dihadiri 300 peserta terdiri dari perangkat kelurahan, kecamatan masyarakat dan pemuda

2) Program Penataan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat

- (1) Kegiatan Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dilaksanakan oleh Kecamatan Bintan Timur dengan alokasi anggaran Rp.52.200.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.52.125.895,- atau 99,86% Hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembinaan terhadap Organisasi Kepemudaan dan pembinaan masyarakat khususnya keterlibat pada kegiatan gotong royong di tingkat kelurahan antara lain pelaksanaan kegiatan peringatan HUT kemerdekaan RI ke 70. Prestasi yang diraih dari pembinaan masyarakat di Kecamatan Bintan Timur pada tahun 2015 adalah diraihnya Piala Adipura dari Presiden Republik Indonesia sebagai Kota Bersih Tahun 2015.
- (2) Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Keagamaan Tk. Kecamatan dilaksanakan oleh Kecamatan Bintan Timur dengan alokasi anggaran Rp.142.890.800,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 142.717.550,- atau 99,88% Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan qori dan qoriah sebanyak 11 orang; pembinaan Lasqi sebanyak 2 Kelompok dan Majelis Taklim sebanyak 42 kelompok se-Kecamatan Bintan Timur.

Prestasi yang diraih dari pembinaan Lasqi di Kecamatan Bintan Timur antara lain meraih Juara III Festival Seni Qasidah Tingkat Kabupaten Bintan Tahun 2015.

- (3) Kegiatan Pembinaan Olah Raga dan Seni di Kecamatan dilaksanakan oleh Kecamatan Bintan Timur dengan alokasi anggaran Rp. 50.051.800,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 49.970.300,- 98,84%. Hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembinaan Sanggar Seni sebanyak 9 kelompok dan pembinaan olahraga pada 3 cabang olahraga se-Kecamatan Bintan Timur.
- (4) Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita Pedesaan/Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan Bintan Timur dengan alokasi anggaran Rp.50.051.800,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.49.970.300 atau 98,35%. Hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembinaan kepada kelompok Dasawisma sebanyak 4 kelompok di Kecamatan Bintan Timur
- (5) Kegiatan Pelayanan Administrasi Publik dan Kependudukan Satu Pintu dilaksanakan oleh Kecamatan Bintan Timur dengan alokasi anggaran Rp.36.250.000,- dan realisasi sebesar Rp.36.225.480,- atau 99,93%. Hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat terkait pengurusan data kependudukan yang dengan Tenaga Operator Pelayanan Satu sebanyak 6 orang dan jumlah penduduk yang terlayani sebanyak 99 orang.
- (6) Kegiatan Peningkatan kapasitas Kelurahan Sei Enam, dilaksanakan oleh Kecamatan Bintan Timur dengan alokasi anggaran Rp.160.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.154.789.404 atau 96,74%. Hasil dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya Kapasitas Kelurahan Sei Enam melalui peningkatan sarana dan prasarana Kelurahan Sei Enam.
- (7) Kegiatan Peningkatan kapasitas Kelurahan Sei Lekop, dilaksanakan oleh Kecamatan Bintan Timur dengan alokasi anggaran Rp.160.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.146.610.707,- atau

91.63%. Hasil dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya Kapasitas Kelurahan Sei Lekop melalui peningkatan sarana dan prasarana Kelurahan Sei Lekop.

- (8) Kegiatan Peningkatan kapasitas Kelurahan Kijang Kota, dilaksanakan oleh Kecamatan Bintan Timur dengan alokasi anggaran Rp.160.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.157.640.065,- atau 98.53%. Hasil dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya Kapasitas Kelurahan Kijang Kota melalui peningkatan sarana dan prasarana Kelurahan Kijang Kota.
- (9) Kegiatan Peningkatan kapasitas Kelurahan Gunung Lengkuas, dilaksanakan oleh Kecamatan Bintan Timur dengan alokasi anggaran Rp.160.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.148.520.146,- atau 92,83%. Hasil dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya Kapasitas Kelurahan Gunung Lengkuas melalui peningkatan sarana dan prasarana Kelurahan Gunung Lengkuas.

3) Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Penerapan Standar Pelayanan Minimal [SPM] dalam penyusunan anggaran belanja untuk pelaksanaan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal [SPM] yang telah ditetapkan belum optimal. Namun demikian dalam menetapkan target capaian kinerja program dan kegiatan, bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
- b. Peran serta masyarakat dalam pemerataan pembangunan serta perhatian tentang potensi dan keanekaragaman daerah;
- c. Kurangnya koordinasi, monitoring, evaluasi secara berkala terhadap pelaksana kegiatan.

2) Solusi

- d. Belanja disusun berpedoman pada peraturan perundangan undangan yang berlaku. Alokasi belanja diperuntukkan sesuai

- dengan kewenangan dan dipergunakan dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- e. penetapan alokasi anggaran belanja pada program dan kegiatan harus berdasarkan skala prioritas, dan memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran [output] yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya;
 - f. Peran serta masyarakat dalam proses perancangan pembangunan, agar masyarakat benar-benar tahu manfaat dari pembangunan tersebut;
 - g. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan;
 - h. Melakukan pembinaan secara berkesinambungan kepada organisasi, lembaga masyarakat yang ada di Kecamatan Bintan Timur.

1. Kecamatan Toapaya

1) Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Kegiatan Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa /Kelurahan/ Kecamatan dilaksanakan oleh Kecamatan Kecamatan Toapaya dengan alokasi anggaran Rp.31.500.000,- dan terealisasi dalam penggunaannya sebesar Rp.31.472.000,- atau 99,91%. hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksananya usulan rencana pembangunan dari tingkat Desa/Kelurahan/ Kecamatan.

2) Program Penataan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat

- (1) Kegiatan Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan; dilaksanakan oleh Kecamatan Toapaya dengan anggaran sebesar Rp.40.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.39.835.700,- atau 99,59% keluaran dari kegiatan adalah terlaksananya pembinaan kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kecamatan Toapaya yaitu seperti wisuda TPQ

yang dilaksanakan pada Tanggal 3 Juni 2015. Selain itu juga dapat dilihat dari acara silaturahmi antara pegawai dan staf Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Masyarakat Toapaya yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Kecamatan Taopaya pada Tanggal 6 Agustus 2015 sehingga terwujudnya hubungan pemerintah dan masyarakat.

- (2) Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita dilaksanakan dilaksanakan oleh Kecamatan Toapaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.40.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.39.766.200,- atau 99,42%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya berbagai kegiatan PKK seperti Jambore PKK tingkat Kabupaten di Pantai Trikora Kecamatan Gunung Kijang pada Tanggal 11 April 2015 dengan posisi sebagai juara umum. Mengikuti Cerdas Cermat PKK tingkat Kabupaten dan aktifnya ibu-ibu PKK Kecamatan Toapaya dalam Rapat Bulanan yang diadakan di Kantor Camat Toapaya setiap bulannya.
- (3) Kegiatan Pembinaan Keagamaan Kecamatan Toapaya dilaksanakan oleh Kecamatan Toapaya dengan anggaran sebesar Rp.130.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.129.446.600,- atau 99,57% keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan STQ Tingkat Kabupaten Bintan 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 21 s/d 26 Maret 2015 bertempat di Uban Kecamatan Bintan Utara; Kegiatan Santri TPQ tanggal 3 Juni 2015 di Masjid Besar Alfalah Kecamatan Toapaya. Munakahad anak-anak TPQ Kecamatan Toapaya yang diadakan di Aula Kantor Camat Toapaya selama 2 hari 14 s/d 15 Maret 2015
- (4) Kegiatan Pembinaan Olahraga dan Seni di Kecamatan; dilaksanakan oleh Kecamatan Toapaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.63.580.000,- dan realisasi sebesar Rp.63.268.500,- atau 99,51% keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Kegiatan Festival Tari Tingkat Kabupaten Bintan yang dilaksanakan tanggal 7 s/d 9 Pebruari 2015 bertempat di Lapangan Relif Antam Kijang Kecamatan

Bintan Timur; Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) tingkat Kabupaten Bintan yang dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 18 Mei 2015.

- (5) Kegiatan Peningkatan kapasitas Kelurahan Toapaya Asri, dilaksanakan oleh Kecamatan Toapaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.160.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 159.487.800 atau 99,68% Hasil dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya Kapasitas Kelurahan Toapaya Asri melalui peningkatan sarana dan prasarana Kelurahan Toapaya Asri.

3) Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi adalah terbatasnya anggaran yang dimiliki dalam melaksanakan setiap Program dan Kegiatan yang ada di Kecamatan Toapaya.

2) Solusi

Penyesuaian anggaran dalam menunjang sarana dan prasarana kantor Camat Toapaya serta Program dan kegiatan Pembinaan Masyarakat kecamatan.

2. Kecamatan Gunung Kijang

1) Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Kegiatan Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/Kecamatan dilaksanakan oleh Kecamatan Kecamatan Gunung Kijang dengan alokasi anggaran Rp.30.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.29.693.300,- atau 99,11%. hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksananya usulan rencana pembangunan dari tingkat desa/kelurahan/ kecamatan.

2) Program Penataan Hubungan Masyarakat dan Pemerintah

- (1) Kegiatan Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dilaksanakan oleh Kecamatan Gunung Kijang dengan alokasi

anggaran Rp.100.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.99.024.300,- atau 99,02%. Terlaksananya Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan Gunung Kijang.

- (2) Kegiatan Pembinaan Keagamaan di Kecamatan Gunung Kijang dilaksanakan oleh Kecamatan Gunung Kijang dengan alokasi anggaran Rp.231.000.000,-. Dan realisasi sebesar Rp.228.900.300,- atau 99,20 %. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan pelaksanaan keagamaan pada masyarakat di Kecamatan melalui pembinaan qori dan qoriah dalam penyelenggaraan STQ, PHBI, LASQI, keagamaan lainnya di Kecamatan Gunung Kijang.
- (3) Kegiatan Pembinaan Olahraga dan Seni dilaksanakan oleh Kecamatan Gunung Kijang dengan alokasi anggaran Rp.170.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.167.820.300,- atau 98,71%. Hasil dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya pembinaan kemasyarakatan dalam bidang olah raga dan seni di Kecamatan Gunung Kijang sehingga meningkatkan prestasi atlit olahraga dan pelaku seni di Kecamatan Gunung Kijang.
- (4) Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita, dilaksanakan oleh Kecamatan Gunung Kijang dengan alokasi anggaran Rp.97.239.000,- dan realisasi sebesar Rp.95.787.300,- atau 97,93%. Hasil dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya kegiatan PKK, organisasi kewanitaan dan remaja di Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan sehingga meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan organisasi-organisasi wanita yang ada di kecamatan.

3) Permasalahan Dan Solusi

Belum terealisasinya seluruh usulan yang terangkum dalam musyawarah perencanaan pembangunan tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah solusinya adalah diusulkan kembali pada tahun yang akan datang, baik melalui anggaran rutin pemerintah

daerah maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya seperti PNPM Perdesaan atau P3DK.

3. Kecamatan Teluk Bintan

1) Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan

- (1) Kegiatan Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa / Kelurahan / Kecamatan dilaksanakan oleh Kecamatan Kecamatan Teluk Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.49.303.612 atau 98.61%. kegiatan terlaksana dengan baik dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, perangkat desa dan masyarakat.

2) Program Penataan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat

- (1) Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita Pedesaan/Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan Kecamatan Teluk Bintan dengan alokasi anggaran Rp.40.000.000. Adapun anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp.39.613.000 atau sekitar 99.03 %. Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita Pedesaan/Kelurahan ini merupakan capaian untuk meningkatnya penataan hubungan pemerintah dan masyarakat dengan sasaran adalah PKK Se Kecamatan Teluk Bintan. Kegiatan lainnya yang diikuti oleh PKK Kecamatan Teluk Bintan adalah ikut serta dalam kegiatan PKK yang dikoordinir oleh PKK Kabupaten Bintan.
- (2) Kegiatan Pembinaan Keagamaan, dilaksanakan oleh Kecamatan Teluk Bintan dengan alokasi anggaran Rp.120.000.000,- dan yang terealisasi dari pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp.115.661.300 atau sekitar 96.38 %. Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Keagamaan ini merupakan kegiatan di bidang keagamaan yang memiliki capaian meningkatnya penataan hubungan pemerintah dan masyarakat dengan sasaran adalah masyarakat di Kecamatan Teluk Bintan. Diharapkan dengan adanya

kegiatan ini, akan meningkatnya pengetahuan keagamaan di Kecamatan, seperti STQ tingkat kecamatan, majelis taklim yang dibina dan LASQI.

- (3) Kegiatan Pembinaan Olahraga dan Seni di Kecamatan dilaksanakan oleh Kecamatan Teluk Bintan dengan anggaran sebesar Rp.20.000.000 dan realisasi dari pelaksanaan kegiatan tersebut yang terserap sebesar Rp. 19.908.850 atau sekitar 99.54 %. Kegiatan Pembinaan Olahraga dan Seni di Kecamatan ini merupakan kegiatan yang memiliki capaian meningkatnya penataan hubungan pemerintah dan masyarakat dengan sasaran adalah masyarakat dibidang olah raga dan seni. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, akan meningkatnya pembinaan olahraga dan seni di Kecamatan seperti pembinaan atlet dan sanggar seni.
- (4) Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan, Kegiatan Pembinaan kegiatan kemasyarakatan dianggarkan sebesar Rp.20.000.000 dan yang terealisasi sebesar Rp.19.921.500 atau sekitar 99.61 %. Hasil yang ingin dicapai dengan adanya kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat seperti siskamling, karang taruna, dan kepemudaan
- (5) Kegiatan Peningkatan kapasitas Kelurahan Tembeling Tanjung, dilaksanakan oleh Kecamatan Teluk Bintan dengan alokasi anggaran Rp.170.500.000 dan yang terealisasi Rp. 162.379.995 atau sekitar 95.24 %. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah untuk terpenuhinya dan terlaksananya pembinaan kelurahan dan masyarakat di kelurahan Tembeling Tanjung.

3) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi adalah tidak terealisasinya seluruh usulan yang terangkum dalam musyawarah perencanaan pembangunan tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Solusi yang mungkin dapat diberikan kepada masyarakat adalah bahwa

apabila kegiatan tersebut tidak dapat terealisasi pada tahun ini, maka akan diperjuangkan kembali pada tahun yang akan datang, baik melalui anggaran rutin pemerintah daerah maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya

4. Kecamatan Tambelan

1) Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan

- (1) Kegiatan Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa / Kelurahan / Kecamatan dilaksanakan oleh Kecamatan Kecamatan Tambelan dengan alokasi anggaran Rp.40.00.000,- dan realisasi sebesar Rp.39.339.900,- atau 98,34%. Hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksananya usulan rencana pembangunan dari tingkat desa/kelurahan/ kecamatan.

2) Program Penataan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat

- (1) Kegiatan Peningkatan Hubungan pemerintah dan masyarakat dianggarkan sebesar Rp.80.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.79.544.300,- atau 99,43%. Secara umum, hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya penataan hubungan pemerintah dan masyarakat melalui Kegiatan Upacara Hari Besar Nasional salah satunya seperti upacara memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70 dimana kegiatan tersebut dipusatkan di Lapangan Bola Kaki Kecamatan Tambelan Desa Batu Lepuk. Selain itu juga dilaksanakannya lomba gerak jalan memperingati HUT Kemerdekaan RI dan Lomba rakyat seperti lomba Sampan Kayuh dan perlombaan Tarik Tambang.
- (2) Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita Pedesaan/ Kelurahan Dilaksanakan oleh Kecamatan Tambelan dengan alokasi anggaran Rp.50.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 49.473.300,- atau 98,64%. Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita Pedesaan/Kelurahan ini merupakan capaian untuk meningkatnya penataan hubungan pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan :

- a. Mengikuti Jambore PKK tingkat Kabupaten
 - b. Melaksanakan Lomba Masak se-Kecamatan Tambelan
 - c. Mengikuti Lomba Masak Gemar Ikan tingkat Kabupaten
 - d. Mengikuti Lomba Masak B2SA tingkat Kabupaten
 - e. Mengikuti Bazar Kabupaten Bintan
 - f. Melaksanakan Kegiatan peningkatan keterampilan Fardu Kifayah
 - g. Melaksanakan Kegiatan peningkatan keterampilan dalam pengembangan usaha kecil dan menengah berkerjasama dengan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bintan.
 - h. Disamping kegiatan tersebut PKK kecamatan mempunyai kegiatan rutin diantaranya ;
 - i. Pembinaan Majelistaklim Desa/Kelurahan.
 - j. Pembinaan Dasawisma Desa/Kelurahan.
 - k. Kunjungan ke Posyandu Desa/Kelurahan.
 - l. Pemantapan Toga Desa/Kelurahan.
 - m. Pengembangan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif melalui PAUD Desa/Kelurahan.
- (3) Peningkatan Pengetahuan Keagamaan dilaksanakan oleh Kecamatan Tambelan dengan alokasi anggaran Rp.90.000.000,-. dan realisasi sebesar Rp.89.408.800,- atau 99.34%. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya Pengetahuan Keagamaan diantaranya Pengiriman peserta Seleksi Tilawaatil Qur'an (STQ) di tingkat Kabupaten tepatnya di Kecamatan Bintan Gunung Kijang, dimana pada saat penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Quran (STQ) Tingkat Kabupaten Bintan tersebut, salah satu peserta dari Kecamatan Tambelan memperoleh juara pertama untuk Cabang Lukisan Musaf kategori dewasa. Ini merupakan suatu capaian yang luar biasa di dalam bidang keagamaan di Kecamatan Tambelan. Peringatan hari-hari besar islam seperti Isra' mi'raj, Maulid Nabi Muhammad SAW, Perayaan Hari Raya Idul fitri dan Idul Adha. Di samping itu, untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya generasi muda maka diadakan suatu kegiatan Festival Anak Sholeh se-Kecamatan Tambelan.

- (4) Pembinaan Olahraga dan Seni di Kecamatan dilaksanakan oleh Kecamatan Tambelan dengan alokasi anggaran Rp.102.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.101.016.300,- atau 99.03%. Hasil dari kegiatan ini meningkatnya pembinaan olahraga dan seni di Kecamatan. dengan bentuk Pembinaan Olahraga dan Seni Kecamatan yaitu pertandingan bola voli di tingkat kecamatan, pertandingan sepakbola tingkat kecamatan, pertandingan sepak takraw tingkat kecamatan, pertandingan seni tarik suara tingkat kecamatan.

3) Permasalahan dan Solusi

Adapun di dalam pelaksanaan Program Pembinaan Olahraga dan Seni di Kecamatan Tambelan juga mengalami beberapa hambatan diantaranya yaitu masalah jarak antar Desa dan Kelurahan di Kecamatan Tambelan yang berjauhan serta terbatasnya akses transportasi yang menghubungkan setiap desa dan kelurahan dengan ibukota Kecamatan menyebabkan tingkat partisipasi dari masyarakat menjadi kurang maksimal. Minimnya akses transportasi yang ada menyebabkan masyarakat yang berada di luar Pulau Tambelan, seperti di Desa Mentebung, Desa Pulau Pinang dan Desa Pengikik sulit untuk selalu mengikuti kegiatan yang di selenggarakan solusi pembenahan dan perbaikan di bidang transportasi merupakan suatu masalah yang wajib untuk dilaksanakan.

5. Kecamatan Seri Kuala Lobam

1) Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Kegiatan Fasilitasi Musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan/kecamatan dilaksanakan oleh Kecamatan Seri Kuala Lobam dengan alokasi anggaran Rp.30,000,000,- dan realisasi anggaran sebesar

Rp.29.885.800,- atau 99,62%. Hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksananya usulan rencana pembangunan dari tingkat desa/kelurahan/ kecamatan.

2) Program Penataan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat

- (1) Kegiatan Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dilaksanakan oleh Kecamatan Bintan Seri Kuala Lobam dengan alokasi anggaran Rp.75.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.74.221.060,- atau 98.96% Hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembinaan terhadap masyarakat dalam bentuk pelaksanaan kegiatan memeriahkan HUT RI Ke 70; Fasilitas kegiatan Sosialisasi KBS; Fasilitas pendistribusian Sembako Murah; Fasilitas penyerahan Dana RT/RW dan LPM Tahun 2015; Fasilitas kegiatan organisasi kepemudaan, kepramukaan dll Sehingga terciptanya hubungan Pemerintah dengan masyarakatnya sehingga pemerintah mendapat dukungan dari masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Seri Kuala Lobam.
- (2) Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Keagamaan Tk. Kecamatan dilaksanakan oleh Kecamatan Seri Kuala Lobam dengan alokasi anggaran Rp.106.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.105.016.100,- atau 99.07% Hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pembinaan qori dan qoriah se- Seri Kuala Lobam melalui kegiatan :
 - Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an ke IV Tingkat Kecamatan Seri Kuala Lobam Tahun 2015 dengan 40 peserta utusan dari Desa/Kelurahan se-Kecamatan Seri Kuala Lobam
 - Mengadakan kegiatan peringatan hari-hari besar Keagamaan di tingkat Kecamatan (Maulud Nabi Besar Muhammad SAW, Isra Mi'raj dll);
 - Fasilitas Kegiatan Pelatihan Bagi Guru TKQ/TPQ yang dilaksanakan oleh Badko Kecamatan;
 - Mengadakan kegiatan safari ramadhan Desa/ Kelurahan,

- Kecamatan dan serta fasilitasi kegiatan Safari Ramadhan Kabupaten Bintan; dan
- Pembinaan kepada Kelompok Majelis Taklim dan Kelompok Kesenian Qasidah/Kompang yang ada di Kecamatan.
- (3) Kegiatan Pembinaan Kegiatan Olahraga dan Seni dilaksanakan oleh Kecamatan Seri Kuala Lobam dengan alokasi anggaran Rp.60.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.57.446.050,- 95.74%. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya hubungan pemerintah dengan masyarakat dalam upaya pembinaan masyarakat kecamatan dilaksanakan dalam bentuk pertandingan olahraga dan seni diadakan untuk memeriahkan HUT RI ke 70 Tahun 2015; Fasilitasi Kegiatan Festival Tari Tingkat Kabupaten Bintan yang dilaksanakan di Kecamatan Bintan Timur dengan mengirim 1 sanggar seni;
- (4) Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita dilaksanakan oleh Kecamatan Seri Kuala Lobam dengan alokasi anggaran Rp. 30.000.000 dan realisasi sebesar Rp.25.268.400 atau 84.23%. Hasil dari kegiatan ini adalah terbinanya Organisasi Wanita Pedesaan/ Kelurahan melalui Pelaksanaan Lomba Dasa Wisma TP-PKK Kecamatan Seri Kuala Lobam yang dilaksanakan pada diikuti oleh 4 Kelompok Dasa Wisma; Pembinaan dan pemberdayaan organisasi wanita yang sudah dilaksanakan pada tahun 2014 (pertemuan rutin PKK, Dharma Wanita, kunjungan ke Posyandu, Dasa Wisma, KUBE, Kebun PKK Desa/Kelurahan, Lansia, Kegiatan KB, UP2K, UP2WKSS, Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1435H dll); Fasilitasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan organisasi wanita tingkat Kabupaten Bintan (UP2K, UP2WKSS, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia) dll; Mengikuti Pelaksanaan Peringatan Hari Ibu Tingkat;
- (5) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelurahan Tanjung Permai, dilaksanakan oleh Kecamatan Seri Kuala Lobam dengan alokasi

anggaran Rp.160.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.136.960.057,- atau 85.60%. Hasil dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya Kapasitas Kelurahan Sei Lekop melalui peningkatan sarana dan prasarana Kelurahan Tanjung Permai.

- (6) Kegiatan Peningkatan kapasitas Kelurahan Teluk Lobam, dilaksanakan oleh Kecamatan Seri Kuala Lobam dengan alokasi anggaran Rp. 160.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.141.024.052,- atau 88.14%. Hasil dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya Kapasitas Kelurahan Sei Lekop melalui peningkatan sarana dan prasarana Kelurahan Teluk Lobam.

3) Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang handal khususnya dalam hal Perencanaan Program dan Keuangan yaitu sarjana khusus Perencanaan dan Sarjana Akuntansi;
- b. Kurangnya pemahaman dan komitmen SKPD terhadap sasaran strategis dan perjanjian kinerja sehingga capaian kinerja khususnya kegiatan tidak sesuai dengan DPA;
- c. Kurangnya koordinasi dari atasan terhadap pejabat dibawahnya, kegiatan hanya difokuskan terhadap pejabat tertentu saja, sehingga pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tidak sempurna;
- d. Masih adanya kekurangan pejabat eselon IV khusus di Kelurahan Teluk Lobam (Seklur dan Kasi Tramtib) dan Kelurahan Tanjung Permai (Kasi Pemerintahan dan Kasi Tramtib);
- e. Kurangnya komitmen PPTK terhadap Jadwal Pelaksanaan kegiatannya sehingga kegiatan dilaksanakan terlambat, tidak sesuai dengan Time Schedule yang sudah ditetapkan;
- f. Masih kurangnya dukungan terhadap sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di Kecamatan Seri Kuala Lobam;

- g. Masih kurangnya pembinaan dari Kabupaten dalam hal kepegawaian (Disiplin Jam Kerja serta Sanksi yang harus diberikan);

2) Solusi

- h. Disetujuinya Usulan SKPD khususnya untuk memenuhi dan melengkapi Sarana dan Prasarana yang baik dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD;
- i. Terdapatnya anggaran khusus di SKPD terutama dalam memenuhi pengajuan kegiatan dari kelompok-kelompok masyarakat;
- j. Lebih mengutamakan Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi PNS yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya guna mendukung pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan program serta kegiatan di SKPD;
- k. Penambahan Anggaran pada program pembinaan masyarakat kecamatan, dalam rangka meningkatkan peranserta/ partisipasi Kecamatan pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Bintan;
- l. Badan Kepegawaian Daerah hendaknya segera memenuhi kekosongan PNS di Kecamatan Seri Kuala Lobam sehingga tidak lagi menjadi temuan pihak Inspektorat dan kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan program serta kegiatan;
- m. Meningkatkan koodinasi antar seksi dengan bagian perencanaan dan keuangan sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal kerja yang telah disusun;
- n. PPK melakukan evaluasi terhadap PPTK dalam pelaksanaan kegiatan oleh PPTK dan monitoring pengajuan anggaran kegiatan tersebut sehingga tidak terjadi keterlambatan pengajuandan sesuai dengan anggaran kas kegiatan yang sudah disusun.
- o. Pihak pelaksana pekerjaan pembangunan (Kontraktor) di Desa/

Kelurahan melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah daerah dalam pelaksanaan pekerjaan, melapor terlebih dahulu baru melaksanakan pekerjaan;

- p. Desa/Kelurahan melakukan komunikasi, melapor kepada kepala wilayah (Kecamatan) perihal pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Desa dan kelurahannya agar kegiatan dapat diawasi dan dimonitoring sehingga pembangunan yang dilaksanakan bermanfaat bagi masyarakat;
- q. Camat beserta jajaran pemerintahan desa melakukan pengawasan secara intensive terhadap masyarakat penerima bantuan RTLH agar pelaksanaan pembangunannya segera diselesaikan dan dapat dirasakan manfaatnya;
- r. Camat meningkatkan pembinaan dan pengawasan terkait penyetoran dana raskin dari Desa/Kelurahan ke Bulog sehingga pendistribusian selanjutnya berjalan dengan maksimal.

6. Kecamatan Mantang

1) Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Kegiatan Fasilitasi Musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan/kecamatan dilaksanakan oleh Kecamatan Bintan Pesisir dengan alokasi anggaran Rp.25.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.24.722.260 atau 98,89%. Hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksananya usulan rencana pembangunan dari tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan.

2) Program Penataan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat

- (1) Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan di Kecamatan dilaksanakan oleh Kecamatan Mantang dengan anggaran Rp.69.554.000,- Adapun anggaran yang terealisasi sebesar Rp.68.557.500,- atau 98.57%. Hasil dari kegiatan ini adalah terbinanya kegiatan masyarakat di Kecamatan.
- (2) Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita Pedesaan/Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan Mantang dengan anggaran Rp.50.000.000,- . dan realisasi sebesar Rp. 48.871.700,-

atau 97.74%. hasil dari kegiatan ini adalah terbinanya Organisasi Wanita Pedesaan/Kelurahan.

- (3) Kegiatan Pembinaan Keagamaan dilaksanakan oleh Kecamatan Mantang dengan alokasi anggaran Rp.115.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.113.594.600,- atau 98,78%. hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya penataan hubungan pemerintah dan masyarakat melalui Peningkatan Kegiatan Keagamaan yaitu Pelaksanaan STQ di tingkat Kecamatan dan Pengiriman Peserta MTQ serta Pembinaan Kegiatan Keagamaan bagi masyarakat Kecamatan Mantang.
- (4) Kegiatan Pembinaan Olahraga dan Seni di dilaksanakan oleh Kecamatan Mantang dengan alokasi anggaran Rp.80.000.000 dan realisasi sebesar Rp.79.021.700,- atau 98.78% hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pembinaan dan prestasi dibidang olahraga dan seni di Kecamatan antara lain pembinaan beberapa cabang olahraga seperti Sepak Bola, Futsal dan Turnamen Volly; menyertai kegiatan seni seperti Mak Yong dan kegiatan pariwisata diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan seperti Bintan Mountain Trekking, festival dugong dan Bintan Fishing Festival meraih juara III.

3) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi adalah tidak terealisasinya seluruh usulan yang terangkum dalam musyawarah perencanaan pembangunan tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Solusi yang mungkin dapat diberikan kepada masyarakat adalah bahwa apabila kegiatan tersebut tidak dapat terealisasi pada tahun ini, maka akan diperjuangkan kembali pada tahun yang akan datang, baik melalui anggaran rutin pemerintah daerah maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya seperti PNPM Perdesaan atau P3DK.

7. Kecamatan Bintan Utara

1) Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Kegiatan Fasilitasi Musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan/kecamatan dilaksanakan oleh Kecamatan Bintan Utara dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.000.000,- dengan realisasi Rp.27.493.000,- atau 98,19%. Musrenbang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi rencana program/kegiatan di desa/ kelurahan dan kecamatan beserta permasalahannya serta menghimpun dan merumuskan isu-isu strategis yang didasarkan atas kondisi riil di masyarakat. Pada musrenbang tingkat desa/kelurahan akan dibahas kegiatan-kegiatan yang menjadi usulan dari masyarakat. Selanjutnya pada musrenbang tingkat kecamatan akan dibahas lagi dan diseleksi menjadi usulan prioritas.

2) Program Penataan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat

- (1) Pembinaan kegiatan kemasyarakatan dilaksanakan oleh Kecamatan Bintan Utara dengan alokasi anggaran sebesar Rp.120.805.000 dengan realisasi Rp.115.017.000 atau 95,21%. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya kegiatan sosial kemasyarakatan yang terdiri dari kegiatan kepemudaan, Pramuka dan Karang Taruna.
- (2) Kegiatan Pembinaan kegiatan keagamaan dilaksanakan oleh Kecamatan Bintan Utara dengan alokasi anggaran sebesar Rp.241.952.000 dengan realisasi Rp.240.992.300 atau 99,60%. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut adalah tersedianya qori dan qoriah dari Kecamatan Bintan Utara melalui kegiatan STQ Tingkat Kecamatan, pembinaan kemasyarakatan dalam bidang keagamaan, dan pembinaan LASQI.
- (3) Kegiatan Pembinaan kegiatan olahraga dan seni dilaksanakan oleh Kecamatan Bintan Utara dengan alokasi anggaran sebesar Rp.80.780.000 dengan realisasi Rp.80.104.500 atau 99,16%. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya kegiatan Olahraga dan seni di masyarakat melalui pembinaan dalam bidang olahraga dan seni. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan

daya saing dan sportifitas para atlet agar mampu bersaing dalam setiap event perlombaan yang diselenggarakan serta memelihara kelestarian budaya daerah lokal dan meningkatkan gairah masyarakat untuk memajukan kesenian budaya Melayu.

- (4) Kegiatan Pemberdayaan dan pembinaan organisasi wanita dilaksanakan oleh Kecamatan Bintan Utara dengan alokasi anggaran sebesar Rp.35.000.000 dengan realisasi Rp.34.750.000 atau 99,29%. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya pemberdayaan dan pembinaan organisasi wanita di Kecamatan Bintan Utara melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK dan Organisasi Wanita dalam rangka mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, maju dan mandiri.
- (5) Kegiatan Peningkatan kapasitas Kelurahan Tanjung Uban Selatan, dilaksanakan oleh Kecamatan Bintan Utara dengan alokasi anggaran sebesar Rp.160.000.000 dengan realisasi Rp.143.435.570 atau 89,65%. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut adalah terpenuhinya kapasitas Kelurahan Tanjung Uban Selatan melalui peningkatan kapasitas Kelurahan Tanjung Uban Selatan.
- (6) Kegiatan Peningkatan kapasitas Kelurahan Tanjung Uban Utara, dilaksanakan oleh Kecamatan Bintan Utara dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 160.000.000 dengan realisasi Rp. 154.551.300 atau 96,59%. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut adalah terpenuhinya kapasitas Kelurahan Tanjung Uban Utara melalui peningkatan kapasitas Kelurahan Tanjung Uban Utara.
- (7) Kegiatan Peningkatan kapasitas Kelurahan Tanjung Uban Timur, dilaksanakan oleh Kecamatan Bintan Utara dengan alokasi anggaran Rp.150.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.148.530.200,- atau 99,02%. Hasil dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya Kapasitas Kelurahan Tanjung Uban Timur melalui peningkatan sarana dan prasarana Kelurahan Tanjung Uban Timur.
- (8) Kegiatan Peningkatan kapasitas Kelurahan Tanjung Uban, dilaksanakan oleh Kecamatan Bintan Utara dengan alokasi anggaran sebesar Rp.160.000.000,- dengan realisasi Rp.151.635.887 atau

94,77%. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut adalah terpenuhinya kapasitas Kelurahan Tanjung Uban melalui peningkatan kapasitas Kelurahan Tanjung Uban.

8. Kecamatan Teluk Seborg

1) Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Kegiatan Fasilitas Musrenbang tingkat Kecamatan/Desa dan Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan Teluk Seborg dengan alokasi anggaran Rp.32.550.000,- dan realisasi sebesar Rp.32.088.350,- atau 98,58%. Hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksananya usulan rencana pembangunan dari tingkat desa/kelurahan/ kecamatan.

2) Program Penataan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat

- (1) Kegiatan Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan, Kecamatan Teluk Seborg telah mengalokasikan dana sebesar Rp.80.500.000,- Adapun anggaran yang terealisasi sebesar Rp.80.063.300,- atau 99,46%. Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya hubungan pemerintah dan masyarakat, dimana sasarannya adalah masyarakat Kecamatan Teluk Seborg itu sendiri sehingga terbina kegiatan masyarakat di Kecamatan.
- (2) Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita Pedesaan/Kelurahan, dilaksanakan oleh Kecamatan Teluk Seborg dengan anggaran Rp.54.050.000,- dan realisasi sebesar Rp.53.972.350,- atau 99,86%. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya penataan hubungan pemerintah dan masyarakat melalui pembinaan Organisasi Wanita Pedesaan/Kelurahan.
- (3) Kegiatan Pembinaan Keagamaan dilaksanakan oleh Kecamatan Teluk Seborg dengan anggaran Rp.151.439.300,- dan realisasi sebesar Rp.144.693.600,- atau 95,55%. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya penataan hubungan pemerintah dan masyarakat melalui Pelaksanaan STQ di tingkat Kecamatan dan

Pengiriman Peserta MTQ serta Pembinaan Kegiatan Keagamaan bagi masyarakat Kecamatan Teluk Sebong yaitu :

- Menggalakan pengajian Majelis Ta'lim oleh ibu-ibu di Kecamatan Teluk Sebong dengan disertai siraman rohani dari para Mubaliq dan Penyuluh Agama Non PNS yang ada di Kecamatan Teluk Sebong dan di luar Kecamatan Teluk Sebong serta memeriahkan dan menyemarakkan bulan Ramadhan di setiap Desa dan dengan disejalankan Safari Ramadhan Bupati Bintan yang telah menjadi agenda rutin tahunan dimana kegiatan Safari Ramadhan.
- Pengiriman peserta dari masyarakat untuk mengikuti pelatihan-pelatihan di bidang keagamaan yang diselenggarakan oleh Kabupaten Bintan maupun Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, diantaranya : Pembinaan Guru-guru Ngaji, Imam dan pengurus Masjid, Pelatihan Fardhu Kifayah, dll.

(4) Kegiatan Pembinaan Olahraga dan Seni di Kecamatan dilaksanakan oleh Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan dengan anggaran Rp.54.587.500,- dan realisasi sebesar Rp.54.112.850,-. Atau 99,13%. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pembinaan dan prestasi dibidang olahraga dan seni di Kecamatan, seperti Sepak Bola.

(5) Kegiatan Peningkatan kapasitas Kelurahan Kota Baru, dilaksanakan oleh Kecamatan Teluk Sebong dengan alokasi anggaran Rp.169.120.000,- dan realisasi sebesar Rp. 159.724.150,- atau 94,44%. Hasil dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya Kapasitas Kelurahan Kota Baru melalui peningkatan sarana dan prasarana Kelurahan Kota Baru.

4.1.10.2. Pemerintahan Umum

1) Program Pembinaan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan anggaran yang dialokasikan Rp.150.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.132.404.233,- atau 88,27%. Hasil dari kegiatan ini adalah terbinanya Penataan Keuangan Desa se-Kabupaten Bintan melalui Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) se-Kabupaten Bintan, yang diikuti 36 Desa se-Kabupaten Bintan.
- (2) Kegiatan Pembinaan Perangkat Pemerintahan Kelurahan/ Desa (RT/RW) dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan anggaran yang dialokasikan Rp.121.220.000,- dan realisasi sebesar Rp.114.549.019,- atau 94,50%. Hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembinaan dan Sosialisasi Perangkat Pemerintahan Terbinanya Perangkat Pemerintahan Kelurahan/Desa (RT/RW) telah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Program Pembinaan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

2) Program Penataan dan Pembinaan Pemerintahan Umum dan Daerah Bawahan

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Pembinaan Dana DAK Desa dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan anggaran yang dialokasikan Rp.185.000.000,- dan realisasi

sebesar Rp.176.531.200,- atau 95,42%. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan alokasi dana khusus desa kelurahan se- Kabupaten Bintan. Total anggaran untuk alokasi DAK untuk tahun 2015 adalah sebesar Rp.2.276.500.000, terdiri dari 33 kegiatan yang digunakan untuk membangun maupun rehabilitasi fasilitas jalan, olahraga, sarana dan prasarana sosial.

- (2) Kegiatan Penyusunan LPPD dan suplemen LPPD (IKK) dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan anggaran yang dialokasikan Rp.250.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.246.936.785,- atau 98,77%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 yang merupakan salah satu laporan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bintan selama 1 Tahun Anggaran dalam 1 dokumen laporan; pada tahun 2015 LPPD Kabupten Bintan mendapat predikat 15 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Dengan masuknya Kabupaten Bintan dalam peringkat 15 besar tingkat Nasional, maka Pemerintah Daerah diharapkan lebih fokus dalam meningkatkan perkembangan dan pelayanan publik.
- b. Adapun yang akan menjadi pertanyaan pada common sense survey Tim Nasional Tahun 2015 tentang bidang kesehatan, pendidikan, fasilitas umum, RSUD, jalan raya, PTSP, pelayanan publik, tidak menutup kemungkinan pertanyaan di tahun berikutnya tentang permasalahan kepariwisataan, sektor ekonomi, Lingkungan hidup. Sosial dan sebagainya.

2) Solusi

Dalam penyusunan LPPD dibutuhkan komitmen bersama untuk tercapainya LPPD Kabupaten Bintan yang lebih baik serta data-data pendukung berdasarkan keadaan real dilapangan dengan harapan agar LPPD Bintan dapat masuk kedalam peringkat 10 besar tingkat nasional.

3) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

a. Pelaksanaan program

Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bintan dilaksanakan oleh Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan anggaran yang dialokasikan Rp.87.200.000,- dan realisasi sebesar Rp.70.974.850,- atau 81,39%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen dan informasi dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama Kabupaten Bintan.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Belum adanya perjanjian kinerja di SKPD untuk eselon III kebawah yang mendukung Akuntabilitas kinerja SKPD.
- b. Masih banyaknya SKPD yang belum mengisi E-SAKIP
- c. Belum adanya evaluasi program dari Bappeda untuk mendukung akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang ada evaluasi target dan capaian indikator RPJMD Kab.Bintan periode Tahun 2010-2015.
- d. Belum adanya rencana aksi atas kinerja berupa penjabaran lebih lanjut dari target kinerja yang ada diperjanjian kinerja.

2) Solusi

- a. Untuk kedepannya setiap SKPD harus membuat PK dari tingkat Eselon II,III dan IV.

- b. Agar mengisi e-Sakip sesuai dengan visi, misi, renstra, pk, pengukuran kinerja dan indikator kinerja SKPD
- c. Bappeda agar kedepannya membual evaluasi program RPJMD
- d. Untuk kedepannya setiap SKPD harus membuat rencana aksi atas kinerja SKPD

4) Program Penataan Ketata Laksanaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.677.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.660.321.778,- atau 97,54%. Hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksananya koordinasi pimpinan daerah melalui rapat-rapat koordinasi pimpinan FKPD se-Kabupaten Bintan.
- (2) Kegiatan Evaluasi Kelembagaan dilaksanakan oleh Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan anggaran yang dialokasikan Rp.90.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.86.444.500 atau 96,05%. Hasil dari kegiatan ini adalah diperolehnya struktur organisasi SKPD yang tepat ukuran dan tepat fungsi sesuai dengan peraturan yang berlakusebagai akibat perubahan nomenklatur di pemerintahan pusat melalui penyusunan Laporan Penyusunan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Daerah.
- (3) Kegiatan Rakor dan Konsultasi Bidang Organisasi dilaksanakan oleh Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.120.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.108.098.780,- atau 90,08%. Hasil dari kegiatan ini adalah Diperolehnya Informasi dan penyelesaian Permasalahan dibidang organisasi

- (4) Kegiatan Penyusunan evaluasi Jabatan dilaksanakan oleh Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.100.000.000 dan realisasi sebesar Rp.89.591.900 atau 89,36%. Hasil dari kegiatan ini Tersusunnya peningkatan / Harga Jabatan.
- (5) Kegiatan Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.60.000.000 dan realisasi sebesar Rp.57.356.550 atau 95,59%. Hasil dari kegiatan ini Tersusunnya Road Map Reformasi Birokrasi

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Sebagian SKPD tidak mengembalikan form faktor-faktor jabatan untuk penentuan nilai jabatan dan penyusunan peringkat jabatan. Hal ini menghambat proses penyusunan peringkat jabatan.
- b. Belum diakomodirnya program dan kegiatan didalam Road Map Reformasi Birokrasi

2) Solusi

- a. Perlu dikeluarkannya pengganti PP 41 sebagai dasar penataan organisasi perangkat daerah.
- b. SKPD telah diberikan pembekalan penyusunan standar pelayanan, perlu dilakukan evaluasi terhadap SKPD terkait penyusunan standar pelayanan
- c. Bahwa program dan kegiatan didalam Road Map Reformasi Birokrasi agar diakomodir didalam penyusunan RPJMD.

5) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten

Bintan dengan alokasi anggaran Rp.262.260.000,- dan realisasi sebesar Rp.253.463.695,- atau 96,65%. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah Peraturan Daerah (PERDA) sejalan bergantinya peraturan dengan melaksanakan penyusunan Perda. Pada tahun 2105 jumlah Perda yang diterbitkan sebanyak 5 Perda yang telah disahkan.

- (2) Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.213.700.000,- dan realisasi sebesar Rp.209.084.715,- atau 97,84%. Hasil dari kegiatan ini adalah terpublikasinya produk hukum daerah melalui pembuatan dokumentasi hukum.
- (3) Kegiatan Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.182.800.000,- dan realisasi sebesar Rp.180.496.555,- atau 98.74%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan dokumentasi hukum sehingga terwujudnya tertib dokumentasi hukum.
- (4) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Penyuluhan Hukum dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.120.000.000 dan realisasi sebesar Rp.113.800.550 atau 94,83%. Hasil dari kegiatan ini adalah Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat melalui pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah (PERDA) dan penyuluhan hukum yang diikuti peserta yang berasal dari SKPD se-Kabupaten Bintan.
- (5) Kegiatan Pengkajian dan Evaluasi Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.100.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.99.144.835,- atau 99,14%. Meningkatnya Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan dalam penertiban produk hukum.

- (6) Kegiatan Litigasi dan Non Litigasi dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.171.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.81.391.025,- atau 47,60%. Hasil dari kegiatan ini adalah diharapkan terselesainya sengketa sesuai Peraturan Perundang-undangan melalui penyelesaian sengketa dan penegakan hukum dalam kasus Perdata dan PTUN.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Kurangnya koordinasi dengan SKPD penggagas Ranperda.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum.
- c. Kurangnya tenaga ahli sebagai operator.
- d. Kurangnya kesadaran dari masyarakat.
- e. Belum ada petunjuk teknis terhadap UU No.23 Tahun Anggaran 2014.
- f. Tidak ada kasus yang perlu ditangani pengacara profesional

2) Solusi

- g. Meningkatkan anggaran kegiatan dalam rangka tercapainya target yang ada didalam RPJMD.
- h. Perlunya penegakan perda yang berkelanjutan.
- i. Perlunya peraturan yang jelas dan tegas terkait pengelolaan dokumen dan pengarsipan Dokumentasi hukum.
- j. Perlunya sarana prasarana publikasi terkait penegakan perda seperti papan pengumuman di tempat-tempat umum.

6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan

a. Pelaksanaan Program

Kegiatan Penyusunan rencana kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.168.624.670,- dan

realisasi sebesar Rp.166.356.705,- atau 98,66%. Hasil dari kegiatan ini adalah Tersedianya rencana kerja dan laporan kegiatan sebanyak 7 dokumen.

b. Permasalahan dan Solusi

Belum optimalnya sistim informasi monitoring evaluasi dalam rangka membercepat pelaksanaan pelaporan kegiatan yang disampaikan, solusinya adalah meningkatkan aplikasi SIMONEV dan melaksanakan koordinasi kepada pihak SKPD terkait agar pelaksanaan pelaporan dapat berjalan cepat efektif dan efisien dengan menerapkan disiplin agar SKPD melaporkan hasil laporan fisik dan penyerapan anggaran kegiatannya tepat waktu.

7) Program Peningkatan Administrasi Pembangunan Daerah

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Operasional Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.250.000.000 dan realisasi sebesar Rp.248.726.425 atau 99,49%. Meningkatnya pelayanan pengadaan barang / jasa secara elektronik melalui penyediaan sarana dan prasarana LPSE. Pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang Jasa sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Kegiatan Dukungan Kolokasi Server Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik dengan alokasi anggaran Rp.50.000.000 dan realisasi sebesar Rp.49.764.600,- atau 99,53% telah selesai dilaksanakan menjadi dua server data yang berlokasi di Bandar Seri Bentan dengan ip address 222.124.9.154 dan yang berlokasi di Jakarta dengan ip address 150.107.140.142.
- (3) Kegiatan Dukungan Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Kabupaten Bintan dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan

alokasi anggaran Rp. 195.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 189.713.140 atau 97,29%. Tersusunnya laporan TEPPA melalui pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi Penyerapan Anggaran dengan terpublikasinya pada Monev Online LKPP.

- (4) Kegiatan Operasionalisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.250.000.000,- dan mengalami pengurangan anggaran pada APBD Perubahan menjadi Rp.216.000.000,- dengan realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2015 mencapai Rp.203.143.648,- atau 94,05%. Hasil dari kegiatan ini adalah Terselenggaranya Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bintan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku(1 Tahun).
- (5) Kegiatan Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Sumber Pendanaan APBN dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.150.000.000,- dan mengalami penambahan anggaran pada APBD Perubahan menjadi Rp.170.000.000,- dengan realisasikeuangan sampai dengan 31 Desember 2015 mencapai Rp.166.352.550,- atau97,85%. Hasil dari kegiatan adalah Meningkatnya Penyerapan Anggaran Sumber Pendanaan APBN di Kabupaten Bintan baik Dana Alokasi Khusus, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama serta Alokasi APBN Lainnya yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bintan dengan realisasi penyerapan sampai dengan akhir Tahun sebesar 84,86% atau mencapai Rp.73.445.515.688,- dari Total Pagu Anggaran sebesar Rp.86.546.322.650,-.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Perlu kajian lebih mendalam dalam melaksanakan kegiatan mengenai sistim informasi mengenai penyerapan anggaran di Kabupaten Bintan seperti pelaksanaan SIMONEV dan SISMONTAEPPRA yang pada intinya melaksanakan pelaporan kegiatan pembangunan dengan permasalahan yang sama.
- b. Pada awal tahun anggaran 2015 belum ada dasar pelaksanaan TEPPA dikarenakan UKP4 telah dibubarkan Presiden namun telah dibentuk kembali Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPPRA) oleh Presiden RI berdasarkan Surat Edaran dari Kantor Staf Presiden (KSP) Nomor B-49/KSP/D.I/05/2015 tanggal 26 Mei 2016 perihal Surat Edaran terkait pelaksanaan sistim monitoring informasi TEPPRA (SISMONTAP) dalam pengawasan Kantor Staf Presiden (KSP)
- c. Pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik (LPSE) sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan namun masih ada beberapa paket yang dilelangkan secara manual dan tidak melalui LPSE.
- d. Berdasarkan hasil koordinasi pengendalian, evaluasi dan pembangunan sumber pendanaan APBN tahun anggaran 2015 ditemukan bahwa masih adanya penerimaan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diserahkan oleh Kementerian/Lembaga pada Bulan Juli tau Awal Triwulan III sehingga terdapat kegiatan Tugas Pembangunan tidak dapat dilaksanakan sebesar Rp.3.200.000.000,- yaitu untuk pengadaan kapal puskesmas keliling perairan yang memerlukan waktu 7 Bulan Pekerjaan.
- e. Selain itu, ditemukan juga adanya perubahan Beberapa Petunjuk Teknis Kementerian/Lembaga berkaitan dengan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus sehingga beberapa Bidang

DAK mengalami keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dikarenakan perlu penyesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis dimaksud seperti Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan dan DAK Bidang Keluarga berencana

- f. Pada pelaksanaan Program/Kegiatan Sumber Pendanaan APBN oleh SKPD se-Kabupaten Bintan ditemukan masih ditemukan ketaatan SKPD pelaksana untuk melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah tidak tepat pada waktunya sehingga pelaporan ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat mengalami keterlambatan dari waktu yang telah ditetapkan.
- g. Masih ditemukan juga kelemahan pada SKPD pelaksana yaitu perencanaan pelaksanaan kegiatan yang tidak matang sehingga ditemukan adanya pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus yang batal dilaksanakan dikarenakan lahan belum tersedia, selain itu ditemukan juga kelalaian SKPD pelaksana dalam memperkirakan waktu pekerjaan yang baru dapat dilaksanakan pada APBD Perubahan sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena waktu tidak mencukupi seperti pengadaan mobil pelayanan, BKB Kit dan KIE Kit pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga berencana serta pengadaan sarana prasarana Pemadam Kebakaran untuk Polisi Kehutanan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan.
- h. Kendala yang dihadapi oleh ULP adalah masih minimnya kesadaran Pokja untuk melaporkan hasil pelaksanaan pelelangan/seleksi kepada Ketua ULP selaku penanggungjawab pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui ULP.

- i. Selain itu, ditemukan keengganan Pokja ULP untuk ditetapkan dalam Keputusan Kepala ULP dikarenakan tidak adanya jaminan kepastian hukum dari Pemerintah Kabupaten Bintan.
- j. Tidak konsistennya perencanaan anggaran untuk insentif Pokja ULP terkait paket pelelangan/seleksi yang diberikan sehingga beberapa Pokja ULP dituntut dengan beban kerja fungsional tambahan dari SKPD Pemohon Pelelangan/Seleksi namun tidak mendapatkan insentif dan biaya operasional yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pelelangan/seleksi dimaksud

2) Solusi

- a. Meningkatkan SIMONEV agar output yang didapatkan sama dengan SISMONTPEPRA sehingga dalam melaksanakan pelaporan tidak terjadi dualisme data pelaporan kegiatan pembangunan yang berbeda.
- b. Menyampaikan data pengadaan barang/ jasa berdasarkan DPA SKPD secara menyeluruh dan transparansi 100% dan menayangkan di Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) agar masyarakat/ penyedia dapat mengakses paket-paket pengadaan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- c. Pemberitahuan pembatalan pelaksanaan pekerjaan beberapa Kegiatan Tugas Pembantuan kepada Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Wilayah Provinsi Kepulauan Riau dikarenakan tidak cukupnya waktu pelaksanaan pekerjaan.
- d. Perlunya peningkatan pengawasan, ketelitian dan kematangan perencanaan pelaksanaan pekerjaan Sumber Pendanaan APBN oleh SKPD pelaksana sehingga penyerapan anggaran dapat terealisasi pada awal triwulan tahun berjalan.
- e. Perlu adanya ketegasan komitmen SKPD Pelaksana yang disertai dengan Sanksi dan Penghargaan atas ketaatan penyampaian pelaporan oleh SKPD se Kabupaten Bintan.

- f. Perlu adanya perencanaan penganggaran yang terintegrasi antara SKPD, ULP dan TAPD sehingga biaya operasional dan insentif pelelangan/seleksi dapat diberikan sesuai dengan beban kerja fungsional tambahan yang diberikan.

8) Program Peningkatan Kualitas Masyarakat

a. Pelaksanaan Program

Kegiatan Pengawasan dan monitoring pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan Gas LPG dilaksanakan oleh Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp. 165.562.900,- dan realisasi sebesar Rp. 164.527.910,- atau 99,37%. Hasil dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan sistem pendistribusian bahan bakar minyak (BM) sehingga dapat tersalurnya kuota BBM jenis tertentu pada masyarakat yang berhak menggunakan BBM jenis tertentu dengan menerapkan kartukendali dan surat rekomendasi serta terjaganya harga eceran tertinggi (HET) gas LPG 3 Kg pada masyarakat.

b. Permasalahan dan Solusi

Kegiatan Pengawasan dan monitoring pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan Gas LPG dilaksanakan oleh Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan solusi perlu adanya penertiban kios-kios penjualan BBM jenis tertentu yang ada di masyarakat menjadi Sub Penyalur sesuai dengan peraturan BPH Migas Nomor 06 Tahun 2015 .

9) Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Rapat Kerja Bidang Perekonomian dilaksanakan oleh Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.144.600.000,- dan realisasi sebesar Rp.133.907.850 atau 92,61%. Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya Koordinasi dalam Penetapan Kebijakan Bidang

Perekonomian melalui kegiatan rapat kerja bidang perekonomian Kabupaten Bintan dapat meningkatkan kemandirian, daya saing serta pengetahuan dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dan membawa dampak bagi kesejahteraan masyarakat khususnya para nelayan dan pembudidaya ikan.

- (2) Kegiatan Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bintan dilaksanakan oleh Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp. 139.837.100,- dan realisasi sebesar Rp. 136.045.950,- atau 97,29%. Terwujudnya koordinasi, Sinkronasi dan Asistensi Pembangunan dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi (TPID) Kabupaten Bintan.

b. Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

- a. Tidak ada sertifikasi produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha pengolahan hasil perikanan dan ini sangat mempengaruhi para pelaku usaha hasil perikanan dalam menjual ke pasaran Domestik maupun pasaran internasional.
- b. Kurangnya nilai tambah produk hasil kelautan dan perikanan oleh para nelayan karena tidak menguasai ilmu pengetahuan

2) Solusi

- a. Perlu peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan serta sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait
- b. peran Pemerintah sangat dibutuhkan dalam menyusun regulasi melalui program-program kelautan dan perikanan

1) Program Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Umat Beragama

a. Pelaksanaan kegiatan

Kegiatan Pelaksanaan Khataman dan Khitanan Massal oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.110.000.000 dan realisasi sebesar Rp.107.632.295,- atau 97,85%. Terselenggaranya Khataman massal sebanyak 50 orang dan khitanan massal sebanyak 50 orang di Kecamatan Seri Kuala Lobam

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Program Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Umat Beragama tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

2) Program Peningkatan Pengetahuan Keagamaan

a. Pelaksanaan kegiatan

- (1) Kegiatan Safari Ramadhan Kabupaten Bintan dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp. 183.200.000 dan realisasi sebesar Rp. 148.228.530,- atau 80,91%. Hasil dari kegiatan ini adalah Terwujudnya Hubungan Silaturahmi dan Pembinaan Kerohanian Masyarakat Kabupaten Bintan di 9 Kecamatan..
- (2) Kegiatan Penatausahaan Administrasi Bantuan Hibah dan Sosial dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp. 109.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 104.798.790,- atau 95,71%. Hasil dari kegiatan ini adalah Terwujudnya Sistem Administrasi yang baik terhadap penerima Bantuan Sosial dan Hibah yang tepat sasaran.
- (3) Kegiatan Peningkatan pelayanan haji masyarakat Kabupaten Bintan dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran

Rp.411.683.000,- dan realisasi sebesar Rp.398.631.380 atau 96,82%. Hasil dari kegiatan ini adalah dalam rangka meningkatkan Kualitas Ibadah Haji di Kabupaten Bintan Tahun 2015 dengan hasil dapat merwujudnya Kualitas Haji Mabrur bagi masyarakat di Kabupaten Bintan.

- (4) Kegiatan Pembinaan kepada Guru Ngaji, Mubaliq, Imam dan Penjaga Mesjid, Pelaksana Fardhu Kifayah Se Kabupaten Bintan dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.4.750.900.000,- dan realisasi sebesar Rp. 4.553.986.310,- atau 95,86%. Pembinaan Kualitas imam, Penjaga mesjid, fardhu kifayah, mubaligh/ mubalighah dan guru ngaji Dengan hasil Terwujudnya Peningkatan Kualitas imam, Penjaga mesjid, fardhu kifayah, mubaligh/ mubalighah dan guru ngaji di Kabupaten Bintan.
- (5) Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Keagamaan Pendayagunaan Da'i Pedesaan di Kab. Bintan dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan yang dialokasikan sebesar Rp.792.280.000,- dan realisasi sebesar Rp.785.195.700,- atau 99,11% dengan hasil Terwujudnya pemahaman Keagamaan melalui pendayagunaan Da'i Pedesaan di Kabupaten Bintan sebanyak 38 orang.
- (6) Kegiatan Pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Kab. Bintan dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan yang dialokasikan sebesar Rp.1.710.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.1.538.498.018,- atau 89,97% dengan Terwujudnya Hasil qori/Qoriah terbaik Kabupaten Bintan
- (7) Kegiatan Temu Karya Kelompok Pengajian Se Kab. Bintan dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan yang dialokasikan sebesar Rp.381.070.000,- dan realisasi sebesar Rp.333.038.735,- atau

- 87,40% dengan hasil Terwujudnya Hubungan Silaturahmi dan Pembinaan Kerohanian Masyarakat Kabupaten Bintan
- (8) Kegiatan Peningkatan mutu pendidikan Yayasan Pondok Pesantren Madani Unggulan dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan yang dialokasikan sebesar Rp.803.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.780.142.380,- atau 97,15% dengan hasil Terwujudnya santri yang berkualitas di Kabupaten Bintan.
- (9) Kegiatan Pembinaan Pusat Hafal Al Qur'an dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan yang dialokasikan sebesar Rp.965.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.899.056.010,- atau 93,17% dengan hasil Terwujudnya Qori dan Hafiz terbaik di Kabupaten Bintan di Kabupaten Bintan sebanyak 20 orang.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Pada kegiatan Pembinaan kepada Guru Ngaji, Mubaliq, Imam dan Penjaga Mesjid, Pelaksana Fardhu Kifayah masih terdapat data data ganda (tidak valid) dari petugas lapangan penerima honor kegiatan ini terjadi karena verifikasi data pada level Kecamatan dan Kelurahan tidak berjalan secara maksimal. Data yang diserahkan masih mengacu kepada data-data yang.Masalah lain muncul terkait jumlah petugas lapangan yang ada antara PNS dan NON PNS lebih banyak jumlah PNS.
- b. Dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan haji kabupaten Bintan Tahun 2015 kegiatan berjalan dengan baik, akan tetapi terdapat kendala terkait anggaran kesehatan yang tidak tercantum dalam DPA kegiatan. Hal ini terjadi dikarenakan terjadi miskomunikasi antara Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan Dinas Kesehatan pada kepemimpinan Kabag Kesra

Sebelumnya. Menurut informasi yang kami terima, Bagian Kesra telah menyurati Dinas Kesehatan terkait hal ini. Tapi menurut pengakuan pihak Dinas Kesehatan, mereka tidak mengetahui hal tersebut.

- c. Dalam pelaksanaan ibadah haji juga ditemukan persoalan, apalagi pelaksanaan ibadah haji tahun 2015 ini tidak luput dari berbagai musibah yang terjadi. Meski jamaah kabupaten bintan kembali dalam keadaan sehat dan selamat, tapi peristiwa tersebut perlu menjadi catatan bagi panitia pelaksana kegiatan peningkatan mutu pelayanan ibadah haji.
- d. Masalah yang muncul adalah terkait jumlah honorarium yang diberikan oleh pihak pondok pesantren terhadap para guru yang mengajar di tempat tersebut. Jumlah honorarium yang diberikan tidak terdapat (belum sesuai) dengan Standar Satuan Harga Kabupaten Bintan Tahun 2015. Disamping itu, terdapat laporan dari guru agar jumlah honorarium yang ada diperjelas dasar pemberiannya.
- e. Masalah berikutnya adalah ketidakaktifan pimpinan yayasan yang sudah pindah ke Yogyakarta karena memangku jabatan kepala Biro di UIN Yogyakarta. Akibatnya banyak usulan yang diajukan oleh guru di lingkungan pondok pesantren berakhir sebagai usulan yang tidak ditindaklanjuti oleh yayasan.
- f. adalah Kegiatan yang setiap tahunnya dilaksanakan di Kabupaten Bintan. Persiapan Kegiatan dari tingkat kabupaten sampai perencanaan tingkat provinsi, sumber Dana STQ dari tahun ke tahun berasal dari Dana Hibah Bansos. MTQ Tahun 2014 sumber dari dana hibah yang dilaksanakan oleh LPTQ, namun pada tahun 2015 sumber anggaran dari belanja langsung. Perbedaan penggunaan dana hibah dan belanja langsung adalah :

- g. Dana hibah sebelum kegiatan dilaksanakan 70% sudah bisa digunakan sehingga pelaksanaan kegiatannya berjalan dengan cukup baik. Kekurangan dana pada saat pelaksanaan kegiatan bisa diusulkan kembali pada perubahan.
- h. Sedangkan pada kegiatan yang sumber dananya dari Anggaran belanja langsung kegiatan harus dilaksanakan dulu baru pencairannya bisa diusulkan. Kekurangan jumlah dana ketika pelaksanaan kegiatan, dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran dalam satu kode kegiatan yang akan diperkuat oleh Peraturan Bupati (Perbup Farsial).
- i. Pengurangan Anggaran di DPA berdampak pada pelaksanaan kegiatan dilapangan
- j. Keterbatasan anggaran di setiap jenis kebutuhan sesuai dengan penggunaannya.

2) Solusi

- a. Melakukan verifikasi kembali terhadap data yang masuk lalu mengembalikan data yang telah terverifikasi itu dengan maksud agar nama-nama petugas yang ada diteliti kembali oleh pihak kecamatan, sehingga dapat dilakukan perbaikan atau pengurangan manakala data-data yang sudah ada masih dianggap kurang valid.
- b. Mengajukan kerjasama dengan Bank Perkreditan Rakyat Bintan. Hal ini dimaksudkan selain penyaluran dapat berjalan dengan tertib, juga sebagai jalan tak langsung untuk melakukan upaya penyortiran data ganda yang masih terdapat dalam pengajuan honorarium petugas lapangan
- c. Selama ini pembinaan jamaah melulu berfokus pada pengetahuan ibadah dan bagaimana melaksanakan ibadah secara sempurna. Sebaiknya ditahun mendatang jamaah perlu dibekali dengan pengetahuan social budaya serta aturan-aturan

yang berlaku di tanah suci. Sehingga hal-hal buruk yang terjadi dapat dihindari.

- d. Perlu usulan perubahan SSH agar dapat mengadaptasi kebutuhan honorarium dilingkungan pondok pesantren madani. Disamping itu, kami juga meminta kepada pengurus yayasan untuk membuat rincian dasar pemberian honor yang diberikan kepada masing-masing guru.
- e. Diusulkan agar segera dilakukan pergantian antar waktu pengurus yayasan. Sebab kami menilai ini menjadi salah satu factor menurunnya semangat dan mobilitas mengajar di lingkungan pondok pesantren madani.
- f. Perbup Farsial adalah solusi dalam mengatasi kekurangan dari setiap jenis kegiatan untuk melakukan membantu pada kegiatan yang perlu ditambahkan

3) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Pelaksanaan kegiatan

- (1) Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.97.532.500,- atau 97,53% hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya materai, perangko dan benda pos lainnya Terpenuhi untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.643.830.000,- dan realisasi sebesar Rp.493.604.408,- atau 76,67%. Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya sarana listrik, air bersih, telepon, majalah dan Koran untuk 1(satu) tahun anggaran
- (3) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan

alokasi anggaran Rp.1.203.950.000,- dan realisasi sebesar Rp.1.107.450.000,- atau 91,98%. Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya pembayaran tenaga pendukung administrasi perkantoran yaitu pembayaran honorarium tim pengadaan barang dan jasa dan PTT.

- (4) Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp. 531.200.000,- dan realisasi sebesar Rp. 454.090.830,- atau 85,48%. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kondisi kebersihan serta tersedianya peralatan kebersihan kantor.
- (5) Kegiatan rapat-rapat koordinasi monitoring dan evaluasi dalam daerah dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp. 400.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 233.965.000 atau 58,49%. Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor.
- (6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.511.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.461.865.000,- atau 90,38%. Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk 1(satu) tahun anggaran.
- (7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.300.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.224.540.800,- atau 74,85%. Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya peralatan dan komponen listrik.
- (8) Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.2.455.000.000,- dan realisasi sebesar

Rp.1.939.605.450 atau 79,01%. Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan bahan bakar minyak/genset untuk 1(satu) tahun anggaran.

- (9) Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.3.774.774.000,- dan realisasi sebesar Rp.3.657.589.090 atau 96,90%. Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan konsumsi harian, peserta rapat dan tamu untuk 1(satu) tahun anggaran.
- (10) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah dilaksanakan oleh Bagian Umum anggaran Rp. 584.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 583.955.000,- atau 99,99%. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah melalui koordinasi monitoring dan evaluasi dalam daerah melalui pelaksanaan untuk 1(satu) tahun anggaran.
- (11) Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp. 950.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 691.197.572,- atau 72,76%. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah melalui pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah untuk 1 (satu) tahun anggaran.

b. Permasalahan dan Solusi

Untuk keseluruhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tidak terdapat permasalahan yang berarti, namun hanya ada beberapa kegiatan yaitu pada Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Kegiatan Pengadaan Alat Tulis Kantor dan Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan telah melalui proses lelang dan dirasa penyerapannya tidak mencapai target yang dianggarkankarena dengan capaian tersebut dinilai sudah mencukupi kebutuhan untuk

pelaksanaan 1 tahun. Solusinya adalah Berdasarkan hasil yang dilelangkan dari kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Kegiatan Pengadaan Alat Tulis Kantor dan Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dirasakan perlu untuk menganggarkan kegiatan tersebut ditahun mendatang sesuai dengan kebutuhan.

4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor anggaran dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp. 528.701.020,- dan realisasi sebesar Rp. 512.356.560,- atau 96,91%. Hasil dari kegiatan ini adalah Terpeliharanya gedung kantor, untuk 1(satu) tahun anggaran.
- (2) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp. 784.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 760.499.200,- atau 97,00%. Hasil dari kegiatan ini adalah Terpeliharanya kendaraan dinas melalui pemeliharaan kendaraan dinas / operasional untuk 1(satu) tahun anggaran.
- (3) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp. 365.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 347.184.600,- atau 95,12%. Terpeliharanya peralatan kantor melalui pemeliharaan rutin/rutin berkala peralatan untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Kegiatan Peningkatan prasarana dan sarana aparatur dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.1.224.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.147.077.800,- atau 93,72%. Terpenuhinya kebutuhan sarana

dan prasarana aparatur melalui penyediaan sarana dan prasarana aparatur.

- (5) Kegiatan Penyediaan jasa sewa gedung kantor/tempat dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.4.545.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 4.452.304.941,- atau 97,96%. Terpenuhinya kebutuhanjasa sewa gedung kantor untuk 1(satu) tahun anggaran.

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparaturtidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai kebutuhan.

5) Program peningkatan disiplin aparatur

a. Pelaksanaan Program

Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dan Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu tidak dapat dilaksanakan tahun 2015, dan akan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran 2016.

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Program peningkatan disiplin aparatur tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai kebutuhan.

6) Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur

a. Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.200.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 145.250.000,- atau 72,63%. Meningkatnya kapasitas sumber daya melalui penyertaanaparatur pada diklat formalaparatur untuk

- 1(satu) tahun anggaran tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.
- (2) Kegiatan Peningkatan kapasitas kehumasan dan keprotokoleran oleh Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.753.500.000,- dan realisasi sebesar Rp.736.551.312,- atau 97,75%. Hasil Terwujudnya Peningkatan Kapasitas kehumasan dan keprotokoleran.
- (3) Kegiatan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga PNS dan Anggota Korpri dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.251.150.000,- dan realisasi sebesar Rp.234.514.209,- atau 93,38%. Terpenuhinya kebutuhan pembinaan olahraga PNS dan Anggota Korpri melalui pembinaan olahraga PNS dan Anggota Korpri, kegiatan tersebut tidak terdapat permasalahan maupun kendala sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana.

b. Permasalahan dan Solusi

Masih kurangnya pelaksana kehumasan dan keprotokolan pada Bagian Humas dan Protokol dan diharapkan solusi kedepannya agar Meningkatkan kapasitas pelaksana kehumasan dan keprotokolan melalui penambahan pegawai dan dengan mengadakan bimbingan teknis kehumasan dan keprotokolan di Kabupaten Bintan guna untuk keseragaman tertip keprotokolan di seluruh SKPD Kabupaten Bintan.

7) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda); dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan dengan anggaran Rp.1.497.622.800,- dan realisasi sebesar Rp.1.066.729.276,- atau 71,23%. Output dari

kegiatan ini adalah terlaksananya pembahasan ranperda dan produk hukum daerah lainnya dengan capaian target 11 buah Perda secara fisik ternyata di Tahun 2015 telah disahkan 6 Perda sedangkan 2 Perda belum dibahas dan 1 Perda telah dibahas namun belum sempat untuk disahkan di Tahun 2015. Hasil dari kegiatan ini adalah ditetapkan Perda dan produk hukum daerah lainnya.

- (2) Kegiatan Hearing/Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama; dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan dengan anggaran Rp.13.500.000,- dan realisasi sebesar Rp.3.366.000,- atau 24,93%. kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil pengawasan dan temuan di lapangan terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bintan dalam bentuk pendokumentasian dan dialog sebanyak 24 kali hearing dari 45 kali rapat yang direncanakan dikarenakan tahun transisi karena penggunaan dana tersebut hanya diperuntukkan untuk keperluan biaya Dokumentasi. Hasil dari kegiatan ini adalah ditindak lanjutnya hasil hearing/dialog maupun pengaduan masyarakat sejumlah 5 pengaduan sesuai dengan fungsi dan wewenang DPRD Kabupaten Bintan.
- (3) Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna; dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan dengan anggaran Rp.80.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.29.205.000,- output dari kegiatan ini merupakan pelaksanaan rapat-rapat pengambilan keputusan kebijakan yang dilaksanakan sebanyak 33 kali dan rapat Paripurna Istimewa; hasil dari kegiatan ini adalah berlakunya keputusan dewan yang sah dan mengikat.
- (4) Kegiatan Reses Anggota DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan dengan

anggaran Rp.2.346.039.400,- dan realisasi sebesar Rp.2.209.442.956,-, atau 94,18%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan reses 3 kali pelaksanaan dalam setahun. Hasilnya adalah terlaksananya jaring asmara sebagai pokok acuan pikiran DPRD dan menampung aspirasi masyarakat sebagai bahan usulan untuk Musrenbang Tingkat Kabupaten

- (5) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD; dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan dengan anggaran Rp.1.206.094.000,- dan realisasi sebesar Rp.697.399.150,- atau 57,82%. Output dari kegiatan ini adalah bentuk pelatihan dan BIMTEK bagi anggota DPRD terkait Tugas Pokok dan Fungsi Anggota DPRD
- (6) Penyebar Luasan Informasi Kegiatan DPRD; dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan dengan anggaran sebesar Rp.420.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.376.312.500,- atau 89,60%. Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya penyebaran informasi kegiatan DPRD
- (7) Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan APBD dan Musrenbang/ Inspeksi Mendadak; dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan dengan anggaran sebesar Rp.841.475.000,- dan realisasi sebesar Rp.705.441.379,- 83,83%. Output dari Kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring ke lokasi-lokasi pembangunan yang dibiayai oleh APBD dan APBN, selanjutnya dilakukan rapat evaluasi internal anggota DPRD untuk menghasilkan rumusan berupa laporan hasil monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini direncanakan sebanyak 57 kali dan terealisasi sebanyak 57 kali.
- (8) Sekretariat Konsultasi Dalam Rangka Pengawasan; dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan dengan anggaran sebesar Rp.4.033.482.330,- dengan realisasi sebesar Rp.3.284.275.770,- atau 81,43%. kegiatan ini

dilaksanakan dalam bentuk Konsultasi dan koordinasi ke Pusat ataupun daerah lain untuk mendapatkan masukan dan informasi terkait peningkatan kinerja Anggota DPRD Kabupaten Bintan. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 11 kali dari 12 kali Konsultasi yang direncanakan.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Terbatasnya waktu pembahasan dimana konsentrasi anggota lebih terfokus pada penyelenggaraan Pilkada
- b. Belum adanya aturan yang jelas pada setiap pengaduan ormas untuk kepentingan masyarakat
- c. Masih minimnya pemahaman kepada masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan DPRD.
- d. Masih kurangnya partisipasi Anggota DPRD Kabupaten Bintan terhadap kegiatan sosialisasi yang diadakan secara interaktif di RRI

2) Solusi

- a. Tidak mencapai target karena dari 9 Prolegda yang diusulkan Eksekutif hanya 6 yang disahkan 2 belum dibahas dan 1 selesai dibahas namun belum sempat disahkan pada tahun ini dan akan dilanjutkan pada tahun berikutnya
- b. Tetap berperan sebagai fasilitator antara kedua belah pihak yang bersengketa
- c. Perlu peningkatan pemahaman kepada masyarakat melalui media-media yang lebih bervariasi.
- d. Perlu diikutsertakan wartawan didalam setiap kegiatan DPRD.
- e. Perlunya upaya kerjasama dengan media cetak untuk sosialisasi kegiatan.
- f. Perlu adanya penyesuaian jadwal yang tetap dari Anggota DPRD.

8) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

a. Pelaksanaan Program

Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pilkada Yang Berkwalitas, Demokrasi, Jujur dan Adil dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan dengan anggaran Rp.390.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.294.181.300,- atau 81,43%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Pilkada Yang Berkwalitas, Demokrasi, Jujur dan Adil.

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana

4.1.10.3. Administrasi Keuangan Daerah

Urusan Administrasi Keuangan Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan. Dari program 8 (delapan) program dan 58 (lima puluh delapan) kegiatan pada Tahun Anggaran 2015 semuanya telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan mencapai 86,06%. Secara rinci realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan pada Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Penyusunan Standar Analisa Belanja (SAB) dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran Rp.121.200.000,- realisasi sebesar Rp.101.630.000,- atau 83,85%. Keluaran dan hasil yang diperoleh

dari kegiatan tersebut adalah Berupa Dokumen Penyusunan Standar Analisa Belanja untuk dipedomani SKPD, sehingga terwujudnya Penatausahaan Keuangan yang transparan, Efisien dan Akuntabel, pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan serta meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah pada 38 SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

- (2) Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH), dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 184.080.000,- realisasi sebesar Rp. 163.263.800,- atau 88,69%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya buku pedoman Standar Satuan Harga 2016 sebanyak 100 (seratus) buku. Penyusunan Standar Satuan Harga ini dimaksudkan untuk (a) Menyajikan data harga barang / jasa; (b) Mendapatkan informasi adanya perubahan harga berkaitan kebijakan regulasi ekonomi. (c) Mendapatkan informasi tentang besaran plafond dana / biaya untuk keseragaman SKPD dalam pelaksanaan program kegiatan. Adapun hasil yang dicapai adalah terwujudnya penatausahaan yang transparan, efisiensi, dan akuntabilitas pada 38 SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
- (3) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran Rp.65.000.000,- realisasi sebesar Rp.59.186.400,- atau 91,06%. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah Tersedianya Buku dan Informasi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

- (4) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 20.268.800 ,- realisasi sebesar Rp.16,799,800,- atau 82.89%. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah Tersedianya dan Informasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
- (5) Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran Rp.135.000.000 ,- realisasi sebesar Rp.134.071.090,- atau 99.31%. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah Transparansi Informasi Keuangan Daerah yaitu 1 (satu) Website : *www.dppkdkabbintan.org* dan 4 (empat) media massa Batam Pos, Tanjungpinangpos, Tribun Batam dan Haluan Kepri dan laporan triwulan.
- (6) Kegiatan Peningkatan Manajemen Investasi Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran Rp.159.320.000,- realisasi sebesar Rp.155.677.560 ,- atau 97.71%. Keluaran dari kegiatan ini adalah mendapatkan data yang akurat terhadap jasa giro/bunga deposito bank berupa buku laporan manajemen Investasi Kas Pemerintah Daerah selama 1 Tahun Anggaran. Adapun kegiatan ini adalah berupa penempatan Deposito pada Bank BPR, BNI, BRI, BSM, BTN dan Mandiri dan Penyertaan Modal pada PT. Bank Riau, PD, BPR BINTAN dan PT. Bintan Inti Sukses.
- (7) Kegiatan Rapat-rapat dan koordinasi Pelaksanaan APBD dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 100.000.000,- realisasi

sebesar Rp.97.048.400,- atau 97.05%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Menguatnya koordinasi antar SKPD dalam pelaksanaan sehingga terlaksananya kebijakan pedoman pelaksanaan APBD dan P-APBD, adapun rapat-rapat dan koordinasi dari kegiatan tersebut adalah :

- Permasalahan APBD
- Perubahan APBD
- Penganggaran Tahun 2016
- Permasalahan Penganggaran SKPD se-Kabupaten Bintan
- Penyusunan RKA se-Kabupaten Bintan

Sedangkan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah terwujudnya akuntabilitas dalam pelaksanaan APBD dan P-APBD yang sesuai peraturan Peraturan Perundang-undangan

- (8) Kegiatan Sinkronisasi Data Keuangan Triwulan SKPD dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran Rp.118.500.000,- realisasi sebesar Rp.117.070.900,- atau 98.79%. Terselenggaranya data realisasi keuangan pada 38 SKPD dan BUD yang jumlahnya sama setelah rekonsiliasi secara triwulan. Sehingga tersedianya Data Keuangan Triwulan SKPD yang akurat.
- (9) Kegiatan Verifikasi dan Pelaporan Pengeluaran PPKD dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran Rp.164.600.000,- realisasi sebesar Rp.153.337.600,- atau 93.16%. Keluaran dari kegiatan tersebut adalah Tersedianya laporan bulanan realisasi pendapatan daerah dan Surat Pertanggung jawaban validasi Belanja Bantuan, Belanja Tak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan. Dan hasil yang diperoleh adalah terpenuhinya kelengkapan bukti dan laporan pertanggungjawaban penerimaan daerah, Belanja Bantuan, Belanja Tak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan.

- (10) Pendapatan Daerah dan Belanja Bantuan pada PPKD sebagai berikut :
- Verifikasi Penerimaan dan Pelaporan PPKD 12 (dua belas) Laporan.
 - Verifikasi Pengeluaran dan Pelaporan PPKD 12 (dua belas) Laporan.
- (11) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran Rp82.000.000,- realisasi sebesar Rp.81.606.900,- atau 99.52%. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran adalah Laporan Realisasi Anggaran Prognosis Semesteran I Pemerintah Kabupaten Bintan 1 (satu) Laporan Pemerintah Kabupaten Bintan / 38 SKPD se-Kabupaten Bintan.
- (12) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran Rp134.938.900,- realisasi sebesar Rp.133.902.300,- atau 99.23%. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran adalah sebagai berikut :
- Laporan Arus Kas 1 (satu) Laporan.
 - Laporan Realisasi Anggaran 1 (satu) Laporan Pemerintah Kabupaten Bintan / 38 SKPD se-Kabupaten Bintan.
 - Neraca 1 (satu) Laporan Pemerintah Kabupaten Bintan/ 38 SKPD se-Kabupaten Bintan Kabupaten Bintan SKPD se-Kabupaten Bintan.
 - Buku Laporan Keuangan Un-Audited dan Audited.
- (13) Kegiatan Workshop Akuntansi dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran Rp.100.000.000,- realisasi sebesar Rp.66.932.800 ,- atau 66.93%. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan

tersebut adalah Peningkatan Tenaga Akuntansi Keuangan Daerah pada 38 (tiga puluh delapan) SKPD dalam rangka peningkatan keterampilan dan pemahaman pada 38 (tiga puluh delapan) orang Pejabat Penatausahaan Keuangan. Kegiatan workshop Akuntansi ini dilaksanakan dalam rangka Workshop Akuntansi tentang Implementasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrua dengan Aplikasi SIMDA terbaru dengan Narasumber dari BPKP Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau.

- (14) Kegiatan Optimalisasi Tim tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran Rp.155.700.000,- realisasi sebesar Rp.142.684.400,- atau 91.64% Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah Terlaksananya Pertemuan Tim TPTGR untuk menangani kasus-kasus kerugian daerah. Kegiatan TP-TGR ini meliputi kegiatan Menghimpun data dari Inspektorat Kabupten Bintan , Melakukan Rapat Koordinasi di Sekretariat TP-TGR dan melakukan sidang TP-TGR untuk memutuskan Sidang Majelis TP-TGR . Tim Majelis TP-TGR diketuai oleh Sekretaris daerah Kabupaten Bintan. Dan telah dilaksanakan Rapat antara lain :
- Rapat Sekretariat TP-TGR tanggal 05 Juni 2015
 - Rapat Majelis TP- TGR tanggal 20 Nopember 2015
 - Rapat Sekretariat TP-TGR tanggal 01 Desember 2015
 - Rapat Majelis TP-TGR tanggal 04 Desember 2015
- (15) Kegiatan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran Rp.281.200.000,- realisasi sebesar Rp.229.524.100 ,- atau 81.62% Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya Aplikasi SIMDA BMD dan SIMDA Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan. Menyusun Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bintan yang disajikan dengan Aplikasi SIMDA Keuangan.

- (16) Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran Rp.69.552.600,- realisasi sebesar Rp.57.430.100 ,- atau 82.57%. Keluaran dan hasil kegiatan ini adalah Dokumen KUA Tahun Anggaran 2016, Dokumen PPAS Tahun Anggaran 2016, Dokumen Perubahan KUA Tahun Anggaran 2015 dan Dokumen Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2015.
- (17) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Bupati Bintan tentang Penjabaran APBD dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran Rp.1.591.132.350,- realisasi sebesar Rp.1.504.427.490,- atau 94.55%. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah :
1. Tersedianya Buku Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Buku Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 28 Oktober 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 untuk dipedomani SKPD.
 2. Tersedianya Buku Peraturan Bupati Bintan Nomor 86 Tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Buku Peraturan Bupati Bintan Nomor 26 Tahun 2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 untuk dipedomani SKPD.
- (18) Kegiatan Peningkatan Manajemen PPK - BLUD Dana Bergulir dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Daerah dengan alokasi anggaran Rp.146.000.000,- realisasi sebesar Rp.113.297.000,- atau 77.60%. Keluaran yang diperoleh dari kegiatan ini adalah Aparatur Pengelolaan Keuangan PPK BLUD Dana Bergulir :

1. Pengurus PPK BLUD Dana Bergulir diberikan Pemahaman
 2. Keterampilan Tupoksi dalam mengelola Dana Bergulir sehingga terdapat peningkatan mutu pengelolaan (manajemen) BLUD
 3. Laporan Keuangan PPK BLUD Dana Bergulir
 4. Laporan Keuangan Audited 2014 dan Laporan Semester dan laporan Semester I. II dan III Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)
- (19) Kegiatan Pembinaan Atas Penerapan Sistem Akuntansi pemerintah Berbasis Akrual pada SKPD dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran Rp.135.500.000,- realisasi sebesar Rp.76.441.486 ,- atau 56.41%. Keluaran dan hasil dari kegiatan ini adalah Tersedianya Tenaga Akuntansi Pemerintah Keuangan yang handal pada 38 SKPD. Dan Terlaksananya Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintah. Bekerjasama dengan BPKP Pusat dan BPKP Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau DPPKD melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan atas penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual dan menindak lanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan kinerja dan efektifitas dalam implementasi SAP berbasis Akrual TA. 2014 dan 2015 (Triwulan III).

Capaian kinerja urusan Administrasi Keuangan Tahun 2015 sebagai berikut:

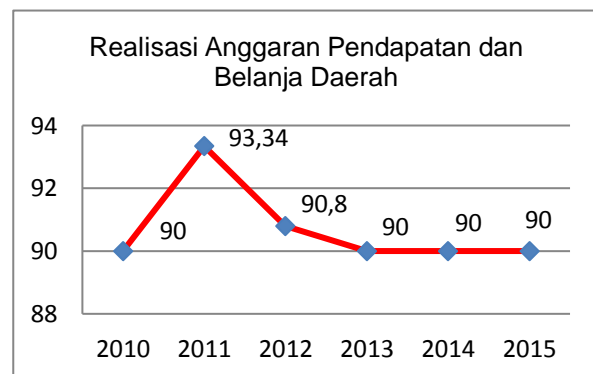
1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

NO	TAHUN	ANGKA PENCAPAIAN
1	2013	WTP
2	2014	WTP

Peran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi target WTP. Tahun 2015 telah mencapai 100% dengan opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2014. Kegiatan yang menunjang indikator ini adalah Program Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Pagu 134.938.900,- dan Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah Rp. 135.000.000,-.

2. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

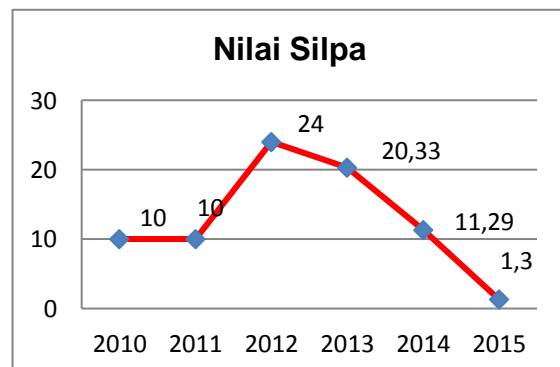
NO	TAHUN	ANGKA PENCAPAIAN
1	2014	90,00
2	2015	90,00



Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah stabil dari Tahun 2010-2015. Ditahun 2015 Realisasi Pendapatan Rp.772,82 milyar dari anggaran sebesar Rp.881,93 M atau mencapai 87,65% . Sedangkan Realisasi belanja 840,12 milyar dari anggaran sebesar Rp. 1.003,70 M atau mencapai 93,70%. Kegiatan yang menunjang indikator ini adalah Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Pagu 134.938.900,- dan Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah Rp.135.000.000,-

3. Nilai Silpa

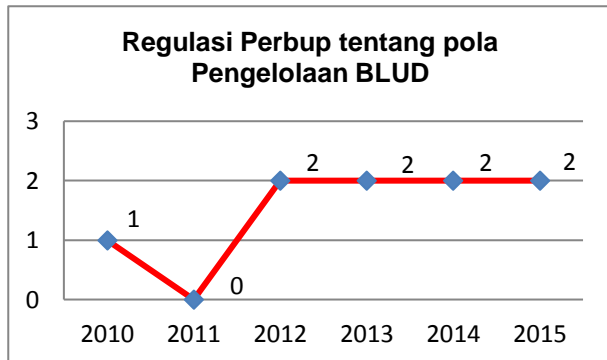
NO	TAHUN	ANGKA PENCAPAIAN
1	2014	11.29
2	2015	1.3



Nilai Silpa Tahun 2015 sebesar Rp. 13,68 M atau atau mencapai 1,3% dari Total Belanja sebesar Rp.1,003 M Kegiatan yang menunjang indikator ini adalah Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Pagu 134.938.900,- dan Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah Rp. 135.000.000,-.

4. Regulasi Perbup tentang pola Pengelolaan BLUD

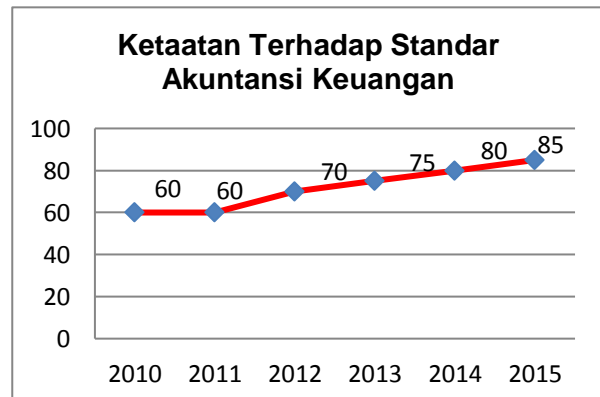
NO	TAHUN	ANGKA PENCAPAIAN
1	2014	2
2	2015	2



Regulasi Perbup tentang Pola Pengelolaan BLUD mencapai target 2 (dua) Peraturan Bupati yaitu ; 1. Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten Bintan dan; 2. Peraturan Bupati tentang Pedoman Akuntansi BLUD Dana Bergulir. Kegiatan yang menunjang indikator ini adalah Kegiatan Peningkatan Manajemen PPK-BLU Dana Bergulir Pagu Rp.146.000.000,-.

5. Ketaatan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan

NO	TAHUN	ANGKA PENCAPAIAN
1	2014	80
2	2015	85

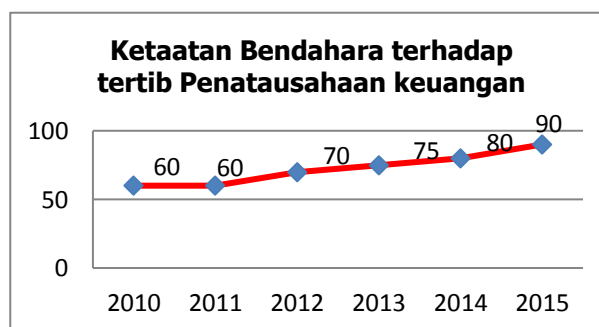


Ketaatan seluruh 38 SKPD terhadap Standart Akuntansi Keuangan mencapai 85% karena disamping opini WTP pihak BPK RI juga masih melaporkan adanya 6 (enam) temuan hasil pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti.

Guna mendukung tercapainya sasaran ini dilaksanakan dengan kegiatan Pembinaan Atas Penerapan Sistem Akuntansi pada SKPD dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 135.500.000,- dan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pagu Rp.281.200.000,-

6. Ketaatan Bendahara terhadap tertib Penatausahaan keuangan

NO	TAHUN	ANGKA PENCAPAIAN
1	2014	80
2	2015	90



Ketaatan seluruh bendahara 38 SKPD, 7 (tujuh) BLUD, Bendahara Pembantu pada 15 (lima belas) Puskesmas dan 36 (tiga puluh enam) Bendahara Desa terhadap tertib penatausahaan keuangan daerah mencapai 90% karena disamping opini WTP, pihak BPK RI juga masih melaporkan adanya 2 (dua) temuan hasil pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti. Kegiatan yang menunjang indikator ini adalah Rapat-rapat dan koordinasi Pelaksanaan APBD Pagu Rp.100.000.000,-

7. Opini DPRD terhadap Laporan Keuangan Akhir Masa Tugas

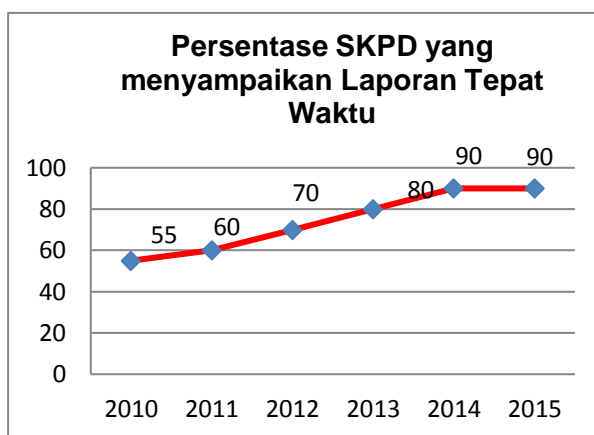
Opini DPRD terhadap Laporan Keuangan akhir masa tugas Kepala Daerah dapat diterima dengan baik

Kegiatan yang menunjang indikator ini adalah Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Pagu Rp.65.000.000,- dan Penyusunan

Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Rp.20.268.800,-.

8. Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Tepat Waktu

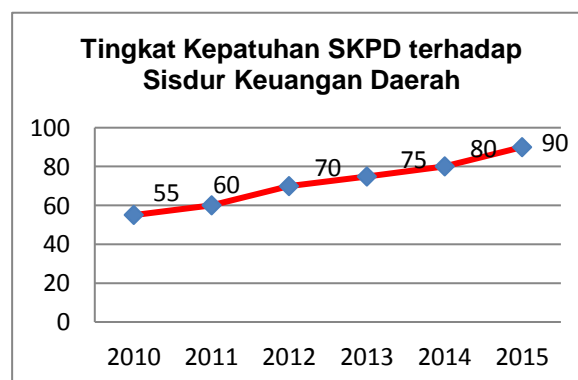
NO	TAHUN	ANGKA PENCAPAIAN
1	2014	90
2	2015	90



Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Tepat Waktu mencapai 90% dikarenakan beberapa SKPD masih terlambat melaksanakannya. Kegiatan yang menunjang indikator ini dilaksanakan kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Rp.82.000.000,- dan Sinkronisasi Data Keuangan Triwulan SKPD Pagu Rp. 118.500.000,-.

9. Tingkat Kepatuhan SKPD terhadap Sisdur Keuangan Daerah

NO	TAHUN	ANGKA PENCAPAIAN
1	2014	80
2	2015	90

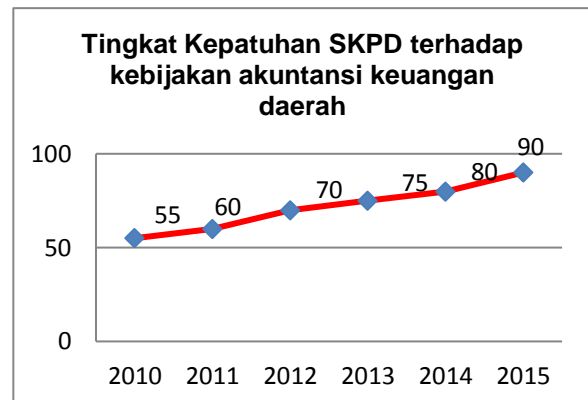


Tingkat kepatuhan 38 SKPD terhadap Sisdur Keuangan Daerah mencapai 90% karena beberapa SKPD masih belum sepenuhnya

mematuhi ketentuan yang berlaku. Untuk menunjang indikator ini dilaksanakan kegiatan Penyusunan Standart Analisa Belanja (SAB) Pagu Rp. 121.200.000,- dan Penyusunan Standar Satuan Harga Pagu Rp.184.080.000,-.

10. Tingkat Kepatuhan SKPD terhadap kebijakan akuntansi keuangan daerah

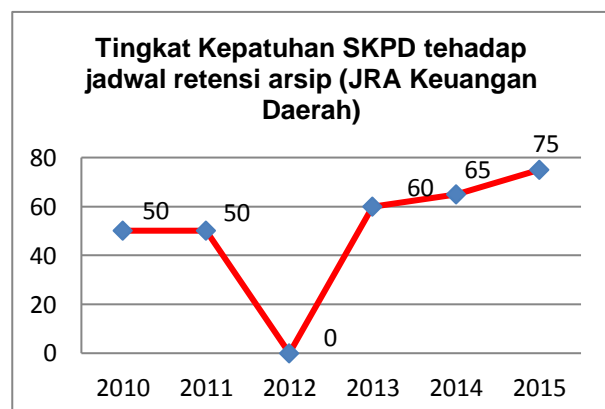
NO	TAHUN	ANGKA PENCAPAIAN
5	2014	80
6	2015	90



Tingkat kepatuhan 38 SKPD terhadap Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah mencapai 90 % karena beberapa SKPD masih belum sepenuhnya mematuhi ketentuan yang berlaku. Untuk menunjang indikator ini dilaksanakan kegiatan Workhsop Akuntansi Pagu Rp.100.000.000,-.

11. Tingkat Kepatuhan SKPD terhadap jadwal retensi arsip (JRA Keuangan Daerah)

NO	TAHUN	ANGKA PENCAPAIAN
1	2014	65
2	2015	75



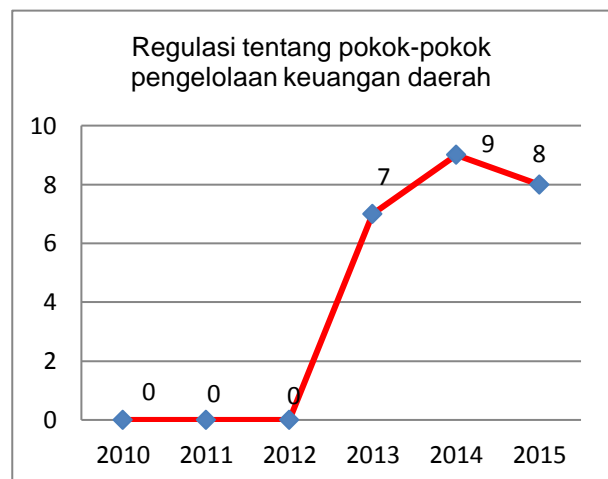
Tingkat Kepatuhan SKPD terhadap Jadwal Retensi Arsip (JRA) mencapai 75% karena masih belum sepenuhnya mematuhi ketentuan pengarsipan dan retensi arsip. Namun tidak ada kegiatan yang menunjang indikator ini.

12. Peraturan Bupati tentang JRA

Tidak ada realisasi dalam indikator ini, karena kegiatan ini tidak di anggarkan pada Kantor DPPKD Kabupaten Bintan dan kedepan kegiatan ini lebih cocok ke Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bintan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

13. Regulasi tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah

NO	TAHUN	ANGKA PENCAPAIAN
1	2014	9
2	2015	9



Regulasi tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah tahun 2015 telah ditetapkan 2(dua) Perda dan 6(enam) Perbup yakni :

a. **2 (dua) Perda** yakni :

1. Perda tentang Perubahan APBD Tahun 2015
2. Perda tentang APBD tahun 2016

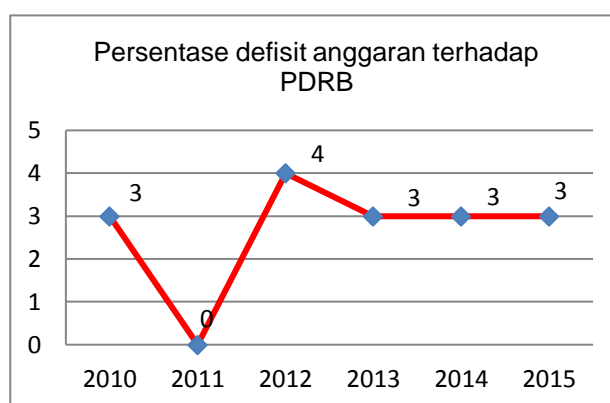
b. **6 (enam) Perbup** yakni

1. Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2015
2. Perbup tentang Penjabaran APBD Tahun 2016
3. Perbup tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Bintan

4. Perbup tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBD Kabupaten Bintan
 5. Perbup tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Bintan
 6. Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016
- Program kegiatan yang menunjang kegiatan ini adalah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD dengan Pagu Rp.1.591.132.350,-.

14. Persentase defisit anggaran terhadap PDRB

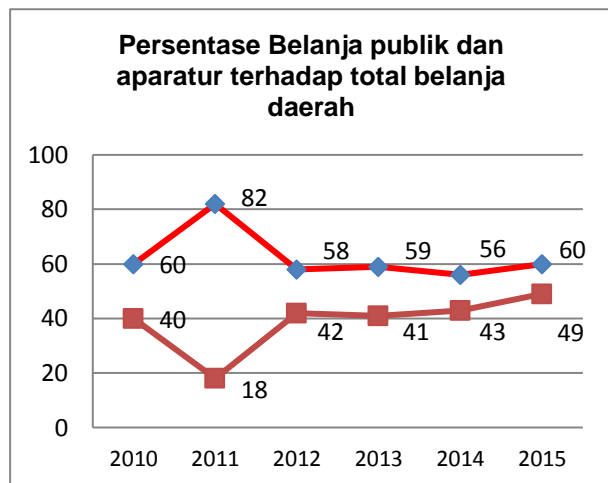
NO	TAHUN	ANGKA PENCAPAIAN
5	2014	3
6	2015	3



Persentase defisit Anggaran terhadap PDRB, perbandingan Defisit Anggaran tahun 2015 sebesar Rp.189,718,000,000,- dibandingkan dengan PDRB tahun 2015 sebesar Rp.3.957.890.000 adalah 4,79%, sedangkan perbandingan defisit anggaran perubahan tahun 2015 sebesar Rp.121.765.858.004,04 dibandingkan dengan PDRB anggaran perubahan tahun 2015 menurun menjadi 3.07 %, namun defisit P-APBD Tahun Anggaran 2015 ini masih dapat ditutupi dengan SILPA Tahun berjalan. Untuk mendukung tercapainya sasaran indikator Persentase Defisit Anggaran terhadap PDRB adalah Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS Rp.69.552.600,-.

15. Persentase Belanja publik dan aparatur terhadap total belanja daerah

NO	TAHUN	ANGKA PENCAPAIAN
1	2014	56:43
2	2015	60:49

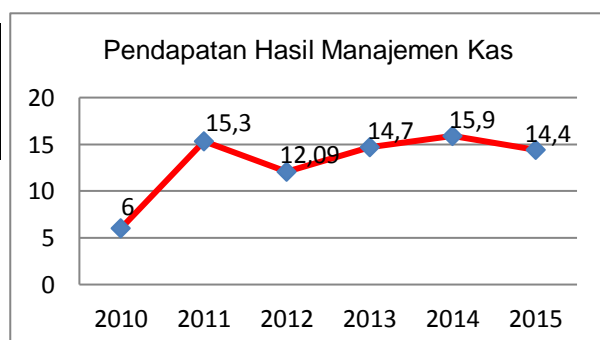


Persentase Belanja Publik dan Aparatur terhadap total belanja daerah adalah total Belanja Pegawai / Aparatur dalam Perubahan APBD Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 493.071.720.762,04 atau sebesar 49,13% dibandingkan dengan total belanja pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2014, sedangkan total belanja publik adalah sebesar Rp. 510.628.411.378,00,- atau sebesar 50.87% dibandingkan dengan total belanja pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 1.003.700.132.140,04

Untuk menunjang indikator ini kegiatan yang dilaksanakan adalah Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS Rp.69.552.600,-.

16. Pendapatan Hasil Manajemen Kas

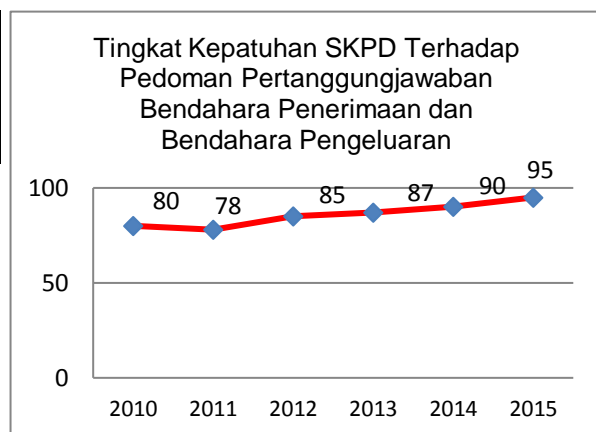
NO	TAHUN	ANGKA PENCAPAIAN
1	2014	15,9
2	2015	14,4



Pendapatan hasil manajemen kas pada tahun anggaran 2015 melampaui target yaitu sebesar Rp. 14.425.017.450 terdiri dari Pendapatan Bunga Deposito 13.188.67.809.61 dan Penerimaan Jasa Giro Rp. 1.236.339.640,-. Hal ini disebabkan karena meningkatnya angka APBD Kabupaten Bintan serta meningkatnya suku bunga Bank. Untuk mendukung indikator kinerja ini kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan Peningkatan Manajemen Investasi Daerah dengan Pagu Rp. 159.320.000 ,-.

17. Tingkat Kepatuhan SKPD Terhadap Pedoman Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

NO	TAHUN	ANGKA PENCAPAIAN
1	2014	90
2	2015	95



Tingkat kepatuhan seluruh Bendahara 38 SKPD, 2 (dua) BLUD, Bendahara Pembantu pada 12 (dua belas) Puskesmas dan 36 (tiga puluh enam) Bendahara desa terhadap pedoman pertanggungjawaban Bendahara, Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran mencapai 95% karena disamping opini WTP, pihak BPK RI juga masih melaporkan adanya 11 (sebelas) temuan hasil pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti. Untuk mendukung indikator kinerja ini adalah kegiatan Verifikasi dan Pelaporan Pengeluaran PPKD Rp. 164,600,000 dan Optimalisasi Tim Tuntutan Bendahara dan Tuntutan Ganti Rugi Rp.155.700,000

b. Permasalahan dan Solusi

Berubahnya regulasi atau peraturan yang menyebabkan kita wajib mengikuti perkembangan dalam rangka penyesuaian kualitas dan ketepatan waktu penyampaian laporan Diharapkan seringnya melaksanakan koordinasi dan sosialisasi/workshop kepada SKPD serta menyiapkan Sumber Daya Manusia (Tim Satgas IT) untuk Aplikasi

2) Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa

a. Pelaksanaan Program

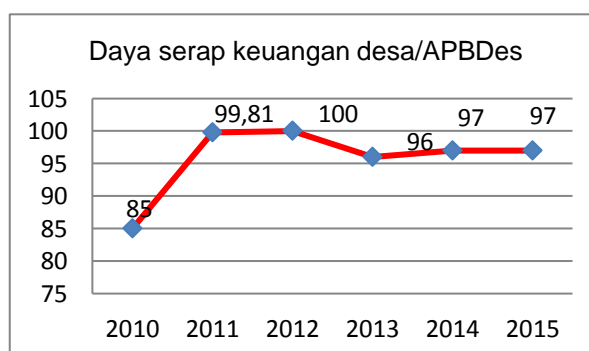
Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 56.700.000,- realisasi sebesar Rp.49.859.000,- atau 87.93%. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. SPJ bulanan / triwulan dari 36 Desa se-Kabupaten Bintan
2. Honorarium Pengesahan SPJ per-Bulan
3. Rekapitulasi realisasi tahunan per-Desa

Capaian kinerja program Tahun 2015 sebagai berikut:

1. Daya serap keuangan desa/APBDes

NO	TAHUN	ANGKA PENCAPAIAN
1	2014	97
2	2015	97



Daya serap keuangan desa melalui mekanisme APBDes pada 36 Desa Tahun 2015 mencapai target sebesar 97% dan tidak terserapnya 3% dari anggaran karena adanya afesiensi yang nantinya akan menjadi Silpa Desa yang dapat digunakan untuk membiayai APBDes tahun

berikutnya. Untuk mendukung tercapainya sasaran ini dengan adanya Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota dalam kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa Rp.56.700.000,-.

2. Persentase desa yang memiliki LKPDes yang baik

NO	TAHUN	ANGKA PENCAPAIAN
1	2014	85
2	2015	92



Persentase 36 Desa yang telah memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Desa yang baik mencapai 92% karena masih terdapat 3 Desa yang terlambat dan belum membuat Laporan Keuangan Pemerintah Desa Tahun 2014. Untuk mendukung tercapainya sasaran ini dengan adanya Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota dalam kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa Rp. 56.700.000,-

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan program dapat berjalan sesuai rencana.

3) Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi

anggaran Rp.144.877.500,- realisasi sebesar Rp.144.458.250,- atau 99.71% Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, bahwa telah dilakukan Sosialisasi kepada wajib pajak di 10 (sepuluh) Kecamatan di wilayah Kabupaten Bintan dengan materi Perda Nomor 1 Tahun 2011 untuk mengingatkan kembali wajib pajak akan kewajibannya untuk menyampaikan SPTPD serta penyetoran pajaknya tepat pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memberi pemahaman kepada wajib pajak yang memiliki Tanah dan bangunan agar dapat segera mendaftarkan objek pajaknya ke DPPKD Kabupaten Bintan.
- b. Sosialisasi juga dilakukan melalui pemasangan X-Banner dengan muatan isi tata cara pendaftaran objek pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang terpasang di kantor Camat, Kantor Desa dan Kantor Kelurahan.
- c. Cetak melalui media brosur berdasarkan jenis pajak yang dipungut di Kabupaten Bintan terdiri atas :
 - 1) Pajak Hotel
 - 2) Pajak Restoran
 - 3) Pajak Hiburan
 - 4) Pajak Reklame
 - 5) Pajak Penerangan Jalan
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan
 - 7) Pajak Parkir
 - 8) Pajak Air Tanah
 - 9) Pajak Sarang Burung Walet
 - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

- d. Cetak Kalender dinding dan duduk untuk sosialisasi pajak PBB dan didistribusikan kepada Wajib Pajak PBB.
- (2) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 133.200.000,- realisasi sebesar Rp. 126.649.600 ,- atau 95.08%. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah Terlaksananya upaya-upaya merealisasikan Pendapatan Daerah dan pengamanan penerimaan daerah yang bersumber dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat Tahun 2015. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi setiap tahunnya. Pada dasarnya kegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti dikarenakan kegiatan ini terlaksana berdasarkan Undang-undang pelaksanaan Rekonsiliasi oleh kementerian ESDM RI untuk DBH Sumber Daya Alam (Minyak Gas dan Pertambangan Umum) terbagi 4 triwulan diantaranya:
- Triwulan I dilaksanakan di Propinsi Kepulauan Riau (Batam)
 - Triwulan II dilaksanakan di Propinsi Jawa Barat (Bandung)
- Sedangkan pelaksanaan Rekonsiliasi maupun Rapat Koordinasi untuk DBH Pajak Propinsi dan Pajak PPh Psl. 21, 25, dan 29 serta PBB Migas dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pendapatan Propinsi Kepulauan Riau. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini diantaranya berupa Berita Acara Rekonsiliasi bagian Pemerintah Propinsi dari Kabupaten Bintan pada tahun berjalan terhadap Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang bersumber dari Pusat dan Bagi Hasil Pajak Propinsi yang bersumber dari Propinsi Kepulauan Riau.
- (3) Kegiatan Pendataan dan Penggalian Pajak dan Retribusi Daerah untuk Kec. Bintan Utara, Kec. Teluk Sebong dan Kec. Sri Kuala Lobam dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran Rp.113.580.000,-
realisasi sebesar Rp.110.659.950 ,- atau 97.43%

- (4) Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah tersedianya data yang akurat dan mengetahui sumber-sumber penerimaan pajak dan retribusi daerah. Kegiatan ini meliputi :
- a. Pemeriksaan Lapangan Objek Pajak PBB-P2; Dalam kegiatan Pemeriksaan Lapangan Objek Pajak PBB-P2 yang dilaksanakan pada Tahun 2015 telah dilaksanakan pemeriksaan lapangan di wilayah Kecamatan Bintan Utara, Teluk Sebong dan Seri Kuala Lobam. Pada Tahun 2015 telah dilakukan pemeriksaan Lapangan Objek Pajak PBB P2 yang baru sebanyak 638 Objek Pajak
 - b. Penagihan dan Pemungutan Pajak Daerah ; Adapun Pajak Daerah yang dipungut setiap bulannya terdiri dari Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Sarang Burung Walet, Mineral bukan Logam dan Batuan (Tanah Urug), Pajak Hiburan dan Pajak Reklame. Dengan jumlah penerimaan Pajak daerah berjumlah Rp.335.4568.310,-
 - c. Penggalan Pajak Daerah; Penggalan Pajak Daerah untuk mencari Wajib Pajak baru dan sumber penerimaan pajak yang belum tergal. Pada Tahun 2015, penggalan pajak yang telah dilakukan berupa Pendataan dan penagihan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pendaftaran Wajib PBB-P2 baru, dengan melakukan pemeriksaan lapangan Objek PBB-P2 yang akan didaftarkan dengan pengambilan titik koordinat serta memfoto objek pajak
 - d. Pengawasan dan Penertiban Objek Pajak Daerah dilakukan pada Pajak Reklame yang tidak ada ijin dan habis masanya.
 - e. Pendataan Objek Pajak Reklame Tetap; Pada Tahun 2015 telah terdata Objek Pajak Reklame Tetap sebanyak 34 (Tiga Puluh Empat) objek pajak dengan jumlah Pajak Reklame yang dapat

ditagih sebesar Rp. 59.739.238,- (Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah)

- f. Penelitian Objek Pajak BPHTB; Pada tahun 2015, Pajak BPHTB yang telah dilakukan penelitian verifikasi lapangan objek pajak BPHTB oleh UPT DPPKD Tanjung Uban, dan telah dibayar pajaknya oleh Wajib Pajak dengan jumlah penerimaan pajak BPHTB selama tahun 2015 sebesar Rp.1.173.384.870,- (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah)
- (5) Kegiatan Pendataan dan Penggalan Pajak dan Retribusi untuk Kec. Bintan Timur, Kec. Tambelan, Kec. Bintan Pesisir dan Kec. Mantang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran Rp.114.958.000,- realisasi sebesar Rp.111.831.294,- atau 97.28%. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah terpenuhinya data Wajib Pajak Daerah dan Potensi Penerimaan Daerah di Kec. Bintan Timur, Kec. Bintan Pesisir, Kec. Mantang dan Kec. Tambelan. Jumlah Wajib Pajak di wilayah kerja UPT Kijang sebanyak 74 Wajib Pajak sebanyak 72 diantaranya berada di Kecamatan Bintan Timur diantaranya berada di Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Bintan Pesisir dan 1 Wajib Pajak dan di Kecamatan Tambelan 1 Wajib Pajak. Pelaksanaan penggalan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di wilayah kerja UPT kijang tidak seluruhnya diterima dan disetorkan Wajib Pajak melalui UPT Pendataan dan Penagihan Kijang, beberapa Wajib Pajak menyetorkan langsung ke kantor induk DPPKD Kabupaten Binta. Kecamatan Bintan Pesisir Penyetoran Pajaknya langsung ke Kantor Induk DPPKD Kab. Bintan Pelaksanaan Observasi terhadap Wajib Pajak Restoran sebanyak 13 Objek Pajak di Kec. Bintan Timur,

Pelaksanaan Evaluasi terhadap hasil observasi Wajib Pajak Restoran sebanyak 7 Wajib Pajak

- (6) Kegiatan Pendataan dan Penggalian Pajak dan Retribusi Daerah untuk Kec. Gunung Kijang, Kec. Teluk Bintan dan Kec. Toapaya dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran Rp.114.394.520,- realisasi sebesar Rp.110.518.878,- atau 96.61% Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah terpenuhinya data wajib pajak daerah dan potensi penerimaan daerah di Kecamatan Gunung Kijang, Toapaya dan Teluk Bintan, yakni :
- (7) Kegiatan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) dengan alokasi anggaran Rp.312.650.000,- realisasi sebesar Rp.234.782.100,- atau 75,09% Keluaran ataupun hasil kegiatan ini adalah Terwujudnya Wajib Pajak dan Penyampaian Pajak Terhutang, bahwa dari hasil kegiatan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) yang dilaksanakan masih terdapat Wajib Pajak yang melaporkan pajak terhutang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut dapat diasumsikan dikarenakan ketidaktahuan wajib pajak dan kesengajaan wajib pajak. Adapun jumlah wajib pajak yang telah dilakukan verifikasi/pemeriksaan pajak tahun 2015 sejumlah 9 (sembilan) wajib pajak self assessment yaitu :
 - 1) PT. Alam Indah Bintan / Hotel Nirwana
 - 2) PT. Bintan Lagoon / Hotel Sendona / Golf
 - 3) PT. Pulau Nikoi
 - 4) PT. Riau Island Development
 - 5) PT. Bintan Hotel Angsana Bintan
 - 6) PT. Bintan Hotel / Banyan Tree
 - 7) PT. Asmara Life Style
 - 8) PT. Straits CM. Village (Club Med Hotel)
 - 9) PT. Bintan Natural SPA Centre

- (8) Kegiatan Pemutakhiran Basis Data PBB P2 dan Pemetaan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran Rp.393.190.000,- realisasi sebesar Rp.323.404.413,- atau 82,25%. Keluaran atau hasil kegiatan ini adalah Terpenuhinya Pemeliharaan Data base di 3 Kecamatan pada Tahun Anggaran 2015
- (9) Kegiatan Asistensi SIMDA Pendapatan Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran Rp.70.000.000,- realisasi sebesar Rp.45.036.500,- atau 64,34% Keluaran dan hasil kegiatan ini adalah Terciptanya Penata usahaan dan Pelaporan Penerimaan Pajak Daerah dan Aplikasi SIMDA.
- (10) Kegiatan Aplikasi e-SPTPD dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.219.704.000, realisasi sebesar Rp.395.263.600,- atau 80,34% . Keluaran dan hasil dari kegiatan ini adalah Terciptanya Penatausahaan dan Pelaporan Penerimaan pajak Daerah.
- (11) Kegiatan Penyampaian SPPT PBB P2 dan Evaluasi Penerimaan PBB P2 dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran Rp.492.000.000,- realisasi sebesar Rp.395.263.600 ,- atau 80,34%. Keluaran dan hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Penyampaian SPPT PBB dan Monitoring serta evaluasi Penerimaan PBB. Adapun Laporan Realisasi Penyampaian SPPT dan Realisasi Penerimaan PBB adalah sebagai berikut:

Tabel 4.32 : Jumlah dan Realisasi Penyampaian SPPT di Tiap Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah SPPT	Realisasi Penyampaian	Sisa
1	Bintan Timur	12.734	6.768	3.966
2	Mantang	1.448	673	775
3	Bintan Pesisir	2.386	1.810	576
4	Gunung Kijang	6.807	4.432	2.375
5	Toapaya	9.792	4.731	5.061
6	Bintan Utara	8.253	5.754	2.634
7	Seri Kuala Lobam	5.538	3.104	2.434
8	Teluk Sebong	6.961	5.653	1.308
9	Teluk Bintan	5.589	3.102	2.487
10	Tambelan	1.225	980	245
		60.733	39.007	21.726

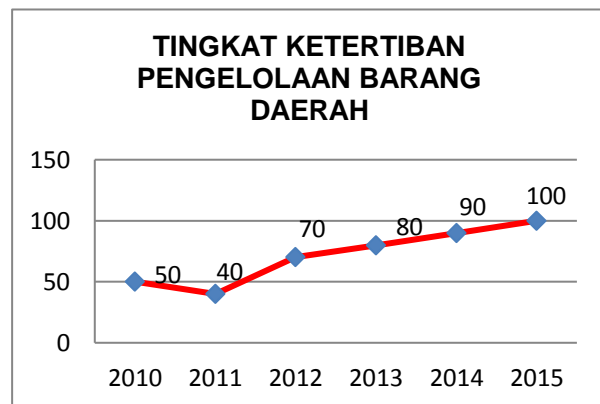
Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Bintan

Dari Tabel Laporan Penyampaian SPPT PBB di atas bahwa jumlah SPPT yang dicetak 60.733 telah disampaikan ke wajib pajak sebanyak 39.007 sisa SPPT yang tidak tersampaikan sebanyak 21.726.

Capaian kinerja program tahun 2015 sebagai berikut:

1. Tingkat ketertiban pengelolaan barang daerah

NO	TAHUN	ANGKA PENCAPAIAN
5	2014	90
6	2015	100



Tahun 2015 Tingkat ketertiban pengelolaan barang daerah mencapai 100% dari target 100% yang ditetapkan. Pengelolaan Aset daerah berdasarkan Permendagri Nomor 17 tahun 2007 meliputi proses perencanaan kebutuhan dan penggunaan barang, penatausahaan sampai dengan tuntutan ganti rugi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, sehingga dalam pelaksanaan dan penyampaian laporan asset dapat disajikan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan, beberapa hambatan yang menjadi belum

optimalnya pencapaian target ketertiban pengelolaan barang daerah adalah pengelolaan dan penggunaan barang di SKPD, pelaporan aset yang belum tepat waktu oleh beberapa SKPD menjadi salah satu factor keterlambatan penyajian laporan aset pemerintah daerah hal ini dipengaruhi oleh tingkat kemampuan (kompetensi aparatur) yang belum maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat kemampuan (kompetensi) aparatur yang belum maksimal, hal ini dilihat dari ketetapan waktu didalam menyampaikan Laporan Semester dari SKPD meskipun masih ada SKPD yang masih terlambat menyampaikan. Untuk mendukung indikator kinerja ini dilaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Aset Daerah

2. Opini Kewajaran Nilai Aset Daerah

NO	TAHUN	ANGKA PENCAPAIAN
1	2014	WTP
2	2015	WTP

Opini kewajaran Nilai Aset Daerah tahun 2015 untuk pelaporan Aset Pada Tahun 2014 mmperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian opini tertinggi terhadap laporan keuangan dan aset di daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI, salah satunya adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Bintan dapat menyajikan neraca aset dengan baik. Untuk laporan aset 2015 Pmerinta Kabupaten Binta juga menargetkan Opini Kewajaran Nilai Aset WTP. Untuk mendukung indicator kinerja ini dilaksanakan kegiatan Verifikasi dan Pelaporan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik daerah Rp.181.940.500,-.

3. Persentase Aset Daerah yang telah dinilai

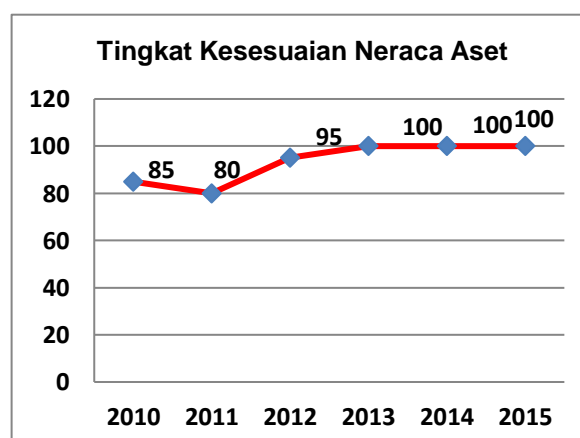
NO	TAHUN	ANGKA PENCAPAIAN
1	2014	100
2	2015	100



Untuk aset tanah yang disertifikasi data dari Bidang Aset yang tersimpan di brankas sejumlah **113** (seratus tiga belas) Surat Tanah. Untuk mendukung indikator kinerja ini dilaksanakan kegiatan Pengamanan Aset Daerah dengan pagu Rp. 91.000.000,- Terpenuhinya target Pemerintah Kabupaten BIntan terhadap beberapa Aset meliputi Penilaian terhadap Rumah Negara, Kendaraan Dinas Operasional yang akan dihapuskan dan beberapa aset yang belum memiliki Nilai Perolehan , telah dilakukan dengan cara revaluasi /appraisal, dan Pembentukan Tim Penilai Aset Pemerintah Kabupaten Bintan. Untuk mendukung tercapainya indikator kinerja ini dilaksanakan kegiatan Penghapusan Barang Daerah dengan Pagu Rp.199.047.500,-.

4. Tingkat Kesesuaian Neraca Aset

NO	TAHUN	ANGKA PENCAPAIAN (%)
1	2014	100
2	2015	100

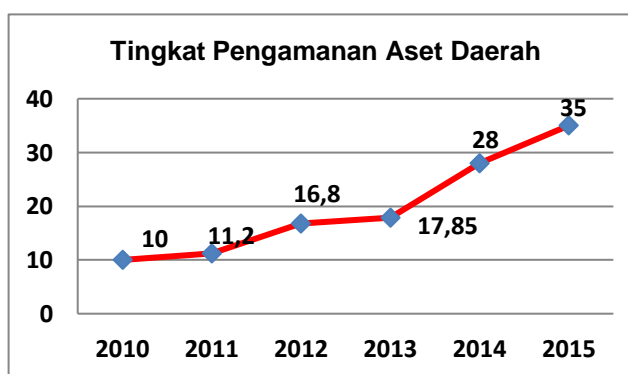


Pencapaian dan pemenuhan target tingkat kesesuaian neraca asset telah terpenuhi atau 100% seiring dengan hasil opini terhadap laporan keuangan dan asset Pemerintah Kabupaten Bintan yang memperoleh penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Untuk menunjang indikator kinerja ini dilaksanakan kegiatan Pembinaan Kinerja Pengurus Barang dan Penyimpan Barang daerah Rp.108.000.000,-

5. Tingkat Pengamanan Aset Daerah

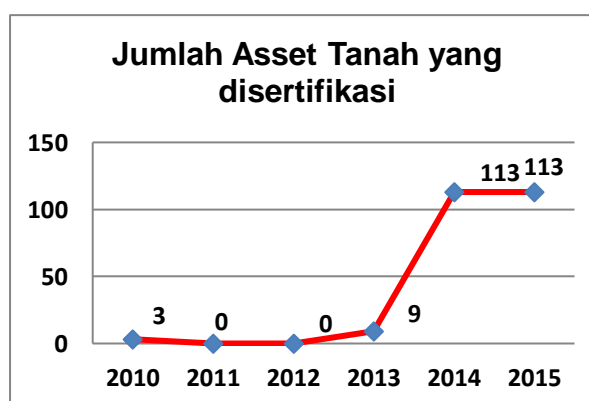
NO	TAHUN	ANGKA PENCAPAIAN
1	2014	28
2	2015	35



Tingkat Pengamanan Aset daerah sudah dilaksanakan, dimana sejak Tahun 2011 sudah dilaksanakan kegiatan Pengamanan Aset untuk Tanah milik Kabupaten Bintan dibuat Plank Aset untuk tanah Milik Kabupaten Bintan sejumlah dan 551 Persil 35% sudah dibuat Plank Aset dan selain itu juga terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan telah diasuransikan. Sehingga pengamanan untuk asset daerah sudah mencapai tingkat pengamanan yang baik.

6. Jumlah Asset Tanah yang disertifikasi

NO	TAHUN	ANGKA PENCAPAIAN
1	2014	113
2	2015	113



b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Adanya pergantian Penyimpan Barang dan Pengurus Barang di SKPD sehingga tingkat pengelolaan barang masih belum tertib.
- b. Proses transisi pencatatan barang dari manual ke Aplikasi masih ada kendala dikarenakan minimnya pengetahuan pengurus dan penyimpan barang terhadap aplikasi dan sistem yang sering terjadi error, dan
- c. Inventarisasi Aset yang belum tertib karena pergerakan aset yang tidak terdeteksi.

2) Solusi

- d. Adanya kebijakan setiap SKPD dalam hal menunjuk penggantian Penyimpan Barang dan Pengurus Barang serta melakukan pembinaan untuk menertibkan pelaporan inventaris barang tepat pada waktunya.
- e. Kegiatan bimbingan teknis pengurus dan penyimpan barang masih harus dilakukan demi pemantapan pengetahuan pengurus dan penyimpan barang.

4) Program Manajemen Aset Daerah

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Penghapusan Barang Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran Rp.199.047.500,- realisasi sebesar Rp.169.870.150,- atau 85.34% Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah Data Barang inventarisasi milik Pemerintah Kabupaten Bintan yang akan dihapuskan. Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan penghapusan barang daerah adalah :

1. Keputusan Bupati Bintan Nomor 507/XII/2015 tanggal 04 Desember 2015 tentang Penghapusan Kendaraan Dinas Milik

Pemerintah Kabupaten Bintan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan dari Daftar Inventaris Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2015.

2. Keputusan Bupati Bintan tentang Penghapusan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Bintan pada Kecamatan Bintan Pesisir dari Daftar Inventaris Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2015.

3. Hasil Penilaian / Appresial dari Jasa Konsultan terhadap Rumah Dinas Golongan III Milik Pemerintah Kabupaten Bintan serta Asset asset yang dinilai untuk memperoleh Nilai Perolehan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Sarwono, Indrastuti & rekan. Rumah Dinas Golongan III sebanyak 7 (tujuh) Unit :

- 1) Rumah Dinas Golongan III Jalan Haji fisabilillah Km. 8 Tanjungpinang
- 2) Rumah Dinas Golongan III Jalan RE. Martadinata Tanjungpinang
- 3) Rumah Dinas Golongan III Jalan Brigjen Katamso Tanjungpinang
- 4) Rumah Dinas Golongan III Jalan Brigjen Katamso Tanjungpinang
- 5) Rumah Dinas Golongan III Jalan Brigjen Katamso Tanjungpinang
- 6) Rumah Dinas Golongan III Jalan Brigjen Katamso Tanjungpinang
- 7) Rumah Dinas Golongan III Jalan MT. Haryono Tanjungpinang

Asset Milik Pemerintah Kabupaten Bintan yang dinilai untuk memperoleh Nilai Perolehan sebanyak 3 (tiga) unit:

- 1) Musholla di KM .15 Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang
- 2) Rumah Jaga di KM.15 Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang
- 3) WC di Km. 15 Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang

- (2) Kegiatan Pembinaan kinerja pengurus barang dan penyimpan barang di SKPD dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran Rp.108.000.000,- realisasi sebesar Rp.84.462.300,- atau 78.21% Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (38 SKPD).

Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- Pergantian Penyimpan dan Pengurus Barang pada masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dapat memahami tugas pokoknya masing-masing di dalam pengelolaan barang milik daerah.
 - Telah dilakukannya sosialisasi, bimbingan dan pembinaan terhadap penyimpan dan pengurus barang di 38 SKPD di Kabupaten Bintan
 - Ruang lingkup pembinaan meliputi pembinaan terkait pengelolaan dan penata usahaan aset milik Pemerintah kabupaten Bintan antara lain Pengelolaan aset tetap (Penataan tertib Kartu Inventaris Ruangan, prlebelan/pemberian stiker (kode) barang, penyimpanan barang dan pengelaan aset Milik Pemerintah Kabupaten Bintan yang ada di SKPD
- (3) Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Aset Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran Rp.234.000.000,- realisasi sebesar Rp.188.145.850,- atau 80,40% Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah dan pelaporan Sensus Barang Milik Daerah dapat dilakukan dengan benar untuk menghasilkan data barang yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari bertempat di Hotel Hermes Agro Kawal dengan peserta dari

38 SKPD. Nara sumber dari Kementerian Dalam Negeri Jakarta dan DPPKD Kabupaten Bintan.

- (4) Kegiatan Pengamanan Asset Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran Rp.91.000.000,- realisasi sebesar Rp.88.780.200,- atau 97.56% Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah Pemasangan Plank Asset bukti kepemilikan Pemerintah Kabupten Bintan sebanyak 25(dua puluh lima) plank. Plank Asset tersebut di pasang di sekolah-sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
- (5) Kegiatan Asuransi Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Bintan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran Rp.242.821.500,- realisasi sebesar Rp.219.608.788,- atau 90.44% Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah tersedianya Jasa Premi Asuransi Kendaraan Dinas Milik Pemerintah untuk masa 1 (satu) Tahun sebanyak 28 (dua puluh delapan) Unit terdiri dari 25 unit Kendaraan Dinas Milik Anggota Dewan dan 3 unit kendaraan dinas operasional SKPD.
- (6) Kegiatan Pemeliharaan Aset Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran Rp.250.500.000,- realisasi sebesar Rp.245.165.000,- atau 98,07% Keluaran dari kegiatan ini adalah Perbaikan Asset/Barang Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Bintan. Berupa Perbaikan dan Pengecatan Kendaraan Dinas. Service kendaraan sejumlah 18 Unit Kendaraan Dinas, Penggantian Suku Cadang berjumlah 16 unit Kendaraan Dinas dan Pengecatan Kendaran sejumlah 4 Unit Kendaraan Dinas
- (7) Kegiatan Verifikasi dan Pelaporan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi

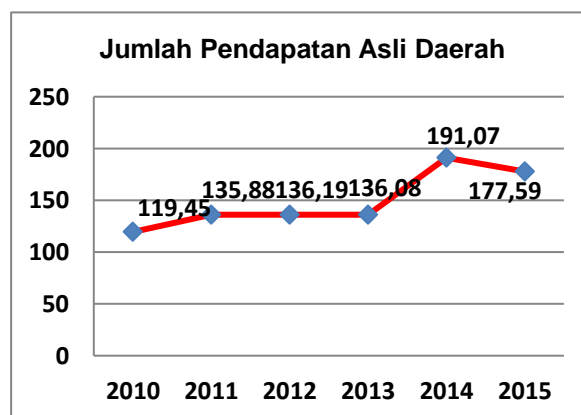
anggaran Rp.181.840.500,- realisasi sebesar Rp.161.431.200,- atau 88,78% Keluaran dari hasil kegiatan ini adalah Tertibnya pengelolaan barang milik daerah. Kegiatan ini meliputi :

- Penyelesaian rekonsiliasi laporan pengadaan barang 38 SKPD
- Dapat menyajikan laporan penggunaan barang di 38 SKPD
- Dapat menyajikan laporan barang milik daerah tepat waktu yang meliputi (Neraca aset milik Pemerintah Kabupaten Bintan, Daftar realisasi pengadaan barang, buku Inventaris barang, kartu inventaris ruangan, buku induk inventaris Pemerintah Kabupaten Bintan)
- Tersajinya laporan (Neraca) aset 38 SKPD dan 1 Laporan Neraca Aset Daerah.

Capaian kinerja program adalah sebagai berikutsebagai berikut:

1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah

NO	TAHUN	ANGKA PENCAPAIAN (Milyar Rp.)
1	2014	191.07
2	2015	177.59

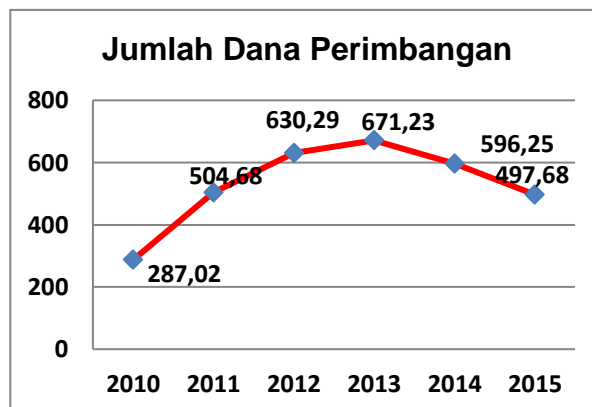


Pendapatan Asli Daerah untuk Tahun 2015 mencapai Rp.177.688.655.378.12 dari target 176.628.479.855.00,-. terdiri dari Pajak daerah Rp.137.520.270.491.77,-, Retribusi Daerah Rp.9.081.792.543.00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp.13.411.204.438,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp.17.675.387.905,35. Untuk menunjang indikator ini

kegiatan yang dilaksanakan adalah Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Daerah Rp.133.200.000,-

2. Jumlah Dana Perimbangan

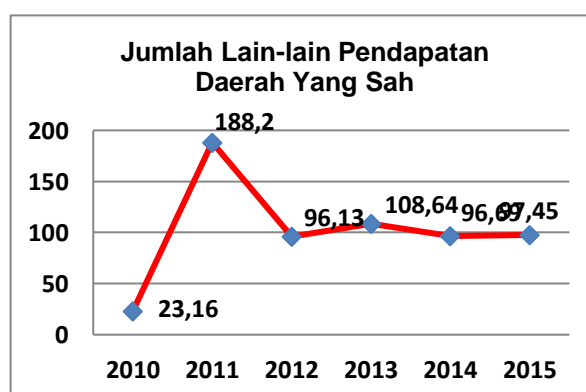
NO	TAHUN	ANGKA PENCAPAIAN
1	2014	596.25
2	2015	497.68



Jumlah Dana Perimbangan Tahun 2015 target Rp.528.653.805.619,- dan realisasi sebesar Rp.497.680.184.131,- yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak Rp.142.922.567.131,- Dana Alokasi Umum Rp.290.035.577.000,- dan Dana Alokasi Khusus Rp.64.722.050.000,-. Untuk menunjang indikator ini kegiatan yang dilaksanakan adalah Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Daerah Rp.133.200,000.

3. Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

NO	TAHUN	ANGKA PENCAPAIAN
5	2014	96.69
6	2015	97.45

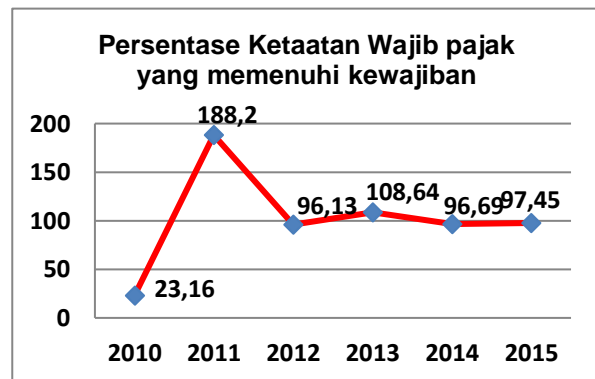


Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah untuk Tahun 2015 dengan target Rp.176.651.988.662,- dan realisasi Rp.97.455.86.381,- yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

Rp.45.281.828.656,- Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus Rp.48.536.973.000,- serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya Rp.3.637.064.725,-. Untuk menunjang indikator ini kegiatan yang dilaksanakan adalah Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Daerah Rp.133.200,000,-.

4. Persentase Ketaatan Wajib pajak yang memenuhi kewajiban

NO	TAHUN	ANGKA PENCAPAIAN
1	2014	45.73
2	2015	70



Dari 67.754 Wajib Pajak yang patuh untuk memenuhi kewajibannya hanya 70%. Selainnya kurang memenuhi kewajibannya rata-rata dari Wajib Pajak PBB P2. Hal ini disebabkan penyampaian SPPT PBB yang tidak tersampaikan. Untuk menunjang indikator ini dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah Rp.144.877.500,-

5. Jumlah Objek pajak dan Retribusi

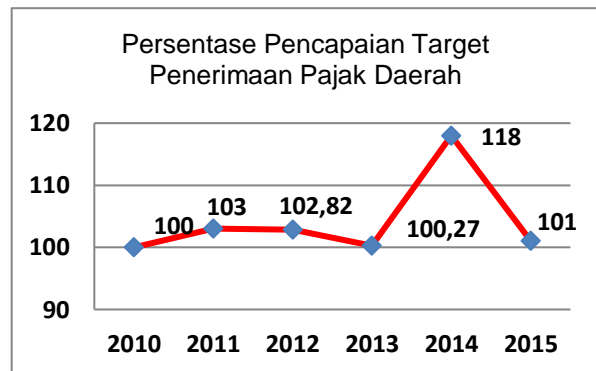
NO	TAHUN	ANGKA PENCAPAIAN
1	2014	11/25 objek
2	2015	11/25 objek

Jumlah objek pajak dan retribusi daerah berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah jenis 11 pajak yang dipungut dan Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Umum ada **10 jenis**; Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha ada **10 jenis**, Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang

Retribusi Perizinan tertentu terdiri dari **5 jenis**. TOTAL 25 Retribusi. Untuk mendukung indikator ini kegiatan yang dilaksanakan yakni Pendataan dan Penggalian Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Kec. Bintan Utara, Teluk Sebong dan Seri Kuala Lobam Rp.135.580,000 Pendataan dan Penggalian Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Kec. Bintan Timur, Tambelan, Bintan Pesisir dan Mantang Rp.114.958,000 Pendataan dan Penggalian Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Kec. Gunung Kijang, Teluk Bintan dan Toapaya Rp.114.394,520,-

6. Persentase Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah

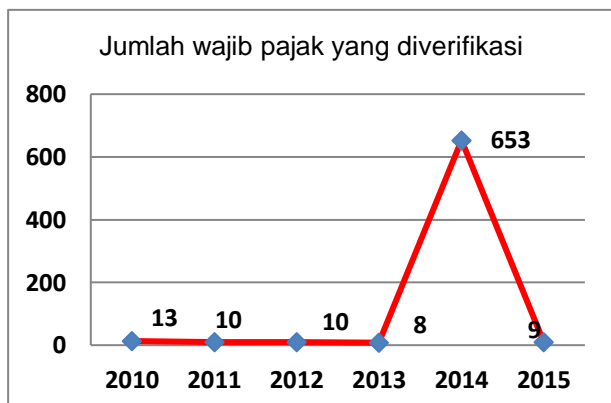
NO	TAHUN	ANGKA PENCAPAIAN
1	2014	118
2	2015	101



Penerimaan Pajak Daerah untuk Tahun 2015 realisasi mencapai Rp.137.520.270.491,77 dari target sebesar Rp.135.368.000.000,- atau **101%**. Untuk menunjang indikator ini dilaksanakan kegiatan Optimalisasi Pendapatan Daerah Rp.312.650,000,-

7. Jumlah wajib pajak yang diverifikasi

NO	TAHUN	ANGKA PENCAPAIAN
1	2014	653
2	2015	9



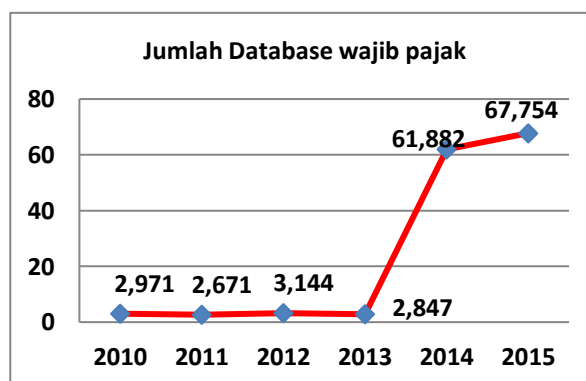
Jumlah Wajib Pajak yang diverifikasi untuk Tahun 2015 sebanyak **9** WP. Untuk tercapainya sasaran ini dilaksanakan kegiatan Optimalisasi Pendapatan Daerah Rp.312.650,000,-.

8. Jumlah pajak dan retribusi yang dikaji tarifnya

Tahun 2015 tidak dilakukan kajian Tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk langkah kedepannya untuk tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sedangkan Retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Jadi indikator ini idak dapat diukur.

9. Jumlah Database wajib pajak

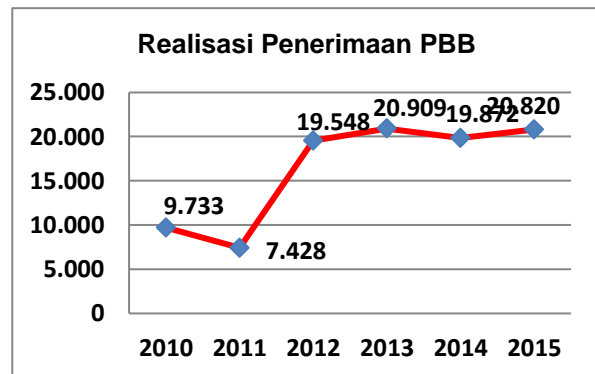
NO	TAHUN	ANGKA PENCAPAIAN
1	2014	61,882
2	2015	67.754



Jumlah Wajib Pajak sampai Tahun 2015 meningkat menjadi 67.754 karena adanya penambahan data base Wajib Pajak PBB. Untuk tercapainya sasaran ini dilaksanakan dengan kegiatan Asistensi SIMDA Pendapatan Daerah Pagu Rp.70.000.000 dan Aplikasi e-SPTPD Pagu 219.704.000,-.

10. Realisasi Penerimaan PBB

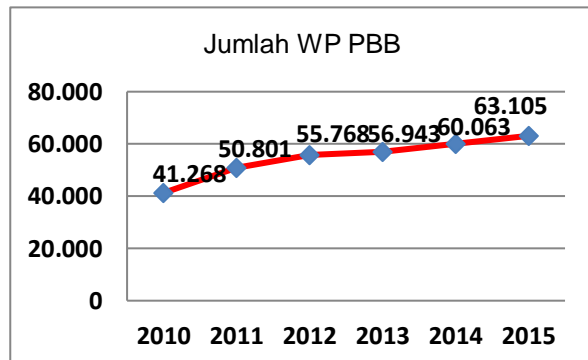
NO	TAHUN	ANGKA PENCAPAIAN
1	2014	19,872
2	2015	20.820



Realisasi penerimaan PBB Tahun 2015 **Rp.20.820.615.982,-** dari target PBB P2 Rp.21 M,- didukung dengan kegiatan Penyampaian SPPT PBB dan evaluasi Penerimaan PBB dengan Pagu sebesar Rp.492.000.000,- dan Pemutakhiran Basis Data PBB P2 dan Pemetaan Rp. 393.190.000,-.

11. Jumlah WP PBB

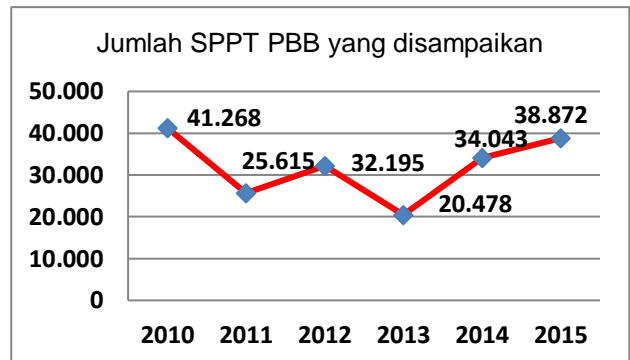
NO	TAHUN	ANGKA PENCAPAIAN
1	2014	60,063
2	2015	63.105



Untuk jumlah WP PBB dari jumlah SPPT PBB yang dicetak massal + data baru Tahun 2015 **63.105** OP. Untuk tercapainya sasaran ini dilakukan kegiatan Penyampaian SPPT PBB dan evaluasi Penerimaan PBB dengan Pagu sebesar Rp.492.000.000,- dan Pemutakhiran Basis Data PBB P2 dan Pemetaan Rp.393.190.000,-.

12. Jumlah SPPT PBB yang disampaikan

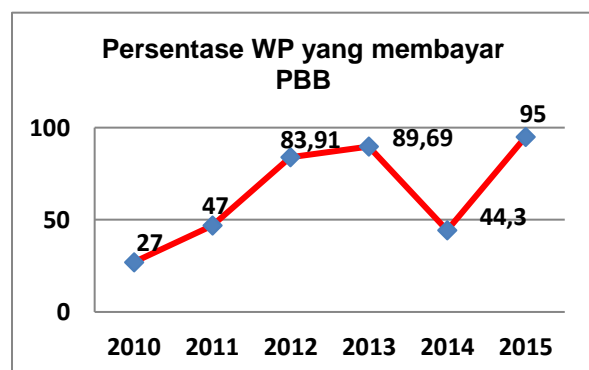
NO	TAHUN	ANGKA PENCAPAIAN
1	2014	34,043
2	2015	38.872



Jumlah SPPT PBB yang disampaikan terealisasi sebanyak **38.872** SPPT PBB dari target 60.733 SPPT PBB, kondisi ini disebabkan oleh wajib pajak yang tidak ditempatkan, namun ada juga SPPT PBB yang masih di petugas kelurahan tapi belum disampaikan ke DPPKD Bintan. Untuk tercapainya sasaran ini dilakukan kegiatan Penyampaian SPPT PBB dan evaluasi Penerimaan PBB dengan Pagu sebesar Rp. 492.000.000,- dan Pemutakhiran Basis Data PBB P2 dan Pemetaan Rp. 393.190.000,-.

13. Persentase WP yang membayar PBB

NO	TAHUN	ANGKA PENCAPAIAN
5	2014	44.30
6	2015	95



Persentase WP yang membayar PBB untuk Tahun 2015 dengan realisasi WP yang membayar PBB dari 38.872 SPPT PBB yang tersampaikan sebesar **95%**. Atau berjumlah 37,199 SPPT PBB. Untuk menunjang indikator di atas dengan kegiatan Penyampaian SPPT PBB

dan evaluasi Penerimaan PBB dengan Pagu sebesar Rp. 492.000.000,- dan Pemutakhiran Basis Data PBB P2 dan Pemetaan Rp. 393.190.000,-.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Masih adanya wajib Pajak yang tidak mengerti dan memahami peraturan perundang-undangan tentang Pajak Daerah, hal tersebut dikarenakan ketika dilakukan sosialisasi Wajib Pajak Tidak hadir.
- b. Wajib Pajak tidak bisa dan enggan mengisi SPTPD nya sendiri, sehingga sering terlambat dalam penyampaian SPTPD tersebut ke DPPKD Kabupaten Bintan
- c. Wajib pajak tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan Pajak daerah khususnya Pajak Restoran, dimana Wajib Pajak tidak menjalankan usahanya dengan menggunakan Bill setiap transaksi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 39 Tahun 2012.
- d. Wajib Pajak menghindari pembayaran Pajak BPHTB, sehingga harga transaksi Penjualan Bumi (Tanah) dan Bangunan yang diisi dalam SSPD BPHTB, untuk di validasi tidak dengan harga sebenarnya cenderung dibawah NOPTKP, maupun NJOP.
- e. Sebagian wajib pajak tidak terbuka terhadap data yang dimiliki sehingga pelaporan pajak yang disampaikan tidak dapat diyakini.
- f. Data wajib pajak serta data objek pajak bumi dan bangunan yang ada di sistem terdapat perbedaan dengan yang ada di lapangan.
- g. Adanya Wajib pajak self assessment pada pelaku usaha menengah ke bawah tidak memenuhi ketentuan dalam melaksanakan kewajiban untuk membuat pencatatan

penerimaan sehingga dasar pelaporan pajak terhutang tidak dapat diyakini kebenarannya.

- h. Wajib pajak restoran jenis rumah makan dan kedai kopi yang merupakan pelaku usaha menengah ke bawah tidak mau memungutkan pajak 10% dari konsumen dan tidak memiliki pencatatan pendapatan secara manual sehingga untuk menghitung pajak terhutang tidak berdasarkan tarif 10% dari omset.
- i. Banyak SPPT yang tidak dapat disampaikan dikarenakan antara lain : (1) banyak Objek pajak berupa tanah kosong yang tidak diketahui pemilik objek pajak sehingga petugas kesulitan untuk menyampaikan SPPT PBB, (2) Pemilik Pajak banyak berdomisili di luar pulau Bintan, (3) Banyak SPPT yang tidak sesuai dengan Data Subjek dan Objek Pajak, (4) Banyak SPPT yang double.
- j. Masih terdapatnya objek PBB yang belum dilakukan pembetulan.

2) Solusi

- a. Melakukan sosialisasi dengan cara petugas mendatangi wajib pajak door to door untuk menyampaikan sosialisasi tentang tata cara, prosedur dan kewajiban-kewajiban Wajib Pajak terhadap Pajak Daerah.
- b. Petugas Penagihan mendatangi Wajib Pajak dan langsung memberitahu Wajib Pajak tentang tata cara pengisian SPTPD.
- c. Petugas memberikan petunjuk tentang pelaksanaan Pajak daerah, dengan menggunakan Rekapitulasi penjualan harian sebagai dasar penghitungan Pajak Daerah yang harus disetorkan oleh Wajib Pajak setiap bulannya
- d. Memberikan penjelasan terhadap wajib pajak tentang Pajak BPHTB, serta meminta PPAT untuk dapat menyampaikan harga transaksi jual beli dengan harga transaksi sebenarnya, serta petugas melakukan verifikasi lapangan terhadap objek pajak

yang akan diperjualbelikan, untuk mengetahui kesesuai antara keadaan fisik objek pajak dengan harga transaksi.

- e. Dilakukan pengawasan penerimaan pajak secara periodik pada wajib pajak dengan tindakan pemeriksaan secara keseluruhan bagi wajib pajak self assessment.
- f. Melaksanakan penelitian lapangan atas kebenaran data serta menilai wajar terhadap nilai tanah dan bangunan.
- g. Menambah jumlah SDM sebagai Pemeriksa Pajak dan Penilai
- h. Melakukan pendekatan kepada wajib Pajak secara persuasif dengan memberikan pemahaman dalam pemungutan pajak restoran dan membantu untuk mempermudah pencatatan pendapatan wajib pajak dengan memberikan alat bantu yang bisa merekam omzet perhari seperti Mesin Kasir (Cah Register).
- i. Melaksanakan rekonsiliasi data setiap bulan dengan petugas pungut dan RT terhadap perkembangan penyampaian SPPT PBB dan dengan melakukan Pemutakhiran data PBB sehingga meminimalisir jumlah SPPT yang salah dan double.
- j. Perlu dilakukan pembetulan terhadap objek PBB P2 yang belum dilakukan pembetulan dengan melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data PBB – P2 dengan maksud diharapkan data objek PBB P2 Kabupaten Bintan lebih akurat dan SPPT PBB P2 untuk masing-masing wilayah pemekaran sudah sesuai dengan NOP per wilayah dan pemekaran pada Desa.

4.1.10.4. Urusan Kepegawaian

1) Program dan Kegiatan Kelompok Konversi (rutin)

a. Pelaksanaan Program

- (1) Program dan Kegiatan yang termasuk kedalam kelompok konversi (rutin) adalah program dan kegiatan dimana keluaran dari kegiatan-kegiatan tersebut tersedianya segala keperluan-

keperluan kesekretariatan yang terdiri dari 4 program dan 17 kegiatan dengan total alokasi anggaran untuk belanja konversi sebesar Rp.1.385.840.100 dan total realisasi anggaran sebesar Rp.1.302.020.366 atau 93.95%. Dari 17 kegiatan tersebut, terdapat 1 (satu) kegiatan yang di drop / tidak dilaksanakan dengan alasan efisiensi anggaran yaitu Kegiatan Raker Kepegawaian Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan yang terdapat pada Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur. Sementara hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yang mendukung tugas-tugas kesekretariatan. Program dan kegiatan rutin tersebut secara fisik telah terlaksana secara tuntas (terrealisasi 100%) dengan rata-rata serapan anggaran untuk masing-masing kegiatan adalah 90%.

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan kegiatan pada program-program yang terdapat pada kelompok konversi tidak terdapat permasalahan dan kendala yang berarti sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

2) Program Pendidikan Kedinasan

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Diklat Prajabatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.068.967.116 dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.019.685.912 (95.39%), merupakan kegiatan dengan keluaran (output) terlaksananya Diklat Prajabatan bagi CPNS dari Tenaga Honorer K2 dan CPNS dari Pelamar Umum dengan target jumlah peserta sebanyak 132 CPNS yang terdiri dari CPNS dari Tenaga Honorer K2 sebanyak 92 orang (gol III = 39 orang ; gol II = 51 orang ; gol I = 2 orang), CPNS dari pelamar umum sebanyak 23 (golongan III) orang dan Dokter formasi khusus sebanyak 17

orang (golongan III). Pelaksanaan Diklat Prajabatan untuk CPNS dari Tenaga Honorer K2 mengacu pada Peraturan Kelapa Lembaga Administrasi Negara (Perka LAN) Nomer 18 Tahun 2014 yaitu dilaksanakan secara klasikal selama kurang lebih 2 (dua) minggu. Sedangkan pelaksanaan untuk CPNS dari pelamar umum golongan III dan Dokter kategori khusus mengacu pada Perka LAN nomor 15 Tahun 2015 yaitu dilaksanakan secara klasikal selama 17 (tujuh belas) hari dan non klasikal selama kurang lebih 3 (tiga) minggu. Hasil (outcome) yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kompetensi dasar bagi CPNS yang telah mengikuti diklat prajabatan dengan target sebanyak 132 orang. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik yaitu dengan realisasi fisik 100% dan serapan anggaran sebesar 95.39%. Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja kompetensi dasar para CPNS.

- (2) Kegiatan Bimtek Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.172.536.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.100.988.560 (58.53%), merupakan kegiatan dengan keluaran (output) terlaksananya Bimtek Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan target jumlah peserta sebanyak 40 peserta. Bimtek ini diikuti oleh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dan dilaksanakan selama 4 (empat) hari kerja. Hasil (outcome) yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya kompetensi teknis penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi PNS yang telah mengikuti Bimtek dimaksud yaitu 40 peserta. Pada Kegiatan Bimtek Penyusunan SKP ini, semula direncanakan diselenggarakan di Hotel. Akan tetapi karena adanya defisit anggaran, maka pada kegiatan bimtek penyusunan SKP terdapat beberapa efisiensi anggaran yaitu efisiensi pada belanja perjalanan dinas, sewa ruang

pertemuan dan belanja makanan dan minuman kegiatan. Sehingga serapan anggaran dari kegiatan ini hanya 58.53%, akan tetapi kegiatan bimtek tersebut tetap dilaksanakan dengan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja “kompetensi teknis umum para PNS”

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan kegiatan pada Program Kedinasan tidak terdapat permasalahan dan kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

3) Program Peningkatan Administrasi dan Mutasi Kepegawaian Daerah

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Pelaksanaan Mutasi dan Kepangkatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.564.000.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.515.061.340 (91.32%), merupakan kegiatan dengan keluaran (output) jumlah Pegawai yang mengurus kenaikan pangkat dengan target sebanyak 600 PNS dan terlaksananya Penyelenggaraan Baperjakat mutasi yaitu sekitar 400 PNS. Proses pengurusan kenaikan pangkat dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu kenaikan pangkat periode April dan kenaikan pangkat periode Oktober. Target dari kegiatan ini adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Sementara itu, Baperjakat dilaksanakan setiap akan diadakan mutasi baik pejabat maupun pelaksana, untuk waktunya tidak dapat ditentukan dan bersifat rahasia. Rata-rata jumlah frekuensi Baperjakat tiap tahunnya berbeda-beda tergantung dari kondisi dan kebutuhan akan pegawai. Adapun hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terbitnya Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat untuk 600 PNS, Penempatan PNS sesuai dengan kompetensinya yaitu

400 PNS. Realisasi dari kegiatan ini adalah 457 PNS yang mendapat SK Kenaikan Pangkat dan Baperjakat sebanyak 13 kali. Secara fisik kegiatan ini telah terealisasi 100% dengan serapan anggaran sebesar 91.32%. Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja "Efektifitas pengambilan keputusan kenaikan pangkat PNS".

- (2) Kegiatan Penataan SIMPEG Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.84.486.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.78.478.914 (92.89%), merupakan kegiatan dengan keluaran (output) terlaksananya updating data kepegawaian (PNS dan Honorer) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dengan target sebanyak 4 dokumen DUK dan Surat Keputusan (SK) PTT/Tenaga Honorer. Kegiatan ini meliputi pemutakhiran (updating) data-data kepegawaian melalui formulir isian pegawai pada Sistem Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang akan dituangkan kedalam Dokumen DUK dan penerbitan SK PTT/Tenaga Honorer. Sementara itu, hasil (outcome) yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya akurasi data kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan yaitu sebanyak 4 Dokumen DUK dan terpenuhinya kebutuhan persyaratan administrasi PTT/Tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan berupa SK PTT/Tenaga Honorer. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini telah terealisasi secara tuntas (100%) yaitu dengan 4 Dokumen DUK yang terbit dan 726 SK untuk Tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Adapun serapan anggaran dari kegiatan ini adalah sebesar 92.89%. Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja "Efektifitas pengambilan keputusan demosi, mutasi dan promosi jabatan PNS".

- (3) Kegiatan Seleksi Calon Praja IPDN dan Taruna STTD yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 120.178.300 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 84.592.689 (70.39%), merupakan kegiatan dengan keluaran (output) Jumlah calon Praja IPDN dan Taruna STTD yang lulus seleksi dengan target sebanyak 5 calon Praja IPDN/Taruna STTD. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi para lulusan SLTA untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi yaitu IPDN dan STTD. Agar lulusan SLTA di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan lebih mudah melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi, maka pada tahun 2015 ini Pemerintah Kabupaten Bintan membuka peluang dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) yang ditandai dengan penandatanganan MOU antara Pemerintah Kabupaten Bintan dengan pihak STTD. Adapun peserta seleksi adalah anak-anak lulusan SLTA di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Sementara itu, hasil (outcome) yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan calon praja IPDN dan Taruna STTD yaitu sebanyak 5 Orang. Dari hasil pelaksanaan seleksi calon praja IPDN tahun 2015, untuk Kabupaten Bintan, calon praja IPDN yang dinyatakan lulus sebanyak 1 Praja dan calon Taruna STTD yang dinyatakan lulus sebanyak 3 Taruna. Jumlah calon praja/taruna yang lulus masih berada dibawah target yang telah ditentukan. Secara fisik kegiatan ini telah terealisasi 100% dengan serapan anggaran sebesar 70.39%. Hal ini disebabkan karena mekanisme seleksi untuk calon praja IPDN untuk tahun 2015 terpusat pada Pemerintah Provinsi. Beberapa belanja yang semula dianggarkan untuk proses seleksi calon praja IPDN oleh Kabupaten/Kota, pada tahun 2015 ini diakomodir oleh Pemerintah Provinsi. Kegiatan ini

mendukung capaian indikator kinerja “Efektifitas pengambilan keputusan pengadaan formasi”

- (4) Kegiatan Pelaksanaan Seleksi CPNSD dari Pelamar Umum yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.634.700 dan realisasi anggaran sebesar Rp.18.634.700 (100%), merupakan kegiatan dengan keluaran (outout) terlaksananya seleksi CPNSD dari Pelamar Umum. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi formasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dengan target 100 CPNS. Akan tetapi , setelah dilakukannya konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB, bahwa berdasarkan surat edaran Menteri PAN dan RB Nomor B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tanggal 30 Juni 2015 perihal Penundaan Penambahan Pegawai ASN tahun 2015, diperoleh informasi bahwa Kabupaten/Kota agar menyelesaikan penyusunan analisa jabatan melalui Sistem E-Formasi yang telah diselenggarakan oleh Tim IT Kemenpan-rb. Sementara itu, penyusunan E-Formasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bintan. Proses penyusunan E-Formasi tersebut telah diselesaikan pada akhir tahun 2015 ini. Sehubungan dengan hal tersebut, Kegiatan Pelaksanaan Seleksi CPNSD dari Pelamar Umum ini tidak dapat dilaksanakan dan sisa anggarannya di drop pada Perubahan APBD Tahun 2015. Hal ini menyebabkan target dari keluaran (output) dan hasil (out come) yang dihasilkan ikut berubah. Untuk keluaran (output) dari kegiatan ini berubah menjadi 1 Laporan. Hasil (outcome) dari kegiatan ini adalah terpenuhinya Formasi PNS dari Pelamar Umum yang semula dengan target 100 CPNS diubah menjadi 1 Laporan. Berdasarkan hasil laporan kemajuan program dan kegiatan, Kegiatan Pelaksanaan Seleksi CPNSD dari Pelamar Umum telah terealisasi 100% sesuai dengan kebutuhan

dari kegiatan tersebut. Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja “Efektifitas pengambilan keputusan pengadaan formasi”

- (5) Kegiatan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Elektronik yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.289.570.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.272.881.906 (94.24%), merupakan kegiatan baru yang dianggarkan pada perubahan anggaran tahun 2015. Kegiatan ini sangat diperlukan untuk pemutakhiran data-data PNS. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Kepala BKN Nomor 19 tahun 2015 tanggal 22 Mei 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai negeri Sipil Secara Elektronik Tahun 2015 (e-PUPNS) bahwa seluruh Pemerintah Daerah harus segera melakukan pemutakhiran data data-data PNS dilingkungannya melalui e-PUPNS pada Tahun 2015 dan apabila tidak dilakukan maka proses administrasi kepegawaian tidak akan dilayani oleh BKN. Kegiatan ini memiliki keluaran (output) terlaksananya Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dengan target sebanyak 3500 PNS. Kegiatan ini diawali dengan proses registrasi, dilanjutkan dengan pengisian formulir secara elektronik dan proses verifikasi yang dimulai dari level SKPD, dilanjutkan oleh BKD dan berakhir pada verifikasi BKN. Adapun hasil (outcome) yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya akurasi data PNS di lingkungan Pemerintah kabupaten Bintan yang terdaftar pada SAPK yaitu sebanyak 3500 PNS. Berdasarkan laporan kemajuan program dan kegiatan, kegiatan ini telah dilaksanakan dengan 100%. Realisasi jumlah PNS yang melakukan pemutakhiran data adalah sebanyak 3665 orang. Sementara itu, kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 94.24%. Kegiatan ini

mendukung capaian indikator kinerja “Efektifitas pengambilan keputusan pengadaan formasi”

- (6) Kegiatan Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.69.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.11.762.000,- (17.05%), merupakan kegiatan baru yang dianggarkan pada perubahan anggaran tahun 2015. Kegiatan ini dianggarkan untuk mengantisipasi adanya pengangkatan Tenaga Honorer oleh Kementerian PAN-RB di Tahun 2015 ini. Kegiatan ini memiliki keluaran (output) terlaksananya pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS dengan target 30 orang. Adapun hasil (outcome) yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terpenuhinya formasi kebutuhan tenaga honorer menjadi CPNS yaitu sebanyak 30 orang. Berdasarkan informasi yang diterima dari Kemenpan-rb, bahwa pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS ini belum dapat dilaksanakan karena belum adanya peraturan perundangan (juknis) yang melandasinya. Sehingga kegiatan Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan juga tidak dapat dilaksanakan dengan kata lain secara fisik kegiatan ini hanya terealisasi sebesar 17.78% dengan menyerap anggaran sebesar 17.05%. Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja “Efektifitas pengambilan keputusan pengadaan formasi”

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan kegiatan pada Program Peningkatan Administrasi dan Mutasi Kepegawaian Daerah terdapat sedikit kendala yaitu berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang sering berubah-ubah, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bintan khususnya yang berkaitan dengan pengadaan formasi pegawai, sehingga pelaksanaan kegiatannya tidak dapat berjalan sesuai rencana.

4) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan pemberian penghargaan bagi PNS yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.92.580.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.86.698.720 (93.65%), merupakan kegiatan dengan keluaran (output) terlaksanya pemberian penghargaan bagi PNS dengan target sebanyak 150 PNS. Kegiatan ini diikuti oleh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Penghargaan yang diberikan berupa penghargaan Satya Lancana Karya Satya X Tahun , XX Tahun, XXX Tahun dan penghargaan untuk pegawai teladan golongan I, II, III. Adapun hasil (outcome) yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan penghargaan bagi PNS yaitu sebanyak 150 PNS. Secara fisik kegiatan pemberian penghargaan bagi PNS telah terealisasi 100% dengan penerima penghargaan Satya Lancana Karya Satya sebanyak 181 PNS. Akan tetapi pemberian penghargaan bagi pegawai teladan tidak dapat terealisasi karena sampai pada batas waktu yang ditentukan jumlah usulan untuk masing-masing golongan tidak memenuhi kuota, sehingga tidak dapat dilakukan penyeleksian untuk calon pegawai teladan. Adapun serapan anggaran dari kegiatan ini adalah sebesar 93.65%. Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja "Kepuasan kerja pegawai".
- (2) Kegiatan penanganan kasus-kasus disiplin yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.164.909.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.160.564.160 (97.37%), merupakan kegiatan dengan keluaran (output) terlaksananya penanganan kasus-kasus pegawai dengan target penyelesaian sebanyak 40 kasus pegawai. Kasus-kasus pegawai yang ditangani oleh Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Bintan adalah kasus-kasus disiplin dan kasus-kasus perceraian. Adapun hasil (outcome) yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya efektifitas penanganan kasus-kasus pegawai yaitu sebanyak 40 kasus. Berdasarkan hasil laporan kemajuan program dan kegiatan, kegiatan ini telah dilaksanakan secara maksimal. Pada tahun 2015 ini jumlah kasus yang ditangani sebanyak 27 kasus yang terdiri dari 19 kasus perceraian dan 8 kasus disiplin. Secara fisik kegiatan ini terealisasi 100% dengan serapan anggaran sebesar 97.37%. Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja "Disiplin pegawai"

- (3) Kegiatan pembinaan tugas belajar dan ikatan dinas yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.903.856.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.581.552.299 (64.34%), merupakan kegiatan dengan keluaran (output) terlaksananya pegawai mengikuti tugas belajar dan ikatan dinas dengan target sebanyak 145 orang. Pada kegiatan ini, PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan diberikan dukungan anggaran selama yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar dan ikatan dinas dengan mengajukan proposal terlebih dahulu. Besarnya dukungan anggaran tersebut berbeda sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikutinya. Adapun hasil (outcome) yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kompetensi pegawai yang mengikuti tugas belajar dan ikatan dinas yaitu sebanyak 145 orang. Dari hasil laporan kemajuan program dan kegiatan, kegiatan ini secara fisik telah terlaksana 100%, meskipun realisasi hasilnya hanya 38 orang yang mendapat dukungan anggaran. Hal ini disebabkan terdapat beberapa anggaran yang semula dicadangkan untuk mendukung tugas belajar, ternyata pegawai tersebut telah melampaui batas pemberian bea siswa dan tidak lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru jenjang spesialis Dokter dan sedikitnya peserta

izin belajar yang mengajukan bantuan penelitian. Sehingga serapan anggaran dari kegiatan ini hanya 64.34%. Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja "Kepuasan kerja pegawai".

- (4) Kegiatan pengurusan pensiun pegawai yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.211.310.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.143.728.710 (68.02%), merupakan kegiatan dengan keluaran (output) terlaksananya pengurusan pensiun PNS dengan target sebanyak 28 orang dan terlaksananya pengurusan pemberhentian tenaga honorer daerah dengan target sebanyak 10 orang. Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil berdasarkan dengan surat edaran Kepala BKN Nomor: K.26-30/V.7-3/99 tanggal 17 Januari 2014 tentang Batas Usia Pensiun adalah 58 Tahun. Sementara itu, pengurusan pemberhentian tenaga honorer daerah berdasarkan Peraturan Bupati Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Tenaga Honorer Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, tenaga honorer yang diberhentikan karena telah mencapai usia 56 tahun diberikan uang penghargaan sesuai masa kerja, sedangkan tenaga honorer yang meninggal selain diberikan uang penghargaan sesuai masa kerjanya juga diberikan uang duka. Adapun hasil (outcome) yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan pensiun PNS yaitu sebanyak 28 orang dan meningkatnya efektifitas pelayanan pemberhentian tenaga honorer daerah yaitu sebanyak 10 orang. Berdasarkan hasil dari laporan kemajuan program dan kegiatan, kegiatan pengurusan pensiun ini telah dilaksanakan dengan baik. Realisasi dari pengurusan pensiun ini adalah 41 orang yang terdiri dari 36 PNS pensiun dan 5 tenaga honorer daerah yang yang berhenti karena telah memasuki batas usia kerja. Secara fisik kegiatan ini telah terealisasi 100% dengan

serapan anggaran 68.02%. Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja “Kesejahteraan pegawai”.

- (5) Kegiatan pengurusan kartu pegawai yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.48.808.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.45.470.600 (93.16%), merupakan kegiatan dengan keluaran (output) terlaksananya pengurusan kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik dengan target sebanyak 80 orang. Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE). KPE ini merupakan kartu identitas PNS yang memiliki fungsi sebagai kartu identitas, kartu Askes, kartu TASPEN, kartu Bapertarum dan kartu debit (ATM). Adapun hasil (outcome) yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya efektifitas pengurusan kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik yaitu sebanyak 80 orang. Berdasarkan laporan kemajuan program dan kegiatan, kegiatan pengurusan kartu pegawai telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari realisasi yang dicapai yaitu dari 246 berkas yang diajukan pengurusannya untuk menjadi KPE, telah selesai pengurusannya (terbit KPEnya) sebanyak 246. Secara fisik kegiatan ini telah terealisasi 100% dengan serapan anggaran sebesar 93.16%. Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja “Kesejahteraan pegawai”.
- (6) Kegiatan pengurusan karis dan karsu Pegawai yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.45.736.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.44.262.100 (96.78%), merupakan kegiatan dengan keluaran (output) terlaksananya pengurusan kartu istri dan kartu suami PNS dengan target sebanyak 60 orang. Kartu istri/ kartu suami (karis/karsu) adalah kartu identitas istri/suami PNS yang pemegangnya adalah istri/suami yang sah. Apabila istri/suami

bercerai maka karis/karsu tidak berlaku lagi, namun jika rujuk kembali maka karis/karsu berlaku kembali. Adapun hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatnya efektifitas pengurusan kartu istri dan kartu suami PNS sebanyak 60 orang. Berdasarkan laporan kemajuan program dan kegiatan, kegiatan pengurusan karis dan karsu pegawai telah terealisasi 100%. Hal ini terlihat dari 96 berkas pengusulan karis dan karsu PNS berhasil diselesaikan sebanyak 96 kartu dengan rincian karis sebanyak 33 kartu dan karsu sebanyak 63 kartu. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 96.78%. Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja "Kesejahteraan pegawai"

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan kegiatan pada Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur tidak terdapat permasalahan dan kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

4.1.10.5. Persandian

1) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Pemerintah

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan internal secara berkala dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bintan dengan anggaran sebesar Rp.487.617.060,- dan realisasi sebesar Rp.447.581.200,- atau 91,79%. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksanya pengawasan pemeriksaan internal secara berkala merupakan kegiatan reguler pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan terhadap pengelolaan administrasi pengelolaan keuangan 37 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

- (2) Kegiatan Pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan khusus dan berdasarkan pengaduan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bintan dengan anggaran sebesar Rp.70.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.50.235.000,- atau 71,76%. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan/pemeriksaan khusus yang dilakukan apabila terjadi masalah yang menjadi keresahan di dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
- (3) Pada Tahun Anggaran 2015 telah disusun rencana untuk pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi SPIP SKPD dengan anggaran sebesar Rp.125.000.000,-, yang tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun dengan berjalannya waktu, Pemerintah Kabupaten Bintan mengalami defisit anggaran yang cukup signifikan, sehingga untuk sementara kegiatan SPIP ditunda pelaksanaannya. Hal ini dilakukan karena untuk mengantisipasi defisit anggaran yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Bintan.
- (4) Kegiatan Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bintan dengan anggaran sebesar Rp.131.100.000,- dan realisasi sebesar Rp. 125.594.805,- atau 95,80%, hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemutakhiran data dan tindak lanjut hasil pengawasan yaitu dengan melakukan updating data temuan terhadap data yang sudah ditindaklanjuti. Data temuan tersebut mencakup data Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

- **Persentase jumlah temuan BPK yang ditindak lanjuti.**

Target Tahun 2015 sebesar 100% dan capaian Tahun 2015

adalah sebesar 84,45%. Hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan dalam mencapai indikator sasaran ini adalah :

- SKPD dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI belum dilaksanakan secara tepat waktu.
- Masih kurang efektifnya SKPD dalam menagih kepada pihak ketiga atas temuan kerugian negara/daerah.

- **Persentase jumlah temuan internal yang ditindak lanjuti.**

Target Tahun 2013 sebesar 100% dan capaian Tahun 2013 adalah sebesar 92,4%, untuk target Tahun 2014 yang ditetapkan 100% pencapaiannya hanya sebesar 88,78%. Sedangkan untuk target Tahun 2015 yang ditetapkan 100% pencapaiannya hanya sebesar 88,14%. Hal ini disebabkan akumulasi dari jumlah temuan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2015. Dalam hal ini objek pemeriksaan (SKPD) telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan baik, namun masih ada SKPD dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan belum sesuai dengan rekomendasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan.

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Pemerintah tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan program dapat berjalan sesuai rencana.

2) Program Pembinaan dan Pengawasan Serta Peningkatan Akuntabilitas Pembangunan Daerah

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bintan

dengan anggaran sebesar Rp. 104.900.000,- dan realisasi sebesar Rp.103.007.325,- atau 98,20%. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Pelaksanaan reviu dilakukan terhadap laporan keuangan 38 (tiga puluh delapan) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Reviu dilakukan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pasal 33 ayat 3 diatur bahwa Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

- (2) Kegiatan Evaluasi Pengawasan Pembangunan Fisik dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bintan dengan anggaran sebesar Rp.137.827.000,- dan realisasi sebesar Rp. 123.935.700,-atau 89,92%. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya evaluasi pengawasan pembangunan fisik, yang dilakukan atas hasil pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan, yang berada pada 10 Kecamatan. Dimana dilakukan evaluasi pengawasan/pemeriksaan sebanyak 162 paket pekerjaandengan persentase 100% selesai (162 paket).

Table 4.33 : Jumlah Paket Pekerjaan yang telah di lakukan Evaluasi Pengawasan/ Pemeriksaan

No	Wilayah	Jumlah Paket	Keterangan
1.	Kecamatan Bintang Timur	40	selesai
2.	Kecamatan Bintang Pesisir	3	selesai
3.	Kecamatan Mantang	10	selesai
4.	Kecamatan Tambelan	6	selesai
5.	Kecamatan Gunung Kijang	21	selesai
6.	Kecamatan Seri Kuala Lobam	15	selesai
7.	Kecamatan Toapaya	9	selesai
8.	Kecamatan Teluk Sebong	12	selesai
9.	Kecamatan Bintang Utara	23	selesai
10.	Kecamatan Teluk Bintang	23	selesai
Jumlah		162	

Sumber : Inspektorat Kabupaten Bintang

- (3) Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bintang dengan anggaran sebesar Rp.113.565.000,- dan realisasi sebesar Rp.112.239.634,- atau 98,83%. Hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pengawasan dana terhadap penerima dana BOS sebanyak 124 sekolah, dengan rincian 96 Sekolah Dasar, 27 Sekolah Menengah Pertama, dan 1 (satu) TKN Pembina, yang berada pada 10 Kecamatan.

Tabel 4.34 : Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS

No	Lokasi Wilayah Sekolah	Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS			Keterangan
		TK	SD	SMP	
1	2	3	4	5	6
1	Kecamatan Bintang Timur		18	5	SDN 001, SDN 018 SMPN 1, SMPN 2, SMPN 3, SMPN 4, SMPN 26 Satu Atap
2	Kecamatan Bintang Utara	1	9	3	SDN 001, SDN 002, SDN 003, SDN 004, SDN 005, SDN 006, SDN 007, SDN 008, SDN 009 SMPN 11, SMPN 12, SMPN 13 TKN Pembina Bintang Utara
3	Kecamatan Teluk Sebong		9	4	SDN 001, SDN 002, SDN 003, SDN 004, SDN 005, SDN 006, SDN 007, SDN 008, SDN 009 SMPN 8, SMPN 9, SMPN 10, SMPN 24 Bintan
4	Kecamatan Gunung Kijang		8	3	SDN 001, SDN 002, SDN 003, SDN 004, SDN 005, SDN 006, SDN 007, SDN 008 SMPN 5 Bintang, SMPN 20 Satu Atap, SMPN 27 Satu Atap

5	Kecamatan Teluk Bintang		14	3	SDN 001 s.d. SDN 014 SMPN 6, SMPN 7 Bintang, SMPN 21 Satu Atap
6	Kecamatan Tambelan		9	1	SDN 001, SDN 002, SDN 003, SDN 004, SDN 005, SDN 006, SDN 007 SDN 006 Kelas jauh, SDN 007 Kelas Jauh
7	Kecamatan Seri Kuala Lobam		6	2	SDN 001, SDN 002, SDN 003, SDN 004, SDN 005, SDN 006 SMPN 15, SMPN 16 Bintang
8	Kecamatan Toapaya		6	1	SDN 001, SDN 002, SDN 003, SDN 004, SDN 005, SDN 006 SMPN 17 Bintang
9	Kecamatan Bintang Pesisir		7	3	SDN 001, SDN 002, SDN 003, SDN 004, SDN 005, SDN 006, SDN 004 Kelas Jauh SMPN 18, SMPN 19, SMPN 22 SATAP Mapur)
10	Kecamatan Mantang		10	2	SDN 001, SDN 002, SDN 003, SDN 004, SDN 003 Kelas jauh P.Alang, SDN 003 Belakang Sidi, SDN 004 Telang Besar SDN 004 Telang Kecil, SDN 004 Selat limau, SDN 004 Pulau Sirai SMP SATAP 23 Mantang, SMP 23 SATAP Selat Limau

Sumber : Inspektorat Kabupaten Bintang

- (4) Pengawasan Dana ADD dan DAK Desa Kelurahan Inspektorat Kabupaten Bintang dengan anggaran sebesar Rp.98.625.000,- dan realisasi sebesar Rp. 97.235.450,-atau 98,59%. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan Pengelolaan Dana ADD yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Pengawasan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 1 ayat 11 bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Pengawasan ini dilakukan pada desa-desa yang berada di 10 (sepuluh) Kecamatan di wilayah Pemerintah Kabupaten Bintang.

- (5) Pengawasan Dana PNPM Inspektorat Kabupaten Bintan dengan anggaran sebesar Rp.98.368.000,- dan realisasi sebesar Rp.94.653.350,- atau 96,22%. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan pelaksanaan kegiatan PNPM sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat Dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan, pasal 1 ayat 8 bahwa Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Pengawasan ini dilakukan terhadap 5 (lima) Kecamatan yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
- (6) Pengawasan Pengelolaan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Bintan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bintan dengan anggaran sebesar Rp.81.865.000,- dan realisasi sebesar Rp.80.534.600,- atau 98,37%. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan pengelolaan aset milik daerah sejak Pemerintah Daerah dituntut untuk memiliki kemandirian dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya (otonomi), sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 2 diatur bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan Pengawasan Aset Milik Daerah dilakukan terhadap 10 (sepuluh) Kecamatan yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

Pengawasan Aset ini meliputi aset tetap dan aset lainnya, serta realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2015.

- **Pendapat terhadap Review Laporan Keuangan Pemda** telah tercapai sesuai dengan target.

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan program Pembinaan dan Pengawasan Serta Peningkatan Akuntabilitas Pembangunan Daerah n tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan program dapat berjalan sesuai rencana.

3) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Pemerintah

a. Pelaksanaan Program

- (1) Untuk evaluasi dan Pembinaan LAKIP SKPD tahun 2015 dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bintan dengan anggaran sebesar Rp.120.800.000,- dan realisasi sebesar Rp.119.151.750,- atau 98,64%. Terlaksananya asistensi LAKIP SKPD yang difasilitasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan sampel 12 (dua belas) institusi yaitu Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD), Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Pertambangan dan Energi, Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD), Dinas Koperasi, UKM dan Perindag, Dinas Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP-KB).
- (2) Sedangkan Pengelolaan LP2P dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bintan dengan anggaran sebesar Rp.93.700.000,- dan

realisasi sebesar Rp.92.897.650,-atau 99,14%. Hasil dari kegiatan ini terwujudnya azas akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, melalui pengelolaan LP2P bertujuan agar setiap pelaporan pajak aparatur.

- **Hasil evaluasi Kemenpan/BPKP atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Bintan.**

Hasil Evaluasi Kementerian PAN & RB atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2014 belum dapat diketahui, masih menunggu Laporan Hasil Evaluasinya.

- **Persentase SKPD yang mencapai nilai LAKIP baik.** Target Tahun 2015 sebesar 70% dan capaian Tahun 2015 adalah sebesar 70%. Dalam mencapai indikator sasaran ini, Inspektorat Daerah telah melakukan Evaluasi LAKIP SKPD Kabupaten Bintan melalui Kegiatan Evaluasi dan Pembinaan LAKIP SKPD. Inspektorat telah melakukan sampling terhadap beberapa LAKIP SKPD.

- **Persentase auditor/pemeriksa bersertifikasi,** Target Tahun 2015 sebesar 100% dan capaian Tahun 2015 adalah sebesar 100%. Untuk Peningkatan pengetahuan para pemeriksa, Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan setiap tahunnya akan mengirim pemeriksa untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang bersertifikasi bertujuan untuk peningkatan kemampuan pemeriksa. Hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan dalam mencapai indikator sasaran ini adalah: Terbatasnya kuota (jumlah peserta diklat yang diminta) dalam pelaksanaan diklat sertifikasi untuk jabatan fungsional P2UPD dan Auditor yang dilaksanakan oleh Badan Diklat Kemendagri maupun yang dilaksanakan Badan Diklat BPKP Pusat.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Masih kurangnya tanggapan dari pimpinan SKPD dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan aparat pengawasan;
- b. Kurangnya tenaga pemeriksa yang memiliki kemampuan khusus di bidang pengawasan;
- c. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Solusi

- a. Agar Bupati memberi sanksi tegas bagi SKPD yang tidak mengindahkan/lalai dalam menindak lanjuti rekomendasi dari hasil pemeriksaan aparat pengawas.
- b. Mengirimkan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan latihan guna mendapatkan sertifikasi di bidang pengawasan.
- c. Penambahan sarana dan prasarana guna kelancaran pelaksanaan tugas.

4.1.11. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Keenam** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa adalah sebagai berikut : Jumlah kelompok binaan LPM **1** Kelompok; Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK **1,9**; Jumlah LSM Aktif **43** Lembaga; Posyandu aktif **100%**; Jumlah PKK aktif **665** Kelompok

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Pemberdayaan dan partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Pokok Keluarga Miskin (RASKIN) oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana alokasi anggaran Rp.3.391.711.429 dan realisasi sebesar Rp.3.424.114.628 atau (94,02%). Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat miskin melalui program Pemenuhan Kebutuhan Pokok Keluarga Miskin (RASKIN) sebanyak 5.105 RTS.
- (2) Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Teknologi Tepat Guna (TTG) oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana alokasi anggaran Rp.171.688.000 dan realisasi sebesar Rp.162.289.610 atau (94,53%). Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya penggunaan teknologi tepat guna oleh masyarakat melalui gelar TTG Tingkat Nasional dan Terlaksananya pembuatan 5 alat peraga untuk gelar TTG Nasional.
- (3) Kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana alokasi anggaran Rp.114.184.449, dan realisasi sebesar Rp.110.997.200 atau (97,21%). Hasil Kegiatan ini adalah terlaksananya evaluasi hasil program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat baik dalam partisipasi maupun keswadayaan kegiatan melalui penilaian lomba desa kelurahan dan Terlaksananya lomba Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten Bintan untuk 15 Kelurahan dan 36 Desa.
- (4) Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana alokasi anggaran Rp.32.438.300, dan realisasi sebesar Rp.32.297.765 atau (99,57%). Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong yang dilaksanakan di 10 Kecamatan.

- (5) Kegiatan Sosialisasi Kartu Bintang Sejahtera (KBS) oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana alokasi anggaran Rp.106.000.000, dan realisasi sebesar Rp. 93.674.065 atau (88,37%). Hasil kegiatan ini adalah terdistribusikannya Kartu Bintang Sejahtera kepada 29.064 jiwa.
- (6) Kegiatan Fasilitasi Posyantek oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana alokasi anggaran Rp.134.700.000 dan realisasi sebesar Rp.132.659.560, atau (98,49%). Hasil kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan kepada 3 posyantek (Posyantek Muda Berjaya di Kecamatan Toapaya, Posyantek Bintang Gemilang di Kecamatan Gunung Kijang, Posyantek Karya Mandiri di Kecamatan Bintang Timur). Fasilitasi melalui pelatihan peningkatan manajemen administrasi dan pemasaran sebanyak 18 orang peserta yang terdiri dari masing-masing pengurus posyantek.
- (7) Kegiatan Simpan pinjam Kelompok Perempuan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana alokasi anggaran Rp.216.596.300 dan realisasi sebesar Rp. 197.520.300 atau (99,46%).

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Masih banyaknya rumah tangga miskin yang membutuhkan penanganan.
- b. Belum terintegrasinya secara optimal program kegiatan perencanaan pembangunan pengentasan kemiskinan.
- c. Belum terintegrasinya secara optimal program kegiatan perencanaan pembangunan pengentasan kemiskinan.

- d. Belum adanya Kader Pemberdayaan Masyarakat yang dapat secara efektif meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Gotong Royong Masyarakat.
- e. Penemuan alat teknologi tepat guna belum dapat digunakan oleh masyarakat Kabupaten Bintan secara luas.

2) Solusi

- a. Perlu perencanaan pengentasan kemiskinan yang terpadu melalui program kegiatan pengentasan kemiskinan yang komprehensif dan berdasarkan prioritas penanganan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bintan yang telah dibentuk. Program penanganan kemiskinan di Kabupaten Bintan tetap akan berpegang pada akar permasalahan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan yang ada. Dengan demikian akan dilakukan secara bertahap dengan konsistensi tinggi atas arah yang telah ditentukan. Ada permasalahan strategis, ada permasalahan yang merupakan akibat, dan ada pula permasalahan yang bersifat pendukung. Masing-masing permasalahan akan dijawab melalui kerangka program yang dilaksanakan oleh masing-masing sektor, tetapi diikat oleh sebuah isu utama pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan dan pembangunan infrastruktur.
- b. Perlu perencanaan pengentasan kemiskinan yang terpadu melalui program kegiatan pengentasan kemiskinan yang komprehensif dan berdasarkan prioritas penanganan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bintan yang telah dibentuk.
- c. Perlu adanya pembentukan dan temu Kader Pemberdayaan Masyarakat untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Gotong Royong Masyarakat.

- d. Perlu adanya pembentukan dan pembinaan Posyantek di setiap kecamatan sehingga menjamin keberlanjutan inovasi penemuan alat-alat teknologi tepat guna dan dapat memasyarakatkan alat-alat teknologi tepat guna tersebut.

4.1.12. Urusan Sosial

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Kesatu** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk urusan Sosial adalah sebagai berikut : Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi **11 unit**; Jumlah PMKS yang mendapat bantuan sosial **8.173 jiwa** dan Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial **111,24%**.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Pengiriman Penyandang Cacat dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp.78.500.000,- realisasi sebesar Rp.78.107.200 atau 99,5%. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya keberfungsian sosial penyandang cacat guna terwujudnya kemandirian dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam bentuk pemberian bantuan modal usaha, peningkatan kemampuan diri melalui pelatihan di panti rehabilitasi, juga melalui pendampingan yang dilaksanakan secara rutin oleh Dinas Sosial sehingga Usaha Ekonomi Produktif yang sudah terbentuk bisa tetap berjalan dan bahkan mungkin berkembang. Pada tahun 2015 Dinas Sosial mengadakan kegiatan Sosialisasi tentang Pengasuhan Anak Disabilitas Bagi Orang Tua (Parenting Skill) sebanyak 25 orang. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi bagi para

orang tua tentang kebutuhan anak disabilitas dan pengetahuan dalam memenuhi kebutuhan anak disabilitas serta fasilitas yang diberikan pemerintah sehingga tumbuh keinginan untuk memberi kesempatan kepada anak disabilitas dalam mengecap pendidikan formal maupun informal sesuai dengan minat dan bakatnya. Untuk meningkatkan kemampuan keterampilan para penyandang disabilitas, Dinas Sosial juga mengirim mereka ke pusat atau panti rehabilitasi. Sepanjang Tahun 2015 telah dikirim penyandang disabilitas 1 orang yang disesuaikan dengan bakat dan minat mereka. Penyandang disabilitas yang dikirim adalah Guntur ke Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) "Bahagia" di Medan. Pelatihan dilaksanakan selama 6 bulan dan dibiayai oleh Kementerian Sosial RI. Untuk mendukung keterampilan yang diperoleh di PSBD maka Forum Komunikasi Keluarga Dengan Anak Kedisabilitas (FKKDAK) Kab. Bintan telah memberikan bantuan Usaha Ekonomi Produktif berupa peralatan sablon bagi Guntur. Pada tahun 2015 FKKDAK mengadakan kegiatan pelatihan keterampilan handicraft bagi 10 orang Tuna Rungu di Aula Desa Toapaya Selatan selama 7 hari, dan memberikan bantuan bagi 12 Anak Dengan Kedisabilitas (ADK) Berat berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- selama 12 bulan. Pada Bulan April 2015 Dinas Sosial Kabupaten Bintan bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Kep. Riau mengadakan Kegiatan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) yang dipusatkan di Kecamatan Bintan Utara tepatnya di Gedung Nasional Tanjung Uban selama 6 hari. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan penyandang disabilitas di Kabupaten Bintan dan memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan konseling bagi penyandang disabilitas serta keluarganya. Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan guru SLB, dokter, perawat, psikolog dan unsure masyarakat yang sebelumnya telah dibekali ilmu melalui pelatihan

Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM). Melalui kegiatan tersebut bisa diidentifikasi kebutuhan keluarga dan penyandang disabilitas yang ditindaklanjuti dengan pemberian bantuan yaitu kursi roda untuk anak (ADK) sebanyak 3 buah, untuk Orang Dengan Kedisabilitas (ODK) kursi roda sebanyak 3 unit, tongkat ketiak 2 buah, tongkat tuna netra 1 buah dan hearing add 2 buah.

- (2) Kegiatan Pencegahan Penularan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan NAPZA Secara Efektif. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.255.000,- realisasi sebesar Rp.25.162.700,- atau (99,63%). Hasil dari kegiatan ini adalah masyarakat khususnya Pekerja Seks Komersil (PSK) semakin memahami bahaya HIV/AIDS dan penyalahgunaan Napza serta upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mencegahnya melalui penyuluhan Pencegahan Penularan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan Napza kepada PSK di Kecamatan Toapaya dan Bintan Utara sebanyak 20 orang.
- (3) Kegiatan Penanganan orang yang mengalami gangguan jiwa/ mental dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp.60.330.000,- realisasi sebesar Rp.59.735.400,- atau (99,01%). Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengiriman penyandang gangguan jiwa/ mental yang dikirim ke Rumah Sakit Jiwa Tampan di Pekan Baru sebanyak 2 orang pasien, sehingga diharapkan para Penyandang Gangguan Jiwa/ Mental dapat sembuh, kembali ke tengah-tengah keluarganya dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat.
Penanganan para penyandang gangguan jiwa/ mental sudah mulai dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan sejak Tahun 2011 sampai dengan sekarang. Dalam kenyataannya jumlah penyandang gangguan jiwa tidak berkurang.
- (4) Kegiatan Penyuluhan Masyarakat di Lokasi Rawan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.49.492.895,- realisasi sebesar Rp.49.264.600,- atau (99,54%). Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyuluhan kepada Pekerja Seks Komersial yang ada di 2 lokasi yaitu Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara dan Kelurahan Toapaya Asri Kecamatan Toapaya. Dengan target Pekerja Seks Komersil sebanyak 123 orang dan mantan PSK sebanyak 43 orang. Tujuannya adalah pendekatan melalui penyampaian informasi kepada masyarakat yang ada di lokasi tentang rencana pemerintah untuk mengalihfungsikan lokasi menjadi tempat yang lebih bersih, sehat dan produktif. Penyuluhan melibatkan instansi terkait seperti Komisi Perlindungan AIDS Provinsi Kep. Riau, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kep. Riau dan Kementerian Agama Wilayah Kabupaten Bintan. Rencana Pemerintah Kabupaten Bintan untuk mengalihfungsikan lokasi mendapat dukungan dari semua pihak dengan tetap mengedepankan bahwa kepentingan masyarakat yang berada di wilayah tersebut tetap menjadi prioritas.

- (5) Peningkatan Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia Dalam Pantidilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp.554.680.000,- realisasi sebesar Rp.551.805.100,- atau (99,48%). Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan sosial bagi lanjut usia di panti Rumah Bahagia melalui penyediaan kebutuhan pangan, sandang dan sosial bagi 41 orang lanjut usia serta insentif bagi 9 orang pengurus Rumah Bahagia.

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

2) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

a. Pelaksanaan Program

(1) Kegiatan Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp.113.975.000,- realisasi sebesar Rp.107.721.760,- atau (94,51%). Hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksananya koordinasi antar Pelaksana Program (provider) dan pemantauan terhadap pemanfaatan bantuan yang diterima peserta sasaran Program Keluarga Harapan. Pada tahun 2015 jumlah rumah tangga sasaran yaitu Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang di pantau sebanyak 896 RTSM. Kegiatan ini ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin. Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sangat Miskin, sedangkan untuk jangka panjang dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil dan perbaikan gizi, diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi. Pada Tahun 2012 jumlah peserta PKH adalah 888 RTSM dan pada akhir tahun 2014 berkurang menjadi 750 RTSM. Hal Perubahan jumlah peserta diketahui karena Pendamping PKH secara berkala melaksanakan verifikasi dan pemutakhiran data. Perubahan jumlah peserta ini disebabkan oleh beberapa hal seperti pindah, meninggal, status keluarga berubah atau tidak ada lagi komponen dalam RTSM sebagai syarat peserta PKH. Pada tahun 2015 peserta PKH bertambah menjadi 896 RTSM, hal ini disebabkan karena pada Bulan Oktober 2015 Kecamatan Gunung Kijang mendapat alokasi kegiatan PKH dari Kementerian Sosial RI, dan tersisa Kecamatan Mantang yang belum mendapat alokasi kegiatan ini.

Tabel 4.35 : Jumlah RTSM dan bantuan yang dibayarkan pada Tahun 2015

No	Uraian Kegiatan	Tanggal Pencairan	Jumlah RTSM	Jumlah Dana (RP.)	Ket.
1	Tahap I	08 sd 10 April	742	364.361.250,-	
2	Tahap II	9 sd 27 Juli	739	634.892.500,-	
3	Tahap III	8 sd 15 Oktober	741	273.708.750,-	
4	Tahap IV	26 sd 31 Desember	918	269.653.750,-	
TOTAL				1.617.953.750,-	

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bintan Tahun 2016

Pada Tahun 2015 akan diadakan Resertifikasi atau penilaian terhadap status kepesertaan PKH.

- (2) Kegiatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.680.000,- realisasi sebesar Rp. 147.510.850,- atau (97,90%). Bentuk kegiatannya adalah pemberian sembako bagi keluarga kurang mampu yang ada di Kecamatan Toapaya, Gunung Kijang dan Bintan Utara sebanyak 250 orang. Kegiatan lain yang dilaksanakan adalah Penyuluhan Pencegahan Perilaku Seks Bebas di Kalangan Remaja. Sasarannya adalah siswa SMU sebanyak 50 orang di Kecamatan Bintan Timur.

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

3) Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp.106.973.700,- realisasi sebesar Rp.96.547.450,- atau (90,61%). Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas potensi dan sumber

kesejahteraan sosial dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial di wilayahnya masing-masing, melalui Bimbingan Teknis Jejaring TKSK dan PSM sebanyak 50 orang peserta.

Jenis dan jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di kabupaten Bintan Tahun 2015 seperti table di bawah ini :

Tabel 4.36 : Jenis dan jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di kabupaten Bintan Tahun 2015

No	Jenis PSKS	Jumlah
I	PSKS Perseorangan	
	1. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	28
	2. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSK)	10
II	PSKS Keluarga	
	1. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1
	2. Family Care Unit (FCU)	1
III	PSKS Kelembagaan	
	1. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	15
	2. Karang Taruna	51
	3. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	9
	4. Forum CSR Kesejahteraan Sosial	0

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bintan Tahun 2016

- (2) Kegiatan Pemberdayaan Keluarga, dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp.228.620.000,- realisasi sebesar Rp.227.049.500,- atau (99,31%). Hasil dari kegiatan ini adalah, meningkatnya pengetahuan baik secara teori maupun praktek/ implementasi para Pengelola Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dan Tim Profesi dalam menangani permasalahan sosial khususnya permasalahan psikososial keluarga melalui bimbingan teknis penanganan masalah psikososial bagi pekerja social LK3 sebanyak 20 orang peserta. Melalui kegiatan ini juga telah disalurkan bantuan paket sembako bagi 400 keluarga kurang mampu, yang dilaksanakan bekerja sama dengan Persatuan Istri Dewan (PISWAN) Kabupaten Bintan untuk mengurangi beban keluarga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

- (3) Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin) dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp.650.000.000,- realisasi sebesar Rp.647.022.534,- atau (99,54%). Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya penghasilan keluarga melalui pemberian bantuan dana permodalan bagi masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebanyak 30 KUBE Perdesaan dengan jumlah bantuan masing-masing Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan 50 KUBE Perkotaan dengan jumlah bantuan Rp.20.000.000,- per KUBE yang bersumber dari Kementerian Sosial RI. dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.37 : Data KUBE yang Mendapat Bantuan Tahun 2015

No	Kecamatan	KUBE Perdesaan	KUBE Perkotaan
1	Bintan Utara		5
2	Seri Kuala Lobam		10
3	Teluk Sebong		2
4	Teluk Bintan		
5	Bintan Timur		15
6	Gunung Kijang		7
7	Toapaya		8
8	Tambelan	30	
TOTAL		30 KUBE	50 KUBE

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bintan Tahun 2016

Untuk meningkatkan motivasi anggota KUBE dalam mengelola KUBE maka diadakan penilaian terhadap KUBE dan Pendamping KUBE. Berdasarkan penilaian yang dilakukan maka ditetapkan 4 KUBE Berprestasi dan 5 Pendamping Berprestasi, yaitu :

Tabel 4.38 : Penilaian KUBE Perdesaan Berprestasi

NO	NAMA KUBE	ALAMAT	PERINGKAT	JUMLAH HADIAH
1	SRI KERAPU	Ds Pengujan Kec. Teluk Bintan	JUARA I	Rp. 3.000.000,-
2	RISKY	Desa Teluk Sasah Kec. Seri Kuala Lobam	JUARA II	Rp. 2.500.000,-
3	TERATAI	Desa Mapur Kec. Bintan Pesisir	JUARA III	Rp. 1.500.000,-

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bintan Tahun 2016

Tabel 4.39 : Penilaian KUBE Perkotaan Berprestasi

NO	NAMA KUBE	ALAMAT	PERINGKAT	JUMLAH HADIAH
1	MAJU MAPAN	Kelh Kota Baru Kec. Teluk Sebong	JUARA I	Rp. 3.000.000,-
2	KENCANA	Kelh Sei Lekop Kec. Bintan Timur	JUARA II	Rp. 2.500.000,-
3	MAJU JAYA	Kelh. Toapaya Asri Kec. Toapaya	JUARA III	Rp. 1.500.000,-

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bintan Tahun 2016

Untuk penilaian Pendamping diberikan kepada 5 (lima) orang dengan peringkat sebagai berikut :

Tabel 4.40 : Penilaian Pendamping Berprestasi

NO	NAMA PENDAMPING	JABATAN	PERINGKAT
1	ABDUL HAMID	Pendamping KUBE Kec. Teluk Bintan	JUARA I
2	EKA MANDA SARI	Pendamping KUBE Kec. Teluk Sebong	JUARA II
3	RUDI OPTIADI	Pendamping KUBE Kec. Bintan Utara	JUARA III
4	YUPRIADI	Pendamping KUBE Kec. Seri Kuala Lobam	JUARA IV
5	RUDI PRIHANDOKO	Pendamping KUBE Kec. Bintan Timur	JUARA V

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bintan Tahun 2016

- (4) Kegiatan Peningkatan SDM Pendamping RTLH dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp.79.720.000,- realisasi sebesar Rp.79.477.548,- atau (99,60%). Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pendamping RTLH dalam mendampingi penerima sasaran RS RTLH sehingga bantuan yang diterima dipergunakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Bimbingan teknis dilakukan selama 3 hari dan diikuti oleh 24 orang peserta calon pendamping RS RTLH dari Kecamatan se Kabupaten Bintan

- (5) Kegiatan Administrasi Kegiatan Kelembagaan Sosial Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp.57.120.000,- realisasi sebesar Rp56.224.479,- atau (99,94%). Hasil dari kegiatan ini tersedianya program kerja Karang Taruna Kabupaten Bintan untuk Tahun 2015-2019 melalui penyelenggaran Rapat Kerja Karang Taruna yang melibatkan pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan se Kabupaten Bintan sebanyak 40 orang peserta.
- (6) Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (Administrasi Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp.226.520.000,- realisasi sebesar Rp.226.126.000,- atau (99,87%). Hasil dari kegiatan ini adalah terselenggaranya administrasi kegiatan bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan kegiatan pendampingan untuk bantuan stimulan perumahan swadaya dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat yang disediakan untuk verifikasi, sosialisasi, bantuan upah tukang dan monitoring kegiatan. Jumlah rumah yang direhab adalah 239 unit rumah yang semuanya berada di Kecamatan Teluk Bintan.
- (7) Penanggulangan Kemiskinan (Administrasi Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)) dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp.252.934.300,- realisasi sebesar Rp.216.628.400,- atau (%).Hasil dari kegiatan ini adalah terselenggaranya administrasi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)) bagi 140 sasaran bersumber dari dana APBD kabupaten Bintan sebesar Rp.3.500.000.000,-.

Daftar alokasi dan sasaran Bantuan RS RTLH di Kabupaten Bintan Tahun 2015 seperti tabel di bawah ini :

Tabel 4.41: Daftar Alokasi dan Sasaran Bantuan RS RTLH di Kabupaten Bintan Tahun 2015

No	Kecamatan/Desa/Kelh	Jlh sasaran (unit)	Jumlah Anggaran (Rp.)	Sumber Dana
1	GUNUNG KIJANG 1. Desa Malang Rapat 2. Desa Teluk bakau	25 4	500.000.000,- 80.000.000,-	APBD Bintan
2	TAMBELAN - Desa Mentebung - Desa Kukup - Kelh Teluk Sekuni - Ds Kampung Melayu - Ds Batu Lepuk - Ds Kampung Hilir	11 13 5 5 5 5	308.000.000,- 338.000.000,- 130.000.000,- 130.000.000,- 130.000.000,- 130.000.000,-	APBD Bintan
3	MANTANG - Ds Mantang Besar - Desa Dendun	30 37	769.000.000,- 932.000.000,-	APBD Bintan
4	TELUK BINTAN - Ds Bintan Buyu - Ds Tembeling - Ds Pengujan - Kelh Tembeling Tanjung - Ds Penaga	30 32 32 72 73	405.000.000,- 415.000.000,- 450.000.000,- 935.000.000,- 990.000.000,-	APBN melalui Kementerian PU dan Perumahan Rakyat

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bintan Tahun 2016

- (8) Kegiatan Pelestarian, Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan, perintisan dan Kestiakawanan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp.52.740.000,- realisasi sebesar Rp.52.615.200,- atau (99,76%). Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya generasi muda untuk menghormati dan menghargai jasa-jasa pahlawannya serta menanamkan dan mengembangkan jiwa, semangat serta cita-cita patriotisme bagi generasi muda melalui kegiatan Olimpiade Kepahlawanan, yang diikuti oleh pelajar SMU yang ada di Kabupaten Bintan sebanyak 50 orang peserta.
- (9) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.261.199.000,- realisasi sebesar Rp. 261.125.850,- atau (99,97%). Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya peranan serta partisipasi dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di wilayahnya masing-masing melalui pelaksanaan Hari Lansia, pemberian bantuan sembako bagi keluarga miskin sebanyak 100 paket, dan pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi 100 anak disabilitas.

- (10) Pembinaan Bagi Lanjut Usia Luar Panti dilaksanakan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan Komisi Daerah (KOMDA) Lanjut Lansia dengan alokasi anggaran sebesar Rp.80.925.000,- realisasi sebesar Rp.77.367.200,- atau (95,60%). Bentuk kegiatannya adalah pemberian bantuan sembako bagi 200 orang lanjut usia dan pemberian alat bantu kursi roda sebanyak 2 unit untuk lanjut usia yang mengalami kecacatan. Sasarannya adalah lanjut usia yang berada dalam pengasuhan keluarga.
- (11) Pelaksanaan Lomba Pidato dan Kepahlawanan dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp.80.000.000,- realisasi sebesar Rp.77.077.700,- atau (96,35%). Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya generasi muda untuk menghormati dan menghargai jasa-jasa pahlawannya serta menanamkan dan mengembangkan jiwa, semangat serta cita-cita patriotisme bagi generasi muda melalui kegiatan Lomba Pidato Kepahlawanan , yang diikuti oleh pelajar SMU yang ada di Kabupaten Bintan sebanyak 50 orang peserta.

4) Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

a. Permasalahan dan Solusi

- (1) Kegiatan Bimbingan Teknis bagi TAGANA dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp.140.114.000,- realisasi

sebesar Rp.139.961.770,- atau (99,89%). Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan para Tagana dalam menghadapi bencana dan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam situasi darurat sehingga diharapkan dapat bertindak cepat, tepat dan sigap terhadap bencana. Sasarannya adalah anggota Tagana Kabupaten Bintan sebanyak 52 orang.

- (2) Sosialisasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp.126.220.000,- realisasi sebesar Rp.125.284.100,- atau (99,26%). Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan tentang penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial sehingga partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial meningkat. Kegiatan dilaksanakan di 4 Kecamatan yaitu Bintan Utara, Seri Kuala Lobam, Bintan Timur dan Kecamatan tambelan dengan jumlah peserta 250 orang.
- (3) Pemutakhiran data PMKS dilaksanakan Dinas Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp.107.411.000,- realisasi sebesar Rp.107.252.900,- atau (99,85%). Tujuan kegiatan ini adalah tersedianya data PMKS yang akurat. Pemutakhiran data dilakukan oleh para TKSK, PSM dan Pendamping KUBE berjumlah 30 orang. Data PMKS Kabupaten Bintan Tahun 2015 seperti Tabel di bawah ini :

Tabel 4.42 : Daftar Jumlah dan Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kabupaten Bintan Tahun 2015

No	Kecamatan	Jenis PMKS					
		Penyandang Disabilitas (org)	Tuna Susila (org)	Lanjut Usia (org)	Bekas Napi (org)	Rumah Tangga Miskin (KK)	RTLH (unit)
1	Teluk Bintan	52		94		458	128
2	Bintan Pesisir	49		32		442	103
3	Teluk Sebong	59		39		744	75
4	Bintan Timur	65		76	3	1050	84
5	Bintan Utara	43	54	20		764	29
6	Toapaya	38	69	56	1	349	28
7	Seri Kuala	39		30		530	152
8	Lobam	17		21		286	28
9	Mantang	47		17		506	140
10	Gunung Kijang Tambelan	62		39		602	98
Jumlah		481	123	424	4	5.731	865

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bintan Tahun 2016

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tidak lengkap dan akurat sehingga menyulitkan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan.
- Semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan social baik kualitas maupun kuantitas sehingga menyulitkan dalam penanganannya karena petunjuk teknis belum ada, seperti penanganan orang yang mengalami gangguan jiwa/ mental, penertiban lokalisasi WTS, dan juga untuk pengelolaan bantuan hibah yang diterima oleh masyarakat baik melalui KUBE maupun langsung.
- Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan yang diterima dari pemerintah membuat masyarakat cenderung menjadi manja dan malas sehingga setiap bantuan yang diterima tidak dimanfaatkan secara maksimal
- Pembangunan kesejahteraan social masih dititikberatkan pada penanganan masyarakat miskin, sehingga alokasi dana untuk penyandang masalah kesejahteraan social yang lain sangat

kecil dan pemanfaatan potensi sumber kesejahteraan sosial belum optimal.

- e. Anggaran yang terbatas menyulitkan untuk melaksanakan pembinaan secara kontiniu karena kondisi geografis daerah pada umumnya terpencar dan harus ditempuh dengan menggunakan transportasi laut dengan biaya relatif tinggi.

2) Solusi

- a. Melakukan pemutakhiran data dengan melibatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada
- b. Memberdayakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat untuk ikut berperan serta dalam menangani permasalahan sosial yang ada dilingkungannya dengan melibatkan mereka dalam berbagai aktivitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan maupun lembaga pelayanan sosial yang ada di Kabupaten Bintan.
- c. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia potensi dan sumber kesejahteraan sosial melalui pemberian bimbingan teknis dan pelatihan sehingga mampu menjadi mitra Dinas Sosial di wilayahnya masing-masing.
- d. Mengembalikan fungsi pelayanan sosial kepada hakikatnya semula yaitu "Help People To Help Them Self" sehingga masyarakat tidak tergantung kepada bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Menyusun rencana kegiatan yang sasarannya adalah potensi dan sumber kesejahteraan sosial sehingga PSKS yang ada di Kabupaten Bintan bisa optimal dalam menjalankan tugas dan peranannya.

4.1.13. Urusan Kebudayaan

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Kesatu** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk urusan Kebudayaan adalah sebagai berikut : Jumlah grup kesenian (yang dibina) **35 Grup**; Jumlah gedung kesenian **5 Unit**.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya Seni dan Perfilman

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Pengembangan Seni dan Budaya dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.552.500.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.550.084.710,- atau 99,56%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya 5 (Lima) Kali Kegiatan Tampilan / Pelaksanaan Panggung Seni dan Budaya Bintan dari selama tahun 2015. Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya Pelestarian Seni, Wadah Pembinaan Kesenian dan Promosi Seni dan Budaya yang ada di Kabupaten Bintan.
- (2) Kegiatan Festival Tari yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.223.705.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.225.732.500 atau 96,59%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Kegiatan Festival Tari Kabupaten Bintan. Manfaat dari Kegiatan ini adalah terlaksananya suatu ajang seleksi dan pengukuran perkembangan Seni dan Budaya yang ada di Kabupaten Bintan untuk menjadi utusan Tim Tari Yang akan mewakili Kabupaten Bintan ke Tingkat Provinsi
- (3) Kegiatan Pentas Kesenian Rakyat yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.135.200.000 realisasi anggaran sebesar

Rp.132.637.600,- atau 98,10%. Keluaran dari kegiatan adalah telah terselenggaranya Terselenggaranya Pentas Kesenian Rakyat. Adapun manfaatnya untuk untuk menampilkan berbagai kesenian dan permainan rakyat yang ada di Kabupaten Bintan.

- (4) Kegiatan Pembinaan Kebudayaan Nasional Tradisional yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.151.600.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.151.211.650,- atau 99,74%. Pada tahun 2015 pemerintah Kabupaten Bintan telah penyelenggaraan ajang kopetisi lomba lasqi tingkat kabupaten dan juga penyediaan sarana pakaian tari untuk 10 tim. Manfaat yang di hasilkan dari kegiatan ini yaitu terukurnya perkembangan kesenian lasqi di Kabupaten Bintan dan juga untuk mewakili tim lasqi kabupaten Bintan di tingkat Provinsi.
- (5) Kegiatan Perlindungan Hak Intelektual dan Karya Seni dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.84.800.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.74.387.100,- atau 87,72%. Keluaran dari kegiatan ini adalah untuk mendukung pendataan dan proses registrasi benda cagar budaya dan warisan budaya tak benda.
- (6) Kegiatan Pelestarian Adat Istiadat Bintan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.225.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.223.022.450,- atau 99,12%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya 2 Kegiatan untuk mendukung Lembaga Adat Melayu Bintan yaitu Musda LAM dan Upacara Adat Makan Beradap LAM Kabupaten Bintan beserta pelantikan Kepengurusan LAM Kecamatan.
- (7) Kegiatan Partisipasi Mengikuti Pawai Budaya yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.243.750.000,- realisasi anggaran

sebesar Rp.236.070.100,- atau 96,85%. Kegiatan ini telah melaksanakan Partisipasi Pawai Budaya Pada Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an tingkat Provinsi di Anambas.

2) Program Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan Permuseuman

a. Pelaksanaan Program

Kegiatan Pengembangan Musium Bahari Bintan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.1.335.640.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.1.255.605.225,- atau 94,01%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyediaan Perlengkapan, peralatan dan alat display untuk musium bahari Bintan.

4.1.14. Urusan Statistik

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Keempat** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk urusan Statistik adalah sebagai berikut : Buku Kabupaten Dalam Angka **ADA**; Buku PDRB Kabupaten **ADA**.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Data dan Informasi

a. Pelaksanaan Program

(1) Kegiatan Peningkatan dan Penyusunan Sistem Peragaan Data Daerah, Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp. 91.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 84.688.630,- atau 92.76%. Hasil kegiatan ini adalah terpublikasinya data pembangunan daerah melalui media ekspos.

- (2) Pengembangan Data Website Bappeda Bintan, Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.91.904.000,- dan realisasi sebesar Rp.84.869.300,- atau 92.35%. Hasil kegiatan ini adalah terpublikasinya data, kegiatan Bappeda Kabupaten Bintan kedalam situs web <http://bappeda.bintankab.go.id>.
- (3) Fasilitasi Dan Integrasi Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.143.300.000,- dengan realisasi Rp. 122.158.140,- atau 85.25%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya fasilitasi dan integrasi data SKPD yang merupakan elemen data pembangunan daerah kedalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) terdiri dari 8 Kelompok Data, 31 Jenis Data, 3.034 Elemen Data.

b. Permasalahan dan Solusi

Pemahaman tentang pentingnya Data untuk perencanaan pembangunan masih sangat kurang. Permasalahan ini hampir terjadi disetiap SKPD, penyebabnya bukan saja kekurangan jumlah SDM maupun aparatur yang menguasai bidang TIK. Namun infrastruktur yang memadai untuk mendukung pekerjaan khususnya diwilayah Kabupaten Bintan yang hampir 90%-nya merupakan lautan. Akibatnya sering terjadi inkonsistensi data pembangunan maupun data yang tidak valid ataupun uptodate dalam penghimpunan data, sehingga perencanaan pembangunan tidak efisien dan efektif. Dengan adanya SIPD merupakan langkah pemerintah yang cukup efektif dalam sebagai *tool* untuk menghimpun data sehingga dapat menghasilkan satu data pembangunan yang *uptodate* dan terintegrasi. Diharapkan aplikasi SIPD dapat menjadi sistem informasi yang berguna bagi perencanaan pembangunan. Optimalisasi SIPD perlu mendapatkan dukungan dari berbagai stakeholder khususnya pemerintah daerah.

2) Program Inventarisasi Sumber Daya Alam

a. Pelaksanaan program

Kegiatan Penyusunan Database Sumber Daya Alam dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.422.100.000,- dan realisasi sebesar Rp.400.364.690,- atau 94,85%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya 1 (satu) dokumen kompilasi database sumberdaya alam Kabupaten Bintan.

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Program Inventarisasi Sumber Daya Alam tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

4.1.15. Urusan Kearsipan

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Keempat** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk urusan Kearsipan adalah sebagai berikut : Pengelolaan arsip secara baku **50%** dan Peningkatan SDM pengelola kearsipan **3 Kegiatan**.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:

3) Program Penyelenggaraan Kearsipan daerah

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Penelusuran pendataan dan penataan arsip statis Pemerintah Kabupaten Bintan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.44.072.358 dan terserap anggaran Rp.40.190.650 atau 91,19%. keluaran dari kegiatan ini adalah untuk memenuhi amanat undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 90 ayat (1) Pengelolaan arsip Statis wajib dilakukan

Lembaga kearsipan Kabupaten/Kota, Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bintan melaksanakan kegiatan Penelusuran pendataan dan penataan arsip statis Pemerintah Kabupaten Bintan sebagai upaya penyelamatan arsip statis (bernilai kesejarahan dan pertanggungjawaban) untuk kepentingan perencanaan pembangunan, evaluasi, pendidikan, penelitian dan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan kepada generasi yang akan datang. Kegiatan ini dilakukan dengan menjemput langsung ke SKPD selaku pencipta arsip yang sebelumnya sudah disampaikan daftar pencarian arsip statis yang sudah diverifikasi oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bintan. Selanjutnya arsip statis yang didapat dari SKPD dilakukan pengolahan dengan mendiskripsikan, mengklasifikasi, dibuatkan daftar arsip, dimasukkan dalam boks arsip dan di simpan Depo arsip Kantor Perpustakaan dan arsip Kabupaten Bintan. Kegiatan ini sudah dilakukan sejak 2012 sampai dengan 2015 dengan pagu dari 38 SKPD baru 30 yang dapat dilaksanakan pengelolaan arsip, 8 SKPD belum maksimal sehingga baru tercapai 80%.

- (2) Kegiatan Bimtek Manajemen Kearsipan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.56.176.100 dan penyerapan anggaran sebesar Rp.51.656.430 atau 91,95% Keluaran dari kegiatan ini adalah pengembangan Sumber Daya manusia Kearsipan rangka pengelolaan kearsipan untuk mendukung pengelola kearsipan yang handal dengan menerapkan pengetahuan dan ketrampilan yang disyaratkan peraturan. Kegiatan ini diikuti peserta sebanyak 102 orang Sekdes/Seklur dan Pengelola arsip Desa/ Kelurahan bertempat di Aula Kecamatan Sri Kuala Lobam pada tanggal 08 April 2015 dan 09 Mei 2015 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Bintan Timur dengan narasumber dari internal Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bintan

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Belum mempunyai depo arsip yang representatif sebagai tempat penyimpanan arsip statis Pemerintah Kabupaten Bintan.
- b. Masih rendahnya dukungan pimpinan di satuan kerja terhadap pengelolaan arsip.
- c. Belum bertambahnya SDM kearsipan di satuan kerja.
- d. Belum masuknya anggaran kearsipan dalam anggaran satuan kerja.
- e. Belum adanya reward dan punishment terhadap penyelenggara kearsipan di lingkungan satuan kerja.

2) Solusi :

- a. Mengusulkan kepada Tim TPAD untuk membuat pengadaan bangunan Depo Arsip kabupaten maupun di setiap SKPD.
- b. Perlu secara intens sosialisasi dan meningkatkan koordinasi dengan SKPD tentang pentingnya peran arsip baik berupa BIMTEK ataupun Rapat koordinasi.
- c. Pengusulan kepada BKD membuat analisis kebutuhan Arsiparis di setiap SKPD dan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten Bintan.
- d. Mengusulkan dan Menyarankan kepada TPAD dan SKPD untuk menambah anggaran peralatan kearsipan.
- e. Perlu adanya bentuk penghargaan kepada pengelola arsip yang sudah melaksanakan pengelolaan arsip dengan baik.

4.1.16. Urusan Perpustakaan

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Keempat** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk urusan Sosial adalah sebagai berikut : Jumlah perpustakaan daerah **35 Unit**; Jumlah pengunjung

perpustakaan per tahun **23.051 Orang**; Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah **16,386** Buah Buku.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Perpustakaan

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Pembinaan Perpustakaan, Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.51.374.300 dengan realisasi sebesar Rp.51.279.850,- atau 99.82%. Keluaran dari kegiatan ini adalah pelatihan kepada sebanyak 51 Pengelola Perpustakaan Desa/ Kelurahan sehingga pengelola pustaka Desa/ kelurahan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada pemustaka.
- (2) Operasional Pustaka kapal Apung, Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.167.438.290,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.135.735.050,- atau 81.07%. keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya operasional pelayanan pustaka keliling dengan kapal bantuan Perpustakaan Nasional lengkap dengan koleksi buku-bukunya menjangkau sekolah-sekolah di 3 kecamatan di pulau-pulau wilayah hiterland sebanyak 2 kali kunjungan dalam satu bulan sehingga dapat melayani pelajar maupun masyarakat.
- (3) Operasional Pustaka Mobil Keliling Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.133.500.000 dan realisasi sebesar Rp.132.130.200 atau 98,97%. Keluaran dari kegiatan ini adalah pelayanan pustaka dengan mobil keliling yang melayani 6 kecamatan yaitu mengunjungi sekolah-sekolah yang belum memiliki perpustakaan maupun kepada masyarakat. Operasional mobil terdiri dari perawatan mobil pustaka dan penyediaan BBM serta operasional

lainnya. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan masyarakat dalam penyediaan bahan bacaan masyarakat.

- (4) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.47.226.200,- dan realisasi sebesar Rp.46.434.100,- atau 98.32%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya perlombaan antar perpustakaan Sekolah Dasar se-Kabupaten Bintan untuk memberi ransangan sekaligus sebagai upaya pemetaan dalam pembinaan perpustakaan sehingga meningkatnya pelayanan perpustakaan di Perpustakaan Sekolah Dasar se Kabupaten Bintan. Pemenang lomba ini adalah Perpustakaan Sekolah dasar 003 Bintan Utara dengan mendapat uang pembinaan dan Piagam.
- (5) Kegiatan Promosi Minat Baca dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.55.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.48.180.970,- atau 87.91%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Road Show atau audiensi dengan masyarakat khususnya pelajar dalam sebuah acara terbuka dengan menyampaikan pentingnya membaca sekaligus memberi pelayanan dan promosi koleksi buku perpustakaan di 4 Kecamatan diwilayah Kabupaten Bintan
- (6) Kegiatan Lomba Cerita dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.78.759.500 dengan realisasi sebesar Rp.83.100.000,- atau 94.78%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Kegiatan lomba Cerita bagi anak Sekolah Dasar se-kabupaten Bintan yang juaranya akan diajukan untuk mewakili Kabupaten Bintan dalam Lomba tingkat provinsi sampai di pusat sehingga meningkatkan minat baca dan menambah angka partisipasi masyarakat berkunjung ke Perpustakaan. Pemenang lomba cerita bagi siswa SD se-Kabupaten Bintan adalah Tiki Viranda dari SDN 011 Bintan Timur.

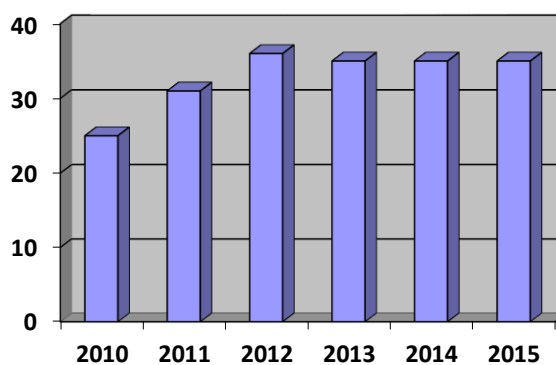
Hadiah yang diberikan berupa uang pembinaan dan piagam serta mewakili kabupaten Bintan di perlombaan tingkat Provinsi.

Capaian kinerja urusan perpustakaan adalah :

Tabel 4.43 : Perkembangan Jumlah Taman Bacaan/Perpustakaan Kelurahan dan Desa diwilayah Kabupaten Bintan dari Tahun 2010 s.d. 2015

No.	Tahun	Indeks
1	2015	35
2	2014	35
3	2013	35
4	2012	36
5	2011	31
6	2010	25

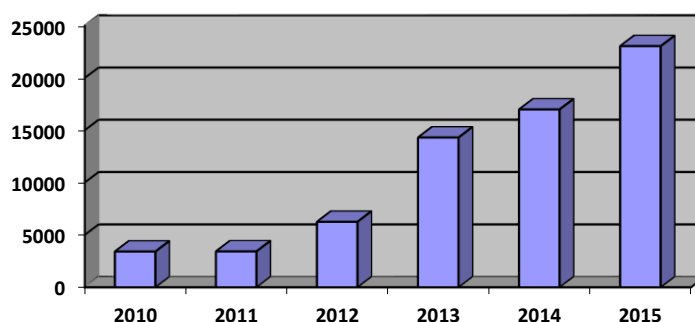
Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bintan Tahun 2016



Tabel 4.44 : Perkembangan Jumlah Pengunjung Perpustakaan dari Tahun 2010 s.d. 2015

No.	Tahun	Indeks
1	2015	23.051
2	2014	16.987
3	2013	14,300
4	2012	6,250
5	2011	3,425
6	2010	3,410

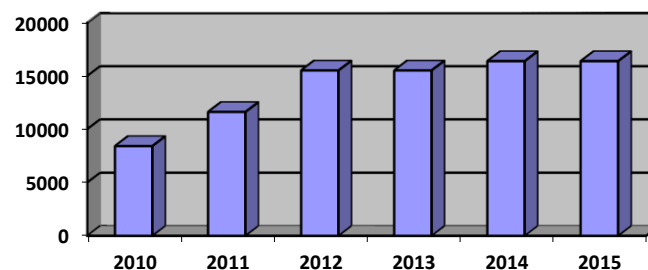
Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bintan Tahun 201



Tabel 4.45 : Perkembangan Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah dari Tahun 2010 s.d. 2015

No.	Tahun	Indeks
1	2015	16,386
2	2014	16,386
3	2013	15,511
4	2012	15,511
5	2011	11,608
6	2010	8,405

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bintan Tahun 2016



b. Permasalahan dan Solusi

Perpustakaan dan Arsip adalah salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah daerah sebagaimana amanat peraturan perundangan. Perpustakaan dalam ruang lingkup turut mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu pilar pendidikan yang membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berakarakter dan berakhlakul kharimah. Kearsipan merupakan urusan wajib pemerintahan yang mempunyai lingkup tugas menyediakan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban pemerintahan secara cepat tepat dan akurat . Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bintan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan masih terdapat beberapa kendala/permasalahan :

1) Permasalahan

- Belum mempunyai Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten yang Representatif.
- Belum adanya SDM Perpustakaan yang handal.
- Belum adanya dukungan pendanaan yang memadai perpustakaan di sekolah dan perpustakaan Desa/ Kelurahan.

2) Solusi

- a. Mengusulkan Kepada Tim TPAD pengadaan Gedung pelayanan perpustakaan daerah yang representatif.
- b. Mengusulkan kepada BKD pengadaan tenaga pustaka/pustakawan.
- c. Mengusulkan kepada Tim TPAD untuk memberi tambahan anggaran kepada sekolah dan pemerintah desa/kelurahan untuk pengelolaan perpustakaan